



JURNAL PERADILAN AGAMA

JURDILAGA

PTA JAMBI

WADAH KOMUNIKASI DAN INFORMASI

WARGA PERADILAN AGAMA SE WILAYAH PTA JAMBI

WAKA MA NON YUDISIAL, "Putusan MK Membanggakan Kita, - Tapi Jangan Tepuk Dada"



Gelar Bimtek, PTA Jambi Kokoh di Number One

"Bimtek Siadpa Plus PTA Jambi"

Jurdilaga PTA Jambi, Pertama di Peradilan Agama Se-Indonesia - Bersama Gubernur, Forkompimda, KPTA Jambi Hadiri Upacara HUT RI -



KELUARGA BESAR PTA JAMBI
MENGUCAPKAN
SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1434 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN
DIRGAHAYU HUT RI KE 68
SERTA DIRGAHAYU MAHKAMAH AGUNG RI KE 68



DAFTAR ISI



BADILAG NEWS »

“Putusan MK Membanggakan Kita, Tapi Jangan Tepuk Dada” > 3

Lima Peristiwa Penting di Bulan Agustus 2013 > 5

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial : “Jadilah Teladan Bagi Pegawai Lain” > 8

AGENDA PTA JAMBI »



Agenda PTA Jambi Peringati Milad Ke-20

Tanggal 6 Februari merupakan tanggal yang bersejarah bagi PTA Jambi. 20 Tahun lalu, tepatnya 6 Februari 1993, PTA Jambi diresmikan. > 10

Wakil Ketua MA Hadiri Milad PTA Jambi ke - 20 > 12

Pelantikan Hakim Tinggi PTA Jambi Berlangsung Sukses > 17

KPTA dan Pansek PTA Jambi Ikuti Rakor > 19

WKPTA Jambi Jadi Nara Sumber Bimtek Kompetensi Hakim PA Angkatan IV Tahun 2013 > 20

IKPA PTA Jambi Gelar Seminar > 21

Jurdilaga PTA Jambi Tutup Tahun 2012 dengan Manis > 22

Jurdilaga PTA Jambi, Pertama di Peradilan Agama Se-Indonesia > 23

Pansek PTA Jambi Terima Tim Supervisi BUA MARI > 24

PTA Jambi Gelar Tausiyah dan Tadarus Tiap Hari > 25

PTA Jambi Rilis Peringkat Usulan Remunerasi September 2013 > 26

Rakerda PTA Jambi 2012, Sejumlah PA Terima Penghargaan > 27

SEPUTAR PA »

PA JAMBI » 29

Penyambutan Bulan Ramadhan di PA Jambi dihadiri KPTA Jambi

PA SENGETI » 31

Study Banding Pengadilan Tinggi Jambi Ke Pengadilan Agama Sengeti Dalam Rangka Kemajuan SIADPA

PA MUARA SABAK » 32

Bekerjasama dengan Pemkab Tanjab Timur, PA Muara Sabak Gelar Penyuluhan Hukum

PA KUALA TUNGKAL » 35

Waka PTA Jambi Pimpin Pengawasan dan Pembinaan di PA Kuala Tungkal

PA MUARA BULIAN » 37

Tim Biro Perlengkapan MA Kunjungi PA Muara Bulian

PA MUARA TEBO » 38

PA Muara Tebo Kembali Mengukur Prestasi

PA MUARA BUNGO » 40

PA Muara Bungo Diskusikan Isbat Nikah

PA SAROLANGUN » 41

PA Sarolangun Gelar Sidang Keliling Ke - 11 Tahun 2013

PA BANGKO » 42

Sekali lagi, PA Bangko Berpestrasi di Bidang Keuangan

PA SUNGAI PENUH » 43

PTA Jambi Lakukan Pengawasan dan Pembinaan di PA Sungai Penuh

KIPRAH PTA JAMBI DI PEMPROV JAMBI



Bahas Persoalan Daerah, Gubernur Libatkan Ketua PTA Jambi > 45

Ketua PTA Jambi Hadiri Paripurna DPRD Provinsi Jambi > 46

Ketua PTA Jambi Hadiri Pembukaan MTQ Ke-43 Provinsi Jambi > 47

KPTA Jambi Hadiri Pertemuan Gubernur dengan Panja Komisi IV DPR-RI > 48

KPTA Jambi Pimpin Safari Ramadhan Pemprov Jambi di Merangin > 49

Pembina Jurdilaga PTA Jambi Hadiri Penganugerahan Pena Emas Bersama Gubernur, > 50
Bersama Forkompimda, KPTA Jambi Hadiri Upacara HUT RI > 51

PTA RESPONSIF >



Ketua PTA Jambi :
"Selamat Atas Terbitnya
Majalah Digital Edisi
Perdana" > 53

Sekditjen Raih Gelar Doktor,
KPTA Jambi Ucapkan Selamat > 54
KPTA Bandarlampung Raih Gelar Doktor,
KPTA Jambi Ucapkan Selamat > 55
KPTA Jambi Ucapkan Selamat atas Diresmikan
39 Gedung Baru Pengadilan > 56
MA Peringkat Pertama, KPTA Jambi
Ucapkan Selamat > 57
Ketua PTA Jambi: Selamat Atas dilantiknya
Ketua PTA Yogyakarta > 58

PENGEMBANGAN SIADPA PLUS

Berkat Kerja Keras, Timda SIADPA Plus
PTA Jambi Kembali Raih Prestasi > 59
KPTA Jambi Buka Secara Resmi
Bimtek SIADPA Plus > 60
PTA Jambi Barada di Posisi Teratas > 62
Gelar Bimtek, PTA Jambi Kokoh
di Number One > 63
Timnas Apresiasi Kinerja
Timda SIADPA Plus PTA Jambi > 64



Semua KPA Ditantang Kroscek
SIADPA Plus > 67



WKPTA Jambi:
"Semua Wajib
Gunakan SIADPA Plus" > 66

ARTIKEL

Dua Jam Bersama Komisioner KPK
Oleh : Idris Latif, SH, MH,. > 71

Jurdilaga, Bayi Mungil dari Jambi
Oleh : Noprizal, SHI > 74

Mendiskusikan kembali Contempt of Court
di Indonesia
Oleh : Doni Dermawan > 77

Laporan Sebagai Instrumen Pengawasan
Oleh : Idris Latif, SH, MH,. > 81

Narkoba dan Korupsi Ternyata Satu Ibu
Oleh : Noprizal, SHI > 83

Mengenal Lebih Dekat Bank Syari'ah
Oleh: M. Habibullah, S.E.I > 86



Dewan Penasehat : Drs. H. Muzani Zahri, SH, MH - Drs.H.M. Yamin Awie, SH, MH - Drs. H. Pahri Hamidi, SH.
Dewan Redaksi : Dra. Hj. Aslihah Muzani, SH - Drs. Abbas Fauzi, SH - Dr. H. Mulyadi Z, SH, M.Ag -
Meiradinata, S.Ag - Hj. Mayatu Sofia, SH - Yudhistira Adi Pinto, SE - Syapruddin, S.Ag - Hartati, SH -
Sahril,SH.

Pemimpin Redaksi : Idris Latif, SH, MH. **Redaktur Pelaksana :** Noprizal, S.HI. **Sekretaris Redaksi :** Jhoni
Pebriyadi Saputra. **Desain Grafis :** Abdul Rachman, SE. **Redaktur :** Azman - Dedi Arizal, SE - Fadli - Aliyanto,
S.Kom - Angga Setiawan Rahardi, SH - Adityawarman, SHI - Muthiya Sari, S.Sos -Astrie Wahyuni, S.Kom -
Ismiatun, SPd - Tri Wahyuni, S.Kom - Wiwit Rahmadani, SE - Rini Tri Hapsari, SE - Supriyati, SE, SH -
Widianingsih - Hj. Sayang, SHI, MHI - Rosmala, SHI, MHI. **Reporter Daerah :** Jurdilaga PA Sewilayah PTA
Jambi

Pengantar Redaksi

Pada era keterbukaan informasi sekarang ini, media merupakan sarana yang sangat akrab dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kapan pun, di mana pun, dan oleh siapa pun. Semua orang menginginkan informasi baru dan dapat diketahui secepat mungkin.

Berangkat dari semangat itulah, Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2012 telah mendeklarasikan berdirinya Jurnalis Peradilan Agama (Jurdilaga) PTA Jambi. Bahkan wadah Jurnalistik setingkat PTA ini merupakan organisasi yang pertama di Badan Peradilan di Indonesia.

Peran penting itulah yang menjadi semangat tersendiri bagi Jurdilaga PTA Jambi untuk merangkum beberapa tulisan baik berbentuk berita, maupun artikel yang dituliskan oleh para reporter Jurdilaga se-PTA Jambi dalam sebuah buku “Jurnal Peradilan Agama”.

Jurdilaga PTA Jambi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, Wakil Ketua PTA Jambi, Drs. H. M. Yamien Awie, SH., MH, Panitera Sekretaris PTA Jambi, Drs. H. Pahri Hamidi, SH, Pejabat struktural fungsional PTA Jambi yang selalu memberikan semangat, selalu memberikan dukungan sehingga Jurdilaga PTA Jambi kembali mampu melahirkan karya besar ini.

Jurdilaga PTA Jambi masih sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk Jurnal Peradilan Agama Edisi perdana ini.

Senyum sapa pembaca merupakan kebanggaan tersendiri bagi Jurdilaga PTA Jambi.

Jambi, 13 September 2013

Jurdilaga PTA Jambi

Sekapur Sirih

Menjadi penulis bukanlah hal yang mudah, namun jika ditekuni siapapun bisa melakukannya.

Apakah anda pernah mencoba menulis artikel atau Berita, kemudian diterbitkan pada sebuah media massa? Coba bayangkan betapa bahagianya seorang penulis, baik artikel maupun berita yang ditulisnya dimuat di media. Tidak bisa dibayangkan puas dan bangga seorang penulis tersebut.

Oleh karena itulah, saya selaku Ketua PTA Jambi beserta jajaran selalu memberikan dukungan penuh kepada Jurdilaga PTA Jambi sebagai wadah Jurnalistik PTA Jambi. Mulai dari Bimbingan Teknis, memberikan menu khusus pada website resmi PTA Jambi, hingga memberikan apresiasi yang tinggi kepada satuan kerja yang aktif menuliskan berita dan artikel baik dimuat di Badilag.net, maupun di media cetak dan online di Provinsi Jambi.

Saat ini, dihadapan para pembaca, telah tersaji sebuah karya besar Jurdilaga PTA Jambi. Sebuah buku yang diberi judul "Jurnal Peradilan Agama" Edisi Perdana, merupakan kumpulan berita dan artikel yang di kutip dari Badilag. Net dan karya-karya Jurdilaga PTA Jambi, baik berupa kegiatan PTA Jambi, kegiatan PA se wilayah PTA Jambi, kegiatan PTA Jambi bersama Pemerintah Provinsi Jambi, serta beberapa data penting terkait PTA Jambi.

Tak lupa saya mengucapkan ucapan terimakasih kepada Dewan Penasehat, Dewan Redaksi, Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana, Koordinator Liputan, Sekretaris Redaksi, Redaktur, serta semua Jurnalis yang tergabung dalam Jurdilaga PTA Jambi yang telah melaksanakan tugas reportase, menulis, mengumpulkan foto, editing, hingga menjadi sebuah karya yang sudah tersaji dengan rapi dan enak dibaca.

Saya berharap agar buku ini bisa diterima oleh pembaca dan saya mengucapkan selamat membaca.

Ketua PTA Jambi

Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH



“Putusan MK Membanggakan Kita, tapi Jangan Tepuk Dada”



Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Ahmad Kamil (kanan) didampingi Ketua Kamar Peradilan Agama Andi Syamsu Alam (tengah) dan Dirjen Badilag Purwosusilo (kiri). [Foto: Iwan Kartiwan]

Jakarta | Badilag.net

Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum mengingatkan warga peradilan agama agar tidak berlebihan dalam merespons putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. “Putusan MK itu membanggakan kita, tapi tolong kita tidak perlu tepuk dada,” ujarnya, saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi Badilag dengan Ketua dan Wakil Ketua PTA/MSA seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis malam (13/9/2013).

Langkah terbaik untuk merespons putusan itu, menurut Ahmad Kamil, ialah dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, terutama dalam hal peningkatan kualitas SDM dan penyiapan peraturan yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah.

Menurut Ahmad Kamil, seiring dengan maraknya bisnis syariah dan semakin meningkatnya potensi terjadinya sengketa, perlu ada banyak hakim peradilan agama yang mengikuti pelatihan penanganan sengketa ekonomi syariah. “Kita butuh seribu hakim,” tuturnya.

Ke depan, pada setiap pengadilan di lingkun-

gan peradilan agama akan dibentuk satu majelis hakim yang memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Saat ini peradilan agama terdiri dari 359 pengadilan tingkat pertama dan 29 pengadilan tingkat banding. Karena satu majelis terdiri dari tiga hakim, maka dibutuhkan sekitar 1000 hakim untuk menangani sengketa ekonomi syariah.

Saat ini, menurut Ahmad Kamil, hakim peradilan agama yang pernah mengikuti pelatihan ekonomi syariah belum sampai 500 orang. Mereka mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi yang berbeda-beda.

Rinciannya, 400 hakim mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Balitbangdiklatkumdil MA, 30 hakim mengikuti pelatihan yang diselenggarakan KY dan 26 hakim mengikuti pelatihan yang diselenggarakan BI.

Dengan kondisi demikian, perlu dilakukan akselerasi. Salah satu cara yang dapat ditempuh ialah dengan menetapkan tutor-tutor yang berasal dari lingkungan peradilan agama sendiri. Para tutor yang memiliki pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang ekonomi syariah itu lantas menu-

larkan pengetahuan dan kemampuannya kepada rekan-rekannya sesama hakim peradilan agama. Selain penyiapan SDM yang mumpuni, yang tidak kalah penting menurut Ahmad Kamil ialah penyiapan seperangkat aturan yang dapat digunakan hakim peradilan agama untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.

Saat ini peradilan agama telah memiliki KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) sebagai hukum materiil. Sedangkan KHAES (Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah) sebagai hukum formil akan disahkan pada tahun 2014.

“Kalau pedoman administrasi ekonomi syariah sudah ada, ditambah KHAES, maka sudah lengkap,” tuturnya.

Perjuangan belum selesai

Kompetensi peradilan agama di bidang ekonomi syariah diatur secara eksplisit di Pasal 49 huruf (i) UU 3/2006 tentang Perubahan UU 7/1989 tentang Peradilan Agama. Disebutkan di bagian penjelasan, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Meski kewenangan itu telah diatur dalam UU 3/2006, kenyataannya ada UU lain yang memberi celah kepada pelaku ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa di peradilan lain selain peradilan agama. UU tersebut adalah UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Konflik antara dua UU ini menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal UUD 1945 menjamin warga negara untuk memperoleh kepastian hukum.

Kamis (29/8/2013), majelis hakim MK menyudahi ketidakpastian hukum itu. Dalam putusan perkara Nomor 93/PUU-X/2012 itu, MK mengabulkan sebagian permohonan Ir. H. Dadang Achmad, Direktur CV Benua Engineering Consultant. MK menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam salah satu pertimbangannya, MK menyata-

kan bahwa adanya pilihan penyelesaian sengketa (choice of forum) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sedangkan dalam UU 3/2006 secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Dengan lahirnya putusan ini, maka satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah ialah pengadilan di lingkungan peradilan agama. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan di luar lembaga peradilan seperti musyawarah, mediasi dan lembaga arbitrase, asalkan disepakati dalam akad oleh para pihak.

Ketua Kamar Peradilan Agama MA Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. memberikan apresiasi yang tinggi kepada MK yang telah memberikan kepastian hukum dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Kepada warga peradilan agama, Andi Syamsu Alam berharap agar terus berjuang untuk mengokohkan eksistensi peradilan agama dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

“Perjuangan kita belum selesai,” tutur hakim agung yang tahun depan purnabhakti ini.

(hermansyah)

Lima Peristiwa Penting di Akhir Agustus 2013 Mengenai Peradilan Agama dan Ekonomi Syariah



Jakarta | Badilag.net

Ada lima peristiwa penting mengenai kompetensi peradilan agama di bidang ekonomi syariah yang terjadi di ujung Agustus 2013. Kelima peristiwa penting itu sebagian telah terekspose, namun sebagian lainnya belum.

Sebagaimana diketahui, kompetensi peradilan agama di bidang ekonomi syariah diatur secara eksplisit di Pasal 49 huruf (i) UU 3/2006 tentang Perubahan UU 7/1989 tentang Peradilan Agama. Disebutkan di bagian penjelasan, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Lantas, apa saja lima peristiwa penting mengenai kompetensi peradilan agama di bidang ekonomi syariah yang terjadi di ujung Agustus 2013? Ini dia rinciannya:

Putusan MK Memperteguh Kompetensi Peradilan Agama

Kamis (29/8/2013), majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan yang bersejarah buat peradilan agama. Putusan terhadap perkara Nomor 93/PUU-X/2012 itu sejatinya diputuskan dalam permusyawaratan hakim MK yang terdiri dari sembilan hakim konstitusi pada Kamis

(28/3/2013).

Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan Ir. H. Dadang Achmad, Direktur CV Benua Engineering Consultant, selaku pemohon. MK menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam salah satu pertimbangannya, MK menyatakan bahwa adanya pilihan penyelesaian sengketa (choice of forum) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sedangkan dalam UU 3/2006 secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Dengan lahirnya putusan ini, maka satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah ialah pengadilan di lingkungan peradilan agama. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan di luar lembaga peradilan seperti musyawarah, mediasi dan lembaga arbitrase, asalkan disepakati dalam akad oleh para pihak.

PN Jakarta Pusat Mempertegas Kewenangan Peradilan Agama

Putusan yang dibuat majelis hakim PN Jakarta

Pusat yang diketuai Nawawi Pamolango, Rabu (28/8/2013) terhitung fenomenal. Putusan ini menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Butet Kartaredjasa terhadap BRI Syariah dan BI.

Majelis hakim menerima eksepsi BI yang menyatakan bahwa yang berwenang menangani sengketa mengenai gadai syariah ialah pengadilan di lingkungan peradilan agama. Majelis hakim akhirnya memutuskan perkara ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).

Sebagaimana diwartakan hukumonline.com, dalam eksepsinya, BI mengacu kepada ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Butet menggugat BRI Syariah dan BI karena merasa dirugikan oleh BRI Syariah. BRI Syariah menjanjikan gadai syariah emas ini dijamin aman dan menguntungkan. Setelah mendengar tawaran program dan janji-janji, seniman asal Yogyakarta itu tertarik berinvestasi emas di BRI Syariah dan mengikatkan dirinya dengan akad qardh dan ijarah.

Hubungan bisnis Butet dengan BRI Syariah renggang, setelah Butet dan rekannya dikejutkan dengan penolakan BRI Syariah untuk memperpanjang akad qardh dan ijarah. BRI Syariah tidak mau memperpanjang pengikatan tersebut dan memaksa Butet menjual emas yang telah dijamin. Alasan BRI Syariah adalah adanya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DpbS tentang Pengawasan Produk Qardh Beragun Emas di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Butet juga menuding BRI Syariah menggadaikan emasnya secara sepihak dan tidak melalui lelang sebagaimana yang diatur dalam sertifikat gadai syariah. Tindakan tersebut menurut Butet telah melanggar UU Perbankan Syariah.

100 Hakim Peradilan Agama Mengikuti Diklat Ekonomi Syariah

Akhir Agustus 2013 juga menjadi momen istimewa bagi para hakim dari lingkungan peradilan agama yang terpilih menjadi peserta pendidikan dan pelatihan ekonomi syariah.

Diklat ini diselenggarakan Balitbangdiklat MA di Gedung Pusdiklat MA di Megamendung, Bogor, sejak 26 Agustus hingga 6 September 2013.

Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang pe-

serta diklat, Ahsan Dawi Mansur, diklat ini diikuti oleh 100 orang yang terdiri dari hakim tingkat banding dan tingkat pertama yang dipilih dengan kualifikasi tertentu.

Para narasumber dalam pelatihan ini terdiri dari hakim agung, hakim tinggi/hakim yustisial, pejabat BI dan akademisi.

Materi diklat adalah pasar modal syariah, alternative dispute resolution (ADR), aspek hukum dana pensiun lembaga keuangan syariah, hukum pegadaian syariah, hukum wakaf, hukum zakat, hukum kontrak, BMT dan BPRS, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, produk-produk ekonomi syariah, aspek hukum perbankan syariah, KHES, hukum bisnis syariah, hukum asuransi dan reasuransi syariah.

Metode diklat adalah interaktif-partisipatoris. Komposisinya, 25 persen teori dan 75 persen praktik. Satu materi rata-rata disampaikan selama 4 jam pelajaran. Satu jam pelajaran sama dengan 45 menit. Dengan demikian, 1 jam pelajaran berisi paparan narasumber dan 3 jam berisi tanya-jawab atau diskusi.

“Peserta disatukan dalam kelas besar dan dipecah menjadi beberapa kelompok diskusi, yaitu kelas A, B, dan C,” kata Ahsan Dawi.

Para peserta diklat yang dinyatakan lulus akan menerima sertifikat. Kelulusan itu didasarkan pada hasil penilaian yang meliputi penilaian perilaku dan penilaian akademis. Kegiatan dalam kelompok, pembuatan tugas dan evaluasi juga dipertimbangkan dalam penilaian.

Mengkaji Politik Hukum di Bidang Ekonomi Syariah, Jadi Doktor

Jumat (30/8/2013), Ketua PTA Bandarlampung resmi menyandang gelar Doktor setelah dinyatakan lulus dalam ujian terbuka promosi doktor di Universitas Padjadjaran Bandung.

Dalam ujian terbuka itu ia berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Hukum Islam di Indonesia: Studi Hukum Ekonomi Syariah dalam Politik Hukum Nasional”. Ia dinyatakan lulus dengan predikat ‘Sangat Memuaskan’.

Produk hukum mengenai ekonomi syariah yang dijadikan sasaran penelitian oleh mantan Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama Ditjen Badilag itu dalam disertasinya adalah UU 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di-

ubah menjadi UU 10/1998, UU 3/2006 tentang perubahan UU 7/1989 tentang Peradilan Agama, dan UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Ada tiga kesimpulan yang dihasilkan Ketua PTA yang lahir di Pekalongan pada 21 Januari 1950 itu dalam disertasinya.

Pertama, kebijakan politik hukum negara dalam tranformasi hukum Islam di Indonesia memperlihatkan model yang berbeda-beda dari masa ke masa sesuai dengan karakteristik bidang-bidang hukum Islam, sikap atau kehendak politik pemerintah terhadap bidang-bidang hukum Islam tersebut dan konfigurasi politik serta dinamika pergeseran pusat-pusat kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kedua, model dan karakteristik kebijakan politik hukum negara dalam bidang hukum ekonomi syariah pada masa Orde Baru bersifat akomodatif-pragmatis-simbolis-rasional. Sedangkan model dan karakteristik kebijakan politik hukum negara dalam bidang ekonomi syariah pada masa Reformasi bersifat akomodatif-responsif-partisipatif-objektif.

Ketiga, produk hukum ekonomi syariah pada masa Orde Baru bersifat responsif-politis/populistik-pragmatis. Sedangkan produk hukum ekonomi syariah pada masa Reformasi bersifat

responsif/populistik.

Terbitnya Data Mengenai Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama 2007-2012

Selama ini data mengenai jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk dan diputus oleh peradilan agama sejak 2006 hingga kini dapat dikatakan masih simpang-siur. Sejumlah karya ilmiah yang membahas sengketa ekonomi syariah bahkan terkesan miskin data kuantitatif tersebut.

Nah, pada 28 Agustus 2013 lalu, Tim Redaksi Majalah Peradilan Agama berhasil memperoleh data itu. Meski kurang komplit dan perlu divalidasi, setidaknya data itu bisa dijadikan pintu masuk untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat.

Data itu berasal dari Direktorat Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag. Data itu meliputi perkara yang masuk dan diputus pengadilan tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia sejak 2007 hingga 2012. Sejauh ini, data tersebut belum pernah dipublikasikan, baik di website maupun di laporan resmi.

Data tersebut beserta ulasan mengenai kompetensi peradilan agama di bidang ekonomi syariah akan menjadi salah satu menu yang disajikan dalam majalah Peradilan Agama edisi ke-2 yang diagendakan terbit pada pertengahan September 2013 ini.

(hermansyah)

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial : “Jadilah Teladan Bagi Pegawai Lain”



Bogor | ms-aceh.go.id

Setelah satu minggu pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Peradilan Agama seluruh Indonesia yang sedang berlangsung di Balitbang Diklat Kumdil MA Megamendung, Bogor Jawa Barat, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M. Hum datang di arena diklat pada hari Senin, 2 September 2013, pukul 13.00 Wib dan berkesempatan mengadakan pertemuan dengan peserta diklat yang dipandu oleh Kabalitbang Kumdil Ny. Siti Nurdjanah, SH., MH.

Dalam kata pengantarnya, Kabalitbang Kumdil mengatakan bahwa peserta diklat dalam keadaan sehat wal afiat, kegiatan diklat berjalan dengan lancar dan tertib. Ibu Siti Nurdjanah menjelaskan bahwa kegiatan hari ini sangat spesial karena dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial H. Ahmad Kamil.

“Hari ini sangat spesial karena Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial akan memberikan pengarahan umum kepada Bapak dan Ibu,” kata Siti Nurdjanah yang merupakan calon doktor UGM ini.

Ahmad Kamil dalam awal pengarahannya menyebutkan sangat bersyukur dapat hadir di Megamendung karena pada angkatan tahun lalu tidak sempat datang berhubung berbagai kesibukan.

Beliau menjelaskan bahwa kehadirannya ke Megamendung diluar program yang ditentukan dan beliau tidak dalam kafasitas memberikan materi

tetapi untuk memberikan arahan secara umum kepada peserta. “Saya datang kesini bukan sebagai nara sumber tapi ingin jumpa dengan peserta Diklat untuk silaturahmi,” kata Ahmad Kamil dengan nada kebabakan.

Dalam uraiannya yang berdurasi sekitar satu jam tersebut, Ahmad Kamil meminta kepada peserta untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti diklat. Kewenangan ekonomi syariah yang dimiliki oleh PA sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah hal yang patut disyukuri. Ahmad Kamil meminta kepada peserta agar merasa bertanggung jawab atas kewenangan ekonomi syariah dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Ahmad Kamil mengkisahkan bagaimana kebijakan dan keseriusan Ketua MA Prof. Bagir Manan pada waktu memperjuangkan agar PA memiliki kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah.

Dicontohkan oleh Ahmad Kamil, ketika ada silaturahmi nasional para Ulama di Pondok Pesantren Gontor ada salah seorang Ulama yang berasal dari Kalimantan Selatan bertanya kepada Bagir Manan. Pertanyaan Ulama tersebut adalah siapa yang akan memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah apabila ekonomi syariah telah diundangkan.

Menanggapi pertanyaan Ulama tersebut, Bagir

<< BADILAG NEWS >>

Manan menjawabnya dengan diplomatis bahwa yang akan memeriksa perkara ekonomi syariah adalah santri-santri Kiyai. “Tanpa dikomando Ulama mengucapkan alhamdulillah,” kata Ahmad Kamil mengkisahkan.

Selain menekankan agar bersungguh-sungguh belajar ekonomi syariah dan berusaha menangannya dengan sebaik-baiknya, Ahmad Kamil meminta kepada peserta agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

Beliau berharap agar para Hakim dapat tampil menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Ahmad Kamil menjelaskan bahwa penghasilan Hakim saat ini sangat memadai bahkan gaji Hakim Tinggi lebih tinggi dari gaji Wakil Ketua MA, oleh sebab itu tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak bekerja dengan disiplin. “Saya minta kepada Saudara-

saudara untuk bekerja dengan baik dan jadilah teladan bagi pegawai lainnya,” tandas Ahmad Kamil mengingatkan.

Peserta diklat nampak serius dan memperhatikan kata demi kata yang disampaikan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial. Hanya saja berhubung waktu beliau sangat terbatas, maka tidak ada kesempatan untuk tanya jawab.

Sebelum meninggalkan tempat acara, Ahmad Kamil berkesempatan bersalaman dengan peserta salah satu diantaranya dengan H. Mubahi, SH yang berasal dari PA Tulung Agung Jawa Timur. “Saya sangat gembira berkesempatan bersalaman dengan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial,” kata H. Mubahi dengan senyum.

(AHP)

PTA Jambi Peringati Milad Ke-20



20 Tahun PTA Jambi (1993-2013)

Jambi | www.pta-jambi.go.id

Tanggal 6 Februari merupakan tanggal yang bersejarah bagi PTA Jambi. 20 Tahun lalu, tepatnya 6 Februari 1993, PTA Jambi diresmikan. PTA Jambi yang sebelumnya merupakan bagian dari PTA Padang, menjadi berdiri sendiri, serah terima PTA Jambi dari PTA Padang, dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Sejarah Singkat PTA Jambi

Pengadilan Agama di propinsi Jambi sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Jambi, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang yang mewilayah provinsi Sumatera Barat dan Jambi.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1992, maka terbentuklah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang bersamaan dengan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta serta Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Ketua yang pertama, Drs.H.Abdul Razak,SH.

Pelaksanaan serah terima kekuasaan dan wilayah hukumnya dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (Drs.H. Wahab Muridillah) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berlangsung pada tanggal 06 Februari 1993 bertempat di gedung DPRD Provinsi Jambi.

Pengadilan Tinggi Agama pada mulanya berlamat di Jl. Soemantri Brojonegoro (simpang pulai) Jambi dari awal tahun 1993 s.d. tahun 1995 dengan menyewa sebuah rumah. Pada saat itu selain ketua hanya ada satu orang pegawai yaitu H.M.Yahya

Kadir, BA yang bertugas sebagai bendahara rutin dan gaji. Sebulan kemudian baru ada tambahan pegawai sebagai Panitera Pengganti yaitu Drs. Sudirman Cik Ani dan beberapa bulan kemudian menyusul beberapa pegawai yakni : S.Helmi, SH, Hartati, SH, dan M. Saman.



Peresmian PTA Jambi, 06 Februari 2013

Peresmian PTA Jambi, 06 Februari 2013

Pada tahun 1993/1994 Pengadilan Tinggi Agama Jambi mendapat proyek Pelita dari Departemen Agama pusat untuk membangun gedung kantor

<< AGENDA PTA JAMBI >>

baru berlantai dua dengan luas 671,56 M2, beralamat di Jl.H.Agus Salim Kota Baru Jambi diatas tanah seluas 3.494 M2 dengan status hak pakai dari Pemda Tk.I Provinsi Jambi dengan surat keputusan Gubernur

N o m o r
344 tahun
1994 tang-
gal 23 Juli
1993.

Pengadi-
lan Tinggi
A g a m a
J a m b i



pada waktu itu membawahi 6 Pengadilan Agama yaitu : Pengadilan Agama Jambi, Pengadilan Agama Muara Bulian, Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Pengadilan Agama MuaroBungo, Pengadilan Agama Bangko dan Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid tentang pembentukan Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak yang kemudian pada tanggal 28 Agustus 2002 bertambah lagi Pengadilan Agama Muara Tebo dan Pengadilan Agama Sengeti berdasarkan keputusan presiden nomor 62 tahun 2002 maka Pengadilan Agama yang berada diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi menjadi 10 satker yaitu : Pengadilan Agama Jambi, Pengadilan Agama Muara Bulian, Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Pengadilan Agama Muaro Bungo, Pengadilan Agama Bangko, Pengadilan Agama Sungai Penuh, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Muara Tebo dan Pengadilan Agama Sengeti.

Pertandingan Olahraga

Untuk memperingati Hari jadi yang ke 20 ini, dalam rangka menjalin silaturahmi dan soliditas kerja, diadakan pertandingan olahraga terbatas antara masing-masing bagian di PTA Jambi, mulai dari Hakim Tinggi, Kepaniteraan dan Kesekretaritan.

Adapun cabang olah raga yang dipertandingkan adalah, Catur, Tenis Meja, Volley Ball Putra/Putri, dan Futsal Putra/Putri yang berlangsung di Halaman Gedung PTA Jambi.



H a s i l
Pertandin-
gan menem-
patkan Tim
Hakim Ting-
gi menjadi
Juara Umum
s e l u r u h
Pertandingan
O l a h r a g a ,

disusul oleh Kesekretarian dan Kepaniteraan.

Bertepatan Pula dengan HUT Ketua PTA Jambi Salah satu keunikan, Hari Jadi PTA Jambi ternyata bertepatan pula dengan Hari Kelahiran Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH, MH, sehingga di malam peringatan HUT PTA Jambi, tanggal 6 Februari 2013, juga sekaligus diselipkan Peringatan HUT KPTA Jambi yang ke 66.

Acara berlangsung meriah, Selain Sambutan dari Wakil Ketua PTA Jambi, selaku Koordinator Kegiatan, Pemutaraan Film Pendek Sejarah Singkat PTA Jambi, Sambutan dari Ketua PTA Jambi serta Penyerahan Hadiah Bagi pemenang Lomba, dan Pematangan Tumpeng oleh Ketua PTA Jambi.

Seluruh Warga PTA Jambi mengucapkan Selamat Milad PTA Jambi yang ke 20 dan Selamat HUT Ketua PTA Jambi yang ke 66. Semoga PTA Jambi semakin Jaya dan Solid dalam menuju peradilan yang agung, dan Ketua PTA Jambi sentiasa diberi kesehatan sehingga mampu memimpin PTA Jambi dengan baik. (Jurdilaga PTA Jambi)

Wakil Ketua MA Hadiri Milad PTA Jambi



Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum (dua dari kiri) diapit oleh KPTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH, MH (Kiri), Wagub Prov. Jambi, Drs. H. Fachrori Umar, MHum (Kanan), dan Waka PTA Jambi, Drs. H. M. Yamin Awie, SH, MH (Paling Kanan)

Jambi | www.pta-jambi.go.id

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum memberikan pembinaan untuk warga Peradilan Agama di wilayah PTA Jambi, Senin (5/3/2013). Dalam pertemuan yang digelar di Aula Serba Guna Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini, Ahmad Kamil menjelaskan banyak hal kepada warga PTA Jambi. Selain Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, Wakil Ketua PTA Jambi, Drs. H. M. Yamin Awie, SH., MH, Pansek PTA Jambi, Drs. H. Pahri Hamidi, SH, pembinaan ini juga dihadiri oleh semua Hakim Tinggi, pejabat struktural dan fungsional PTA Jambi, Ketua, Waka dan Pansek se-wilayah PTA Jambi.

Ahmad Kamil menekankan perjuangan demi terwujudnya lembaga peradilan agama yang agung bagi seluruh keluarga besar warga peradilan.

Ia juga mengingatkan kepada semua warga peradilan se-wilayah PTA Jambi untuk mengingat pesan positif yang pernah disampaikan oleh KH Ahmad Dahlan. "Tanyakan kepada diri anda, apa yang telah anda berikan kepada lembaga. Jangan anda tanyakan apa yang telah lembaga berikan kepada anda," ujar Ahmad Kamil.

Menurut Ahmad Kamil, peradilan agama adalah bagian dari lembaga yang bergerak dan berjuang

tiada henti untuk mengabdikan. Peradilan agama di Indonesia diharapkan oleh konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan untuk tampil sebagai penegak keadilan di bidang hukum perdata bagi umat islam dan bidang ekonomi syariah bagi seluruh umat berdasarkan hukum yang bermoral dan berkeadilan Tuhan.

"Kalau demikian halnya, maka tergambar oleh kita bahwa lembaga peradilan agama memiliki ideologi, memiliki jiwa, memiliki raga, memiliki cita-cita dan tujuan hidup. Berangkat dari kerangka berpikir inilah SDM aparatur peradilan agama meletakkan dasar niat dalam perjuangan menuju terwujudnya lembaga peradilan agama yang agung," tegasnya.

Lembaga peradilan, sambung Waka MA RI ini, sangat banyak berjasa kepada warga peradilan yang telah berjuang bersusah payah melahirkan dan membesarkan SDM aparatur peradilan agama yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Jika lembaga peradilan agama tidak ada dan tidak pernah diperjuangkan oleh pendahulu pejuang kita, maka kita tidak akan pernah ada disini, di gedung Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini," ujarnya. Tidak hanya itu saja, menurut Ahmad Kamil, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dalam lingkungan lembaga peradilan agama

<< AGENDA PTA JAMBI >>

ibarat kapal besar yang sedang berlayar ditengah gelombang lautan luas yang tidak bertepi, yang melayani dan menyelamatkan penumpang menuju satu garis tujuan mulia sebagai peradilan agama yang agung.

Agungnya lembaga peradilan, imbuhnya, sejatinya terletak pada agungnya jiwa dan perilaku raga SDM aparatur warga peradilan agama yang teguh memegang prinsip garis perjuangan Islam dalam berbakti melayani masyarakat pencari keadilan.

“Indikatornya adalah masyarakat yang merasakan manfaat atas kehadiran lembaga peradilan agama di tengah masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Megahnya sebuah kantor, sejahteranya warga aparatur peradilan, hanyalah sebagian kecil saja dari euphoria keagungan semua yang sering menipu,” sebutnya.

Dia menjelaskan, sesungguhnya SDM aparatur



peradilan lah yang menjadi penentu agung dan rendahnya lembaga peradilan agama di Indonesia, SDM aparatur peradilanlah yang menjadi penentu mulia dan hinanya lembaga perdilan di Indonesia. “Tidak sedikit gedung-gedung perkantoran pemerintah yang megah, gaji pegawainya tinggi, tetapi oleh masyarakat didemo dan dilempari telur busuk, adalah bukan karena kesalahan gedungnya, tetapi karena ulah oknum aparatur pegawai yang rendah lagi hina,” tukasnya.

Dalam pembinaan ini, sejumlah Ketua PA di Wilayah PTA Jambi juga diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan berdialog langsung dengan pria yang telah tujuh tahun menjadi salah satu pimpinan di MA RI ini.

Baru Kali ini Diundang Hadir DI HUT PTA

Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial, Dr. Ahmad Kamil, SH., M.Hum mengaku baru pertama kali menghadiri puncak perayaan hari ulang tahun PTA atau pun PA selama dirinya menjabat se-

bagai salah satu pimpinan Mahkamah Agung RI. vDia mengatakan, jumlah Pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia, sampai saat ini berjumlah sebanyak 29 Pengadilan Tinggi Agama dan 341 Pengadilan Agama, baru kali ini dirinya diundang untuk menghadiri acara ulang tahun.

“Artinya setahu saya selain PTA Jambi pernah ada PTA Bandar Lampung dan MS Aceh yang menyelenggarakan HUT nya, namun saya pertama kali diundang di perayaan HUT PTA Jambi yang ke-20 ini, bertepatan dengan tanggal 06 Februari, 2013” sebutnya di acara puncak Peringatan HUT PTA Jambi, Minggu malam (03/03/2013).

Pria yang mulai bertugas di lingkungan peradilan agama pada tahun 1965 ini, juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada PTA Jambi, baik pimpinan maupun keluarga besar PTA Jambi secara keseluruhan hingga semua PA yang ada di di wilayah PTA Jambi.



Momen ulang tahun, kata dia, sesungguhnya merupakan momen yang mendokumentasikan data empirik selama perjalanan dan mengabarkan berbagai hal suka dan duka yang telah dialami selama ini di masa lampau untuk diambil dan dijadikan pelajaran membangun institusi peradilan yang lebih baik.

“PTA Jambi, sebagai bagian dari personifikasi lembaga peradilan agama, sesungguhnya memiliki jiwa, memiliki raga, memiliki cita-cita memiliki prinsip dan garis perjuangan, serta memiliki tujuan hidup, agar keberadaannya bermanfaat bagi warga peradilan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan alam sekitarnya,” ujarnya.

“Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada PTA Jambi yang ke-20,” tukasnya.

Menariknya, 6 Februari bukan saja merupakan hari ulang tahunnya Pengadilan Tinggi Agama

Jambi, melainkan juga bertepatan pula dengan hari ulang tahun orang nomor satu di PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, yang lahir pada tanggal 06 Februari 1947 di Sakatiga.

Pada sambutannya di puncak HUT, Waka MA RI, juga memberikan apresiasi kepada seluruh warga peradilan agama di wilayah ini. Pasalnya, belum ada satupun laporan negatif yang masuk ke pimpinan MA hingga saat ini.

“Yang paling pokok, tidak ada laporan negatif dari wilayah PTA Jambi, itu patut kita banggakan,” jelasnya.

Waka MA Bacakan Puisi Karya Siswa Jambi

Waka MA Bidang Non Yudisial pada malam puncak peringatan HUT PTA Jambi, juga membacakan puisi dihadapan wagub, dan seluruh tamu undangan yang hadir saat itu. Puisi tersebut ternyata sangat berkesan bagi pimpinan MA ini.

Ditelisik, ternyata puisi ini merupakan hasil karya dari salah satu siswa Jambi dituliskan pada 25 Agustus 2010, yang diberikan kepada Waka MA RI Bidang Non Yudisial ini saat meresmikan kantin kejujuran beberapa waktu yang lalu di Kota Jambi.

“Puisi sangat berkesan bagi saya, saya menerimanya dari salah satu siswa di Kota Jambi yang memberikan kado kepada saya saat meresmikan kantin kejujuran bersama pihak Kejagung beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.

Puisi yang berjudul “Sepotong doa yang hilang” ini dibacakan secara utuh oleh Waka MA bidang non yudisial ini.

Sepotong Doa Yang Hilang

*Di tanah tumpah darah ini
Kejujuran masih dalam catatan lisan
Hingga silang sengketa, perdebatan, pertikaian
Masih terus saja tumbuh
Karena kita masih senang saling tuduh*

*Di tanah tumpah darah ini
Keadilan masih terus diperbincangkan
Hingga persoalan terus saja bermunculan
Karena kita masih senang saling menghakimi*

*Tuhan, Ajari kami jujur dalam memahami ridho
yang kau beri
Agar kami bisa saling mengerti walau kami ber-
beda negeri*

*Ajari kami jujur dalam memaknai amanah yang
kau limpahkan*

*Agar kami bisa saling menyapa walau kami ber-
beda agama*

*Ajari kami jujur dalam mensyukuri kedudukan
yang kau turunkan*

*Agar kami bisa bersatu padu walau kami berbeda
suku*

*Tuhan, jangan biarkan kejujuran hilang
Di tengah-tengah berbagai persidangan
Jangan biarkan kejujuran terkikis
Di tengah-tengah diskusi kebangsaan
Jangan biarkan kejujuran terpelanting
Di tengah-tengah konflik kepentingan
Jangan biarkan kejujuran terkulai lemah
Dalam khutbah di tengah-tengah jamaah*

*Tuhan, tumbuhkan kejujuran itu dalam tubuh
kami*

Benamkan keadilan itu dalam sikap kami

Terakhir, puisi ini diberikan langsung oleh Waka MA RI kepada ketua PA termuda di Wilayah PTA Jambi, Drs. Ana Alaili, ketua PA Sungaipenuh.

“Saya titipkan puisi ini kepada Ketua Termuda, dan berikan kepada yang lain,” tegasnya.

Waka MA dan Wagub Jambi Terima Tumpeng Tidak hanya itu saja, Waka MA RI Bidang Non Yudisial, Dr. Ahmad Kamil, SH., M.Hum, dan Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Fahrori Umar, SH., M.Hum, yang juga merupakan mantan Hakim Tinggi ini, menerima potongan tumpeng dari Ketua PTA Jambi, Drs, H, Muzani Zahri, SH. MH. Usai menerima tumpeng tersebut waka MA, dan Wakil gubernur Jambi terlihat menyantap potongan tumpeng HUT PTA Jambi yang ke-20 tersebut.

Sejarah Singkat PTA Jambi

Sementara itu, Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, dalam sambutannya menjelaskan secara singkat sejarah PTA Jambi. Dia menerangkan, bahwa berdirinya PTA Jambi berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 1992 dan mewilayahi 6 Pengadilan Agama, yaitu PA Jambi, PA Muara Bulian, PA Kuala Tungkal, PA Muara Bungo, PA Bangko dan PA Sungaipenuh.

Penyerahan wilayah hukum, kata pria kelahiran Sakatiga ini, dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 1993 dari PTA Padang ke PTA Jambi. Lantas

<< AGENDA PTA JAMBI >>

siapa pelaku sejarahnya? Ketua PTA Jambi menyebutkan, dua pelaku sejarah itu masing-masing adalah Drs. H. Mahfud Arhasy (almarhum) selaku Ketua PTA Padang dengan Drs. H. Abdul Rozak, SH, sebagai Ketua PTA Jambi yang pertama. Ketika itu, sebut Ketua PTA Jambi, kantor pertama adalah di jalan

Sumantri Brojonogero dengan menyewa sebuah toko kecil dengan jumlah pegawai sebanyak 7 orang termasuk Ketua PTA Jambi.

Drs. H. Abdul Rozak, SH yang merupakan Ketua PTA Jambi pertama di bantu oleh Pansek PTA Jambi pertama, Drs. H. Sudirman Cik Ani, SH., MH yang saat ini menjabat sebagai salah satu hakim tinggi di PTA Medan, kemudian H Yahya Kadir, BA selaku bendaharawan rutin (pensiunan), Husin

Ali bag i a n U m u m (p e n - s i u n a n), H a r - t a t i , S H (p a n i t e r a p e n g a n t i P T A J a m b i) ,

Said Helmi (Panmud Permohonan PA Jambi), dan M Saman sekarang Panmud Hukum PA Sengeti. Ditambahkan Ketua PTA Jambi, pada tahun 1999 lahir UU nomor 1954 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Muaro Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Muara Sabak, maka dengan berdasarkan keputusan Presiden nomor 179 tanggal 22 Desember 2000, maka berdiri Pengadilan Agama muara Sabak dan Pengadilan Agama Sarolangun. Selanjutnya dua tahun setelah itu berdiri pula Pengadilan Agama Sengeti dan Pengadilan Agama Muara Tebo.

Masa 20 tahun, sebutnya, merupakan perjalanan yang panjang. Kalau ibarat menanam pohon, pohon yang telah berumur 20 tahun tentunya sudah berbuah dan dalam masa panen yang besar.

“Kalau ibarat kita berumur 20 tahun, bisa kita bayangkan waktu itu. Kita memiliki badan yang kuat, bentuk rupa wajah yang memikat, dan semua orang yang melihat akan terpikat. Kalau dalam masa 20 tahun itu kita melakukan pengabdian yang tulus dan ikhlas, maka kami yakin kita telah memetik

hasil yang cukup. Mungkin telah banyak cerita dan pengalaman yang kita lalui. Masa demi masa telah kita lewati. Maka untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rentan waktu 20 tahun tersebut telah banyak yang berubah. Telah banyak yang pergi dan datang, yang menjadi tugas pokok dan fungsi telah dapat berjalan dengan baik, seperti apa yang kita lihat saat ini,” ucap Ketua PTA Jambi, disambut tepuk tangan hadirin.



K e d e p a n , s e - b u t n y a , m a r i l a h k i t a s a m a s a m a m e n - d u k u n g u s a h a

yang telah dibangun dan kepercayaan yang ada ini untuk lebih baik. “Kita patut bersyukur telah banyak perubahan yang kita nikmati, dari perubahan itu telah banyak kesempatan dan hasil yang kita peroleh,” tukasnya.

Perayaan HUT PTA Jambi, Dimeriahkan PORTAS

Pada peringatan HUT PTA Jambi yang ke -20, dimeriahkan dengan Pekan Olahraga Terbatas (Portas). Portas diselenggarakan dari tanggal 01-03 Maret 2013. Sebanyak 5 cabang olahraga dipertandingkan pada Portas 2013 ini, masing-masing adalah tenis lapangan, tenis meja, futsal, catur dan voli.

Setiap Pengadilan Agama di wilayah PTA Jambi wajib mengirimkan kontingen untuk mengikuti

semua cabang olahraga.

Keluar sebagai juara umum pada perhelatan akbar ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang menggondol 3 juara pertama, masing-masing Tenis lapangan, Futsal dan Catur. Menyusul PA Bangko yang juga mendulang prestasi di hajatan ini dengan menggondol juara 1 voli dan juara 2 tenis lapangan. Sedangkan di urutan ketiga secara keseluruhan adalah PA Muara

Bungo yang berhasil menjadi juara 1 di cabang Tenis meja dan juara 3 di cabang Tenis Lapangan.

Ketua Panitia pelaksana, Husnul Arifin, S.Ag, SH, secara langsung menandatangani dan melaporkan hasil pertandingan pada acara puncak peringatan HUT PTA Jambi yang dihadiri oleh Waka MA RI Bidang Non Yudisial ini. Para pemenang pun secara langsung diberikan tropi yang telah disiapkan oleh panitia pelaksana.

Jurdilaga PTA Jambi, Supporting Unit HUT PTA

Jambi

Jurnal Peradilan Agama (Jurdilaga) PTA Jambi, yang merupakan organisasi penulis pertama di Badan Peradilan Agama di Indonesia, menjadi supporting unit HUT PTA Jambi. kali ini, organisasi yang dilahirkan pada Rakerda PTA Jambi 22 November 2012 lalu, menampilkan slide show sejarah PTA Jambi.

Banyak dokumen-dokumen yang ditayangkan, membuat suasana malam puncak PTA Jambi

menjadi tambah khidmat. Poto-poto sejarah, yang ditampilkan tak pelak membuat hadirin terkesima oleh tampilan slide show yang ditayangkan di panggung utama.

Selain dokumen poto-poto kenangan tersebut, sejarah singkat yang ditulis oleh tim redaksi Jurdilaga PTA Jambi yang terdiri dari pemimpin Redaksi Idris Latif, SH., MH, dibantu dua redaktur masing-masing Noprizal dan Abdul Rachman, menambah pemahaman dan pengetahuan warga peradilan agama di wilayah PTA Jambi tentang sejarah PTA Jambi. Selain itu, juga ditampilkan sejumlah prestasi yang pernah didapatkan oleh PTA Jambi, serta penayangan pimpinan-pimpinan PA se-wilayah PTA Jambi.

(Noprizal-Abdul Rachman/Jurdilaga PTA Jambi)



Wakil Ketua PTA Jambi, saat menerima Piala Bergilir Juara Umum dari Wakil Ketua MA Bid. Non Yudisial.

<< AGENDA PTA JAMBI >>

Pelantikan Hakim Tinggi di PTA Jambi Berlangsung Sukses



KPTA Jambi melantik 7 Hakim Tinggi PTA Jambi

Jambi | pta-jambi.go.id

Sebanyak 7 hakim tinggi agama dilantik menjadi Hakim Tinggi PTA Jambi, Kamis (29/08/2013) di Aula PTA Jambi.

Ke tujuh Hakim Tinggi tersebut masing-masing adalah Drs. E. Mastur Turmudzi, SH, Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, MH, Drs. Baidhowi HB, SH, Drs Djasril Darwis, Drs. M. Nasir Mas, SH., MH, DR. H. Mulyadi. Z, SH., M.Ag, dan Drs. H. Ismail Aly, SH.

KPTA Jambi, dalam sambutannya mengatakan, pindah tugas, mutasi promosi jabatan adalah suatu perjalanan tugas bagi aparaturnya.

Apalagi saat ini imbuhnya, hal tersebut sudah merupakan kebutuhan organisasi Mahkamah Agung RI secara umum.

Khusus peradilan agama tegasnya, selama berada dalam satu atap telah memulai perjalanan mutasi bagi hakim dan pimpinan pengadilan agama antar provinsi di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, orang nomor satu di PTA Jambi ini menekankan kepada hakim tinggi yang baru saja dia lantik untuk benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut dia, dalam perjalanan ke depan hakim tinggi yang merupakan hakim tinggi pengawas daerah akan terus bekerja melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Agama se wilayah PTA Jambi.

"Kiranya hakim tinggi dapat memberikan ilmu dan keunggulannya di tempat kerjanya yang lama

untuk diterapkan dan dikembangkan di PTA Jambi dan untuk PA Se wilayah PTA Jambi," ujarnya. Akhirnya KPTA Jambi mengucapkan selamat bergabung dan selamat bertugas di PTA Jambi. "Selamat bergabung dan selamat bertugas, kita masih punya tugas untuk menjadikan pengadilan yang unggul dan modern yang bermuara kepada Pengadilan Yang Agung.

Dalam acara ini, turut hadir WKPTA Bengkulu, Hakim Tinggi PTA Jambi, Pejabat struktural dan fungsional PTA Jambi, Ketua dan Pansek PA Sewilayah PTA Jambi. (Noprizal/Jurdilaga PTA Jambi)



WKPTA Bengkulu, Pansek PTA Jambi Drs. H. Pahri Hamidi SH, Hakim Tinggi PTA Jambi saat mengikuti prosesi pelantikan



Penyematan PIN Hakim Tinggi

KPTA dan Pansek PTA Jambi Ikuti Rakor



KPTA Jambi Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH (kiri) bersama Pansek PTA Jambi, Drs. H. Pahri Hamidi, SH

Jambi | pta-jambi.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, bersama panitera Sekretaris PTA Jambi Drs. H. Pahri Hamidi, SH, mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Persiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran 2014 2-4 September 2013, Hotel Seruni, Bogor.

Kegiatan tersebut langsung di buka oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum.

Dikatakan Pansek PTA Jambi, peserta yang mengikuti acara ini sebanyak 421 orang. yang terdiri dari para Eselon I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Pansek Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di empat lingkungan peradilan.

Menurut Pansek PTA Jambi, Waka MA Bidang Non Yudisial, Ahmad Kamil, menyampaikan banyak hal acara pembukaan. Dirinya berharap agar tidak terjadi lagi kesalah pahaman atau miss komunikasi antara pimpinan pengadilan dengan Pansek Pengadilan dalam hal Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran karena Pimpinan Pengadilan hanya berhak mengetahui apa yang

di Rencanakan dan Pelaksanaan Anggaran oleh Panseknya.

“Maka dalam rangka mempertahankan WTP dari BPK RI kita bersama, berkomitmen dalam menyamakan persepsi agar tidak ada lagi temuan - temuan Pembangunan Gedung bermasalah dengan Persiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran dengan baik,” ujarnya.

Acara ini di hadiri para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung RI dan para peserta Rakor ini menerima ucapan selamat dari Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Ahmad Kamil.

Para Peserta akan menerima arahan dan materi dari Ketua MA, Ketua Kamar Pembinaan, Sekretaris Dan Kepala BUA, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Perlengkapan serta para Nara Sumber dari Dirjen Anggaran Kemneterian Keuangan dan Tim LKPP. (Jurdilaga PTA Jambi)

WKPTA Jambi jadi Nara Sumber
Bimtek Kompetensi Hakim PA
Angkatan IV 2013



Drs. H. M. Yamin Awie, SH, MH.

Jambi | pta-jambi.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Drs. H. M. Yamin Awie, SH., MH, 27-30 Agustus 2013, tampil sebagai nara sumber di Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim Peradilan Agama (Angkatan IV) tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Pada Bimtek yang digelar di Hotel Grand Zuri BSD Teras Kota Tangerang ini, Wakil Ketua PTA Jambi ini tampil memberikan materi tentang teknis pembuatan putusan. Kemudian bersama nara sumber yang lainnya seperti Drs. H. Hasan Bisri, SH., M.Hum, dan Dr. H. A. Mukti Arto, SH., M.Hum, pria yang dikenal melek IT ini juga tampil memberikan materi praktek bedah berkas. Selain itu pada presentasi dan evaluasi hasil bedah berkas, Mantan WKPTA Padang ini juga menjadi nara sumber bersama nara sumber lainnya.

Hingga pada materi praktek pembuatan putusan dan presentasi dan evaluasi pembuatan putusan, WKPTA Jambi ini juga tampil menjadi nara sumber.

Kepada Jurdilaga PTA Jambi, dirinya mengucapkan terimakasih kepada Dirjen Badilag yang telah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk menjadi nara sumber pada Bimtek Kompetensi Hakim PA tahun 2013.

“Semoga apa saja yang telah diberikan kepada peserta pada saat Bimtek bisa bermanfaat,” tukasnya. (Jurdilaga PTA Jambi)

<< AGENDA PTA JAMBI >>

IKPA PTA Jambi Gelar Seminar



Nara Sumber (kiri), Penasehat IKPA PTA Jambi, Dra. Hj. Aslihah Muzani, SH

Jambi | pta-jambi.go.id

Ikatan Keluarga besar Peradilan Agama (IKPA) Pengadilan Tinggi Agama Jambi kembali menggelar seminar.

Kali ini, seminar dilaksanakan di Aula PTA Jambi, Kamis (29/8/2013). Diikuti oleh anggota IKPA di wilayah PTA Jambi.

Dalam seminar ini, Ketua IKPA, Nyonya Hj Atik Robiyati Yamien Awie, mengatakan bahwa seminar ini sengaja dilaksanakan demi untuk menambah wawasan anggota IKPA itu sendiri.

“Acara ini sangat penting, menambahkan wawasan, ibu-ibu agar ke depan lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatannya dan lingkungan,” ujarnya.

Seminar yang dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB ini, mengambil tema kesehatan reproduksi, dengan nara sumber Hj Nelly Herwani, S.Pd.I. dosen salah satu akademi kebidanan di Kota Jambi.

Dalam pemaparannya, nara sumber menjelaskan, defenisi sehat. Menurut dia, keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh harus menjadi perhatian khusus.

Jadi kata dia, sehat berarti bukan sekedar tidak ada penyakit ataupun kecacatan, tetapi juga kondisi psikis dan sosial yang mendukung perempuan untuk melalui proses reproduksi

baik perempuan maupun laki-laki.

“Laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan standar kesehatan yang setinggi-tingginya, karena kesehatan merupakan hak asasi manusia yang telah diakui dunia internasional,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan beberapa hal tentang kesehatan reproduksi. Dikatakannya, reproduksi artinya membuat atau menghasilkan.

Jadi istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Sedangkan yang disebut organ reproduksi adalah alat tubuh yang berfungsi untuk reproduksi manusia.

vUsai penyampaian materi, dirinya juga membuka sesi tanya jawab untuk semua peserta.

Pada kegiatan ini, selain diikuti oleh anggota IKPA, juga dihadiri oleh puluhan mahasiswa Akbid di Kota Jambi. (Noprizal/Jurdilaga PTA Jambi)

Jurdilaga PTA Jambi Tutup Tahun 2012 dengan Manis



74	Siadpa Plus PA Muara Bulian Direkonstruksi (26/12)	62
75	Ketua PTA Jambi Puji PA Muara Bulian (26/12)	99
76	Kunjungan KPTA Jambi ke PA Muara Bulian (26/12)	60
77	Pembentukan Pengurus Baru Dharmayukti Karini Cabang Bungo (26/12)	99
78	Muscab Dharmayukti Karini Cabang Bungo (26/12)	153
79	Pansek PTA Jambi Lakukan Pengawasan Pembangunan Gedung PA Muara Bungo (26/12)	510
80	Di PA Bangko, Senam pun jadi Ajang Silaturahmi (26/12)	72
81	Pemanfaatan Mesin Antrian di PA Sengeti (26/12)	93
82	Hakim PA Bangko jadi Pembicara di P2TP2A (20/12)	319
83	Pegawai PA Buntok Ikuti Training Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (20/12)	118
84	Wakil Ketua PA Bangko Ikut Menyuksesan Lomba Asmaul Husna (20/12)	168
85	Jelang Akhir Tahun, Ketua PTA Jambi Lakukan Pengawasan ke PA Muara Bulian (20/12)	140
86	Sidang Keliling PA Tulang Bawang Menjelang Akhir Tahun (20/12)	93

Penghujung 2012, Berita dari Wilayah PTA Jambi semakin mewarnai Menu Seputar Peradilan Agama Badilag.net

Jambi | www.pta-jambi.go.id

Luar biasa, mungkin kata itu patut diberikan kepada para kru Jurnalis Peradilan Agama (Jurdilaga) PTA Jambi. Betapa tidak, hanya dalam kurun waktu kurang satu bulan efektif, Jurdilaga PTA Jambi yang digawangi kru Jurdilaga di setiap PA di wilayah PTA Jambi telah melahirkan sebanyak 81 berita. Ke 81 berita tersebut, dirilis dari tanggal 26 November hingga tanggal 28 Desember 2012. Jurdilaga yang dideklarasikan pada Rapat Kerja Daerah PTA Jambi 22 November 2012 lalu itu, kini terus berpacu meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberitaan, sehingga tidak ada lagi informasi kegiatan di wilayah PTA Jambi yang luput dari pemberitaan.

Pemimpin Redaksi, Jurdilaga PTA Jambi, Idris Latif, SH, MH kepada Jurdilaga PTA Jambi mengatakan bahwa capaian ini adalah hasil dari motivasi yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Pansek PTA Jambi serta bukti dari kerja keras kru Jurdilaga PTA Jambi yang ada di masing-masing PA di wilayah PTA Jambi.

“Ini hasil kerja keras, bayangkan saja, tidak sampai penuh 30 hari kerja, kru Jurdilaga di wilayah PTA Jambi mampu merilis sebanyak 81 berita di website resmi PTA Jambi dan tentunya juga dipublish di badilag.net, buktinya kita (Jurdilaga PTA Jambi.red) selalu mendominasi pemberitaan akhir-akhir ini,” ungkap Pemimpin Redaksi Jurdilaga PTA Jambi ini, Rabu (02/01/13).

Dirinya juga menyebutkan bahwa capaian ini tidak terlepas dari dukungan penuh unsur pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

“Pak Ketua PTA, Pak Waka, Pak Pansek, Pak Wasek, dan saya sendiri selaku Wapan sangat mendukung Jurdilaga agar mampu mengharumkan nama baik PTA Jambi, kami juga setiap turun ke daerah selalu mensosialisasikan Jurdilaga dan Siadpa.

Lihat saja kemarin, salah satu buktinya saat Pak KPTA ke PA Muara Sabak, beliau menitipkan pesan agar para pegawai bisa bertukar informasi dengan teman-teman di PA lainnya di jejaring sosial, seperti grup facebook crew Jurdilaga PTA Jambi dan Coffee Break Timda Siadpa Plus PTA Jambi,” tegas Idris Latif.

Wakil Panitera PTA Jambi ini juga merinci jumlah berita dari masing-masing PA yang dirilis di website resmi PTA Jambi sejak tanggal 26 November hingga 28 Desember 2012 lalu ini. Dikatakan mantan Pansek PA kelas IA Jambi ini, urutan pertama diraih oleh PA Bangko dengan jumlah 27 berita, menyusul di urutan kedua PA Sengeti 13 berita, di urutan ke tiga bertengger PA Muara Tebo dan PA Muara Bulian yang sama-sama menempatkan 10 berita di daftar rilis website resmi PTA Jambi.

Sementara itu menyusul PA Muara Bungo, dengan 9 berita, PA Sungaipenuh dengan 4 berita, PA Muara Sabak 4 berita, PA Kuala Tungkal 3 berita dan sarolangun dengan 1 berita.

“Itulah daftar rilis berita di website PTA Jambi, sejak 26 November hingga 28 Desember 2012, ini adalah langkah awal, semoga di tahun 2013 lebih mantap lagi,” tukasnya. (Nop-Rachman/Jurdilaga PTA Jambi)

<< AGENDA PTA JAMBI >>

Jurdilaga PTA Jambi, Pertama di Peradilan Agama Se-Indonesia

Jambi | www.pta-jambi.go.id

Bersamaan dengan perhelatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 21-23 November 2012, di Hotel Wiltop Kota Jambi, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jambi memutuskan pendirian Jurnal Peradilan Agama (Jurdilaga).

PTA Jambi sendiri menaruh harapan besar terhadap Jurdilaga ini. Salah satu harapan PTA Jambi terhadap Jurdilaga adalah sebagai garda terdepan dalam

bidang penyedia informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh PTA Jambi serta semua Pengadilan Agama (PA) se-PTA Jambi.

Wakil Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muhammad Yamien Awie, SH., MH, ditemui usai pembukaan Rakerda, Rabu (21/11) menyebutkan bahwa, semua informasi kegiatan akan bisa di up date setiap saat dan mudah dipahami oleh warga peradilan.

PTA Jambi nantinya juga akan menambahkan menu pada Website Resmi PTA Jambi khusus untuk kegiatan seputar peradilan agama. "Seperti yang ada di badilag.net, kita juga akan buat demikian, jadi semua warga peradilan di wilayah PTA Jambi, bisa mengakses dan mendapatkan informasi dengan cepat terkait kegiatan, bisa jadi untuk tukar informasi, di badilag.net juga tetap akan dikirimkan oleh masing-masing laskar Jurdilaga setiap PA," tegasnya.

Disebutkan pria berkacamata ini, di setiap PA nantinya akan ada laskar Jurdilaga. Dan di koordinir oleh laskar Jurdilaga yang ada di PTA Jambi. "Kita akan buat formatnya, yang pasti Jurdilaga ini lahir di Jambi, ditengah tingginya kebutuhan kita akan pemberitaan sendiri, makanya kita buat laskar Jurdilaga, agar di PTA Jambi memiliki wadah untuk para penulis, baik itu penulisan berita, maupun penulisan dalam bentuk yang lain," tukasnya.

Ke depan sebut pria yang dikenal sebagai pegiat TI ini, PTA Jambi juga akan menggelar pelatihan Journalistik untuk para laskar di setiap PA di PTA Jambi. "Akan kita laksanakan pelatihan jurnalistik, dan juga pelatihan-pelatihan non formal seperti lewat jejaring social dan lain sebagainya,



yang pastinya ini adalah bentuk dari kerja keras," ujarnya.

Adapun menurut salah satu pencetus Jurdilaga, Noprizal, SHI latar belakang berdirinya komunitas ini di dasari keinginan untuk mengakomodir minat warga peradilan agama di wilayah PTA Jambi dalam dunia tulis menulis.



Kiri : Hermansyah, Tim Redaksi Badilag.net, Kanan : Drs. H. M. Yamin Awie, SH, MH Wakil Ketua PTA Jambi

"Animo teman-teman di PTA Jambi cukup besar, ini dibuktikan dengan semakin rutinnya teman-teman mempublish berita di web masing-masing, mudah-mudahan komunitas ini dapat menjadi wadah untuk sama-sama belajar dan saling berbagi ilmu" ungkapnya.

Sementara Hermansyah, Tim Redaksi Badilag.net saat dikonfirmasi Jurdilaga PTA Jambi, menyambut baik lahirnya Jurdilaga PTA Jambi.

"Saya Ucapkan Selamat kepada Jurdilaga PTA Jambi, Sebagai Pioner berdirinya Komunitas Jurnalis Peradilan Agama, setahu saya ini yang pertama, semoga Menjadi Inspirasi buat PTA lainnya." (Jurdilaga PTA Jambi)

Pansek PTA Jambi Terima Tim Supervisi BUA MA



Tim Supervisi BUA MA-RI foto bersama Pansek PTA Jambi Drs. H. Pahri Hamidi, SH dan Wasek PTA Jambi Meiradinata, S.Ag

Jambi | pta-jambi.go.id

Panitera Sekretaris PTA Jambi, Drs. H. Pahri Hamidi, SH, menerima tim Supervisi pembangunan gedung, renovasi dan rehabilitasi gedung dan kantor BUA Mahkamah Agung RI. Kamis (29/8/2013), di ruang kerjanya.

Tim dari Badan Urusan Administrasi MA RI terdiri dari H. Ade Usman, SH. MH (Kasubbag. Standarisasi Pengadaan Barang I Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi MA-RI), Purwanto, SH, (Staf bagian tata laksana pengadaan barang I, Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi MA-RI), Yulis Trisyawati (Staf bagian tata laksana pengadaan barang I, Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi MA-RI).

Didampingi Wakil Sekretaris PTA Jambi, Meiradinata, S.Ag. tim yang melakukan supervisi ke PA Bangko, PA Muara Tebo dan PA Muara Tebo ini, diajak berbincang-bincang oleh Pansek PTA Jambi tentang supervisi yang dilaksanakannya selama beberapa hari di beberapa PA di wilayah PTA Jambi.

Dikatakan Pansek PTA Jambi, bahwa Supervisi ini merupakan kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai evaluasi untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pembangunan gedung di beberapa PA tersebut.

Usai tatap muka dengan Pansek PTA Jambi. rombongan langsung bertolak menuju Jakarta. (Jurdlaga PTA Jambi)



PTA Jambi Gelar Tausyiah dan Tadarus Tiap Hari



PTA JAMBI – Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama bulan suci ramadhan 1434 H ini akan menggelar tausyiah dan tadarus alquran setiap hari ini. Hal itu dipastikan langsung oleh Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, dihadapan Hakim Tinggi, Pansek, pejabat struktural, serta staf di Aula Serba Guna PTA Jambi, Jumat (05/07/2013). Menurut orang nomor satu di PTA Jambi, tausyiah dan tadarusan ini dilakukan di musholla PTA Jambi seperti biasanya. Hanya saja yang membedakannya adalah intensitas pelaksanaannya.

“Kita akan lakukan setiap harinya,” ungkap KPTA Jambi didampingi Pansek PTA Jambi, Drs. H. Pahri Hamidi, SH. Untuk tausyiah lanjutnya, akan

disampaikan secara bergiliran oleh hakim tinggi di PTA Jambi. Tidak tanggung-tanggung, setiap harinya, tausyiah akan disampaikan oleh dua hakim tinggi secara bergantian. Selain itu, dirinya juga secara langsung meminta agar pengurus Musholla PTA Jambi untuk membuatkan jadual penceramah tersebut. “Pengurus Mushollah untuk segera membuat jadual penceramahnya, dan satu hari ini disampaikan oleh dua hakim tinggi, kalau 7 menit perorang, berarti ceramahnya 14 menit,” pungkasnya. (Nop/Jurdilaga PTA Jambi)

PTA Jambi Rilis Peringkat Usulan Remunerasi September 2013

No	Nama Satker	Ket
1	PA Sungaipenuh	
2	PA Muara Tebo	
3	PA Kuala Tungkal	
4	PA Bangko	
5	PA Muara Bungo	
6	PA Sarolangun	
7	PA Muara Bulian	
8	PA Sengeti	
9	PA Jambi	Terlambat
10	PA Muara Sabak	Terlambat

Jambi | pta-jambi.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Jambi kembali merilis peringkat pengiriman usulan permintaan remunerasi Pengadilan Agama dibawahnya.

Untuk September 2013, Pengadilan Agama Sungaipenuh yang merupakan Pengadilan Agama yang memiliki waktu tempuh mencapai 12 jam dari Kota Jambi ini berhasil berada di posisi puncak.

Panitera Sekretaris PTA Jambi, Drs. H. Pahri Hamidi, SH, kepada Jurdilaga PTA Jambi mengatakan, bahwa untuk pengiriman usulan permintaan remunerasi bulan September 2013, PA Sungaipenuh berhasil menjadi Number one. Setelah itu disusul oleh PA Muara Tebo dan PA Kuala Tungkal.

Dia menambahkan, pengumuman peringkat ini bertujuan untuk memacu semua satuan kerja di bawahnya untuk bekerja lebih cepat dan lebih teliti. Hal ini menurutnya, sangat efektif, lantaran muncul motivasi yang luar biasa antar satker di lingkungan PTA Jambi untuk bekerja keras memperhatikan keakuratan dan ketepatan waktu dalam pengiriman usulan permintaan remunerasi ke PTA Jambi.

“Makanya setiap bulannya, PTA Jambi men-

gumumkan peringkat pengiriman usulan permintaan remunerasi di website resmi PTA Jambi untuk diketahui oleh semua Satker,” ujar Pansek PTA Jambi didampingi Kasubbag Keuangan PTA Jambi, Yudhistira Adi Pinto, SE.

“Baik ketepatan waktu maupun keakuratan, sudah sangat bagus, penilaian ini tidak hanya ketepatan waktu, namun kita juga memperhatikan mana yang akurat, dan mana yang tidak. Jadi yang mendapatkan peringkat terbaik itu pengirimannya tepat waktu, sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan akurat,” tukasnya.

Dia menambahkan, semua berkas yang dikirimkan wajib diteliti dan diperiksa oleh Kaur atau Kasubbag Keuangan Satker masing-masing untuk menghindari terjadinya kesalahan. (Nop/Jurdilaga PTA Jambi)

<< AGENDA PTA JAMBI >>

Rakerda PTA Jambi 2012, Sejumlah PA Terima Penghargaan

Kategori	Peringkat		
	1	2	3
Bidang Kepaniteraan			
1 Laporan Perkara Bulanan	PA Muara Bulian	PA Kuala Tungkal	PA Sengati
2 Pengiriman SMS Gateway	PA Muara Bungo	PA Sarolangun	PA Muara Bulian
3 Upload Putusan Ke Direktori Putusan	PA Sarolangun	PA Sengati	PA Jambi
Bidang Kesekretariatan			
1 Pengiriman dan Keakuratan Data Laporan Keuangan Pengadilan Agama	PA Muara Tebo	PA Muara Bulian	PA Bangko
2 Kelengkapan Data Simpeg Online	PA Bangko	PA Muara Bungo	PA Muara Bulian
Bidang Pemanfaatan Media Informasi Peradilan Agama			
1 Keaktifan dalam pembuatan dan pengiriman artikel ke hadilag.net	Noprizal, SHI	Ahmad Khumaidi, SHI	

Grafik penghargaan yang diberikan

Jambi | www.pta-jambi.go.id
 Sejumlah Pengadilan Agama (PA) di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jambi menerima penghargaan dari Ketua PTA Jambi. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PTA Jambi selama tahun 2012.

Ketua PTA Jambi Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH menyebutkan bahwa penghargaan ini kami pandang perlu diberikan untuk PA-PA yang memiliki kinerja yang baik, memiliki wawasan dan prestasi kerja baik di bidang kepaniteraan maupun di bidang kesekretariatan bahkan juga pemanfaatan media informasi di peradilan agama.

“Yang pasti ini mengacu kepada peningkatan pelaksanaan tugas dalam pelayanan publik. Demi terwujudnya formasi peradilan agama,” ujar Muzani Zahri.

KPTA juga mengharapkan agar semua PA di wilayah PTA

Jambi untuk terus berpacu dalam melaksanakan tugas dengan baik

dan benar sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat.

“Kita berharap penghargaan ini bisa menjadi pemicu untuk kerja keras semua aparatur peradilan agama dimasing-masing Satker. Ada beberapa penghargaan yang diberikan, dan itu merupakan bukti PTA Jambi memperhatikan PA dan pegawai yang memiliki dedikasi yang tinggi,” tukasnya. Penghargaan diberikan oleh KPTA Jambi saat penutupan Rakerda. (Jurdilaga PTA Jambi)



Prosesi penyerahan piagam penghargaan kepada Satker yang berprestasi serta Perseorangan yang aktif di Media Informasi



Pegawai PTA Jambi Berfoto Bersama Usai Peringatan HUT RI Ke 68



Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi dan seluruh Warga PTA Jambi Berfoto Bersama Usai Senam Jumat Pagi



Tim Futsal PTA Jambi, Peraih Juara Berturut-turut Kompetisi Futsal Sewilayah PTA Jambi

PA JAMBI :

Acara Penyambutan Bulan Ramadhan di PA Jambi dihadiri KPTA Jambi



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, hadir langsung dalam acara penyambutan bulan suci Ramadhan yang digelar oleh keluarga besar PA Jambi, Jumat (28/06/2013).

Ketua PTA Jambi datang ke PA Jambi bersama Ketua PA Jambi, Drs. H. M. Nasrul K, SH., MH, yang secara langsung menjemput orang nomor satu di PTA Jambi ini di kantornya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari PA Jambi.

Tiba di PA Jambi, KPTA Jambi disambut oleh WKPA Jambi, hakim, pejabat struktural, fungsional, serta staf PA Jambi. Ketua PTA Jambi, langsung dipersilakan memasuki ruangan tamu Ketua PA Jambi.

Selang beberapa menit, pelaksanaan acara penyambutan bulan suci Ramadhan yang dirangkai dengan peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Mushollah Raudhatul Jannah PA Jambi inipun dimulai.

Ketua PA Jambi, Drs. H. M. Nasrul K, SH., MH, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ketua PTA Jambi yang meluangkan waktu secara khusus untuk hadir pada pelaksanaan penyambutan bulan suci Ramadhan di PA Jambi ini.

Padahal kata Ketua PA Jambi ini, Ketua PTA Jambi ini baru saja pulang dari PA Sungaipenuh di wilayah paling barat Provinsi Jambi melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Namun imbuhnya, semangat Ketua PTA Jambi seperti ini patut ditcontoh, dan dijadikan teladan.

Tidak hanya itu saja, Ketua PA Jambi ini secara langsung juga meminta kepada Ketua PTA Jambi untuk menyampaikan tausiyah dan arahan dihadapan keluarga besar PA Jambi ini.

Sementara itu, Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, dalam tausiyahnya menyampaikan banyak hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah Ramadhan. Hanya saja, pada tausiyahnya kali ini, dirinya banyak menjelaskan tentang manfaat gerakan sholat bagi kesehatan.

"Gerakan sholat itu adalah gerakan paling sempurna, gerakan sholat sangat bermanfaat bagi tubuh kita, gerakan-gerakan shalat paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Bahkan dari sudut medis, shalat adalah gudang obat dari berbagai jenis penyakit," ungkap suami Dra. Hj. Asliyah Muzani, SH ini.

Dirinya juga memberikan banyak contoh gerakan sholat tersebut. Ruku misalnya, vRuku' yang sempurna katanya, ditandai tulang belakang yang lurus sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut tak akan tumpah. Posisi kepala lurus dengan tulang belakang

"Manfaat gerakan sholat ini untuk menjaga kesempurnaan posisi serta fungsi tulang belakang (corpus vertebrae) sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. rukuk adalah sarana latihan bagi kemih sehingga gangguan prostate dapat dicegah.



Tangan yang bertumpu di lutut berfungsi untuk merelaksasikan otot-otot bahu hingga ke bawah,” tukasnya. Usai tausyiah, acara diakhiri dengan



doa dan salam-salaman. (Noprizal/Jurdilaga PTA Jambi)

PA SENGETI :

Study Banding Pengadilan Tinggi Jambi Ke Pengadilan Agama Sengeti Dalam Rangka Kemajuan SIADPA



Seusai apel pagi Senin (27/05/2013). Bertempat di ruang lobi PA Sengeti, beberapa hakim beserta Ketua menyambut rombongan dari Pengadilan Tinggi Jambi. Suasana yang begitu hangat mewarnai pertemuan Ketua PT Jambi beserta rombongan dengan Ketua, hakim dan segenap karyawan Pengadilan Agama Sengeti. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi didampingi oleh Ketua PN Sengeti beserta hakim-hakim dan beberapa pegawai PN dan PA Sengeti meramaikan ruang lobi PA sengeti.

Study banding Ketua PT Jambi beserta rombongan ke PA Sengeti menyoroti tiga hal yaitu Web Site, SIADPA dan Meja Informasi. Ketiga hal tersebut adalah bagian yang tidak terlepas dari dunia Teknologi Informasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi di pengadilan yang diimplementasikan dalam pengelolaan Web Site, SIADPA dan Meja Informasi bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada publik dengan menyajikan informasi yang akurat, cepat dan praktis.

Dimulai dari ruang urusan umum, ruang server, meja informasi serta ruang kasir menjadi ruang yang terpilih untuk dikunjungi oleh Ketua PT beserta rombongan dengan dipandu oleh Tim Teknologi Informasi (TI) PA. Sengeti.

Di ruang umum yang menjadi sorotan adalah aplikasi pengelolaan perpustakaan dan aplikasi tata

persuratan, aplikasi ini digunakan dan dikembangkan atas dasar kebijakan Ketua Pengadilan Agama Sengeti, jadi belum semua satker di bawah Mahkamah Agung yang menggunakan aplikasi ini.

Melangkah ke ruang lobi terpampang cantik meja informasi dengan beberapa sarana dan prasarana yang mendukung petugas meja informasi dalam memberikan pelayanan publik. Komputer yang terhubung dengan SIADPA, form pelayanan dan pengaduan publik, banner tentang bagaimana berperkara di Pengadilan Agama, mesin antrian dan TV media yang terhubung dengan server.

Ruang kasir menjadi pilihan terakhir Ketua PT Jambi beserta rombongan. Dalam ruang kasir, Ketua PT melihat cara kerja seorang kasir PA Sengeti dalam mengupdate aplikasi KIPA (Keuangan perkara), jadi setiap lini di kepaniteraan bekerja dalam satu jaringan sistem yakni SIADPA.

Ketua PA. Sengeti menyambut baik kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi beserta rombongan. Semoga apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jambi beserta rombongan tercapai sesuai dengan harapan, dan optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Jambi dapat segera terwujud, demikian harapan Azwar.(Abdurrahman dan Adil/Jurdilaga PA Sengeti/PTA Jambi)

PA MUARA SABAK :

Bekerjasama dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur, PA Muara Sabak Gelar Penyuluhan Hukum



Acara Pembukaan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Tanjabtim, Ketua PA Muara Sabak, KPTA Jambi, Hakim Tinggi PTA Jambi, serta Hakim dan Pansek PA Muara Sabak.

Muara sabak | pa-muarasabak.go.id
Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, Pengadilan Agama Muara Sabak bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengadakan acara penyuluhan hukum untuk jajaran Camat, KUA dan Kepala Desa se Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Acara penyuluhan hukum ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Bapak Drs. H. Muhammad Yamin Awie, SH, MH dan Hakim Tinggi Bapak Drs. Abbas Fauzi, SH yang sekaligus menjadi narasumber dalam acara penyuluhan hukum tersebut.

Acara penyuluhan hukum yang diadakan di Aula Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Bapak H. Ambo Tang, A. Md.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur memberikan apresiasi positif kepada Jajaran Pengadilan Agama Muara Sabak atas kerja samanya mengadakan kegiatan penyuluhan hukum ini, dengan harapan semoga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat terutama menyangkut masalah hukum keluarga

sesuai dengan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama.

Sementara itu Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Drs. H. Barmawi, MH dalam sambutannya menegaskan bahwa, penegakan hukum akan dapat diwujudkan tentunya bilamana tiga pilar utama dapat dibangun, yaitu Pertama, adanya peraturan perundang-undang yang baik. Kedua, Bersihnya penegakan hukum. Ketiga, adanya kesadaran hukum yang tinggi masyarakat.

Di akhir sambutannya ketua Pengadilan Agama Muara Sabak menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya atas dukungan, bantuan moral dan materil yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga acara ini dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Beliau berharap kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kiranya ke depan acara seperti ini terus dapat dilaksanakan. Ucapan yang sama juga disampaikan H. Barmawi kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah memberikan arahan untuk terlaksananya acara tersebut, sekaligus terima kasih yang sama disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Bapak Drs. H. Muhammad

<< REPORTASE PA SEWILAYAH >>

Yamin Awie, SH, MH dan Hakim Tinggi Bapak Drs. Abbas Fauzi, SH yang telah bersedia menjadi narasumber dalam acara penyuluhan hukum ini. Berkaitan dengan kegiatan penyuluhan hukum ini, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, acara kegiatan penyuluhan hukum ini sangat penting dilaksanakan agar masyarakat mempunyai kesadaran dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, terutama berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama.

Hal ini perlu disampaikan karena banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana kedudukan dan kewenangan pengadilan agama selaku salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.



Peserta terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut.

Dalam acara penyuluhan hukum ini, para peserta terlihat sangat antusias mendengarkan paparan para narasumber, bahkan ketika sesi tanya jawab dibuka oleh Moderator Zakaria Ansori, SHI, MH, para peserta banyak bertanya seputar kewenangan Pengadilan Agama dan prosedur berpekerja di Pengadilan Agama.

Semua pertanyaan dari peserta dijawab tuntas dan lugas oleh narasumber, sehingga ketika TIM Jurdilaga Pengadilan Agama Muara Sabak mewawancarai salah seorang peserta, mengatakan bahwa acara penyuluhan hukum ini sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama oleh Kepala KUA dan kepala Desa yang kebanyakan langsung bersentuhan dengan masyarakat tingkat

bawah serta berharap, semoga acara-acara seperti ini dilaksanakan secara berkesinambungan.

Kegiatan penyuluhan hukum ini berakhir pada pukul 13.00 WIB yang dilanjutkan dengan kegiatan bimbingan teknis untuk jajaran Pengadilan Agama Muara Sabak.

Bimtek di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Sabak

Setelah kegiatan penyuluhan hukum untuk jajaran Camat, KUA dan Kepala Desa se Kabupaten Tanjung Jabung Timur selesai, acara dilanjutkan dengan kegiatan bimbingan teknis untuk lingkungan jajaran Pengadilan Agama Muara Sabak.

Acara bimbingan teknis dengan nara sumber Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Bapak Drs. H. Muhammad Yamin Awie, SH, MH dan Hakim Tinggi Drs. Abbas Fauzi, SH diikuti oleh seluruh jajaran aparatur Pengadilan Agama Muara Sabak.



Waka PTA Jambi memberikan penyuluhan didampingi oleh KPA Muara Sabak Bapak Drs. H. Barmawi, MH, Hakim Tinggi Bapak Drs. Abbas Fauzi, SH, dan Hakim PA Muara Sabak Doni Dermawan, S.Ag, M.HI sebagai moderatornya.

Acara yang diadakan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 ini, dimulai pada pukul 14.30 dengan pemaparan singkat dari Bapak Drs. H. Muhammad Yamin Awie, SH, MH. Dalam pemaparannya, narasumber menyampaikan bagaimana kiat-kiat melaksanakan tupoksi dengan baik dan benar.

Kiat yang pertama adalah memahami tupoksi masing-masing aparatur, kedua memahami alur Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan ketiga melaksanakan dengan penuh tanggung jawab job description masing-masing aparatur. Jika ketiga kiat ini dilaksanakan dengan baik dan

benar, maka sebuah lembaga, terutama Pengadilan Agama akan berjalan dengan baik dalam melayani masyarakat.

Setelah pemaparan singkat dari narasumber acara dilanjutkan dengan diskusi. Dalam acara diskusi yang dibuka oleh Moderator Doni Dermawan, S. Ag, MHI, banyak peserta diskusi menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan permasalahan hukum acara, pola bindalmin dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan kendala-kendala dalam melaksanakan tupoksi masing-masing aparatur.

Diakhir kegiatan bimtek ini, Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak, Drs. H. Barmawi, MH menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nara sumber, yaitu Bapak Drs. H. Muhammad Yamin Awie, SH, MH dan Bapak Drs. Abas Fauzi, SH yang telah memberikan pencerahan kepada jajaran Pengadilan Agama Muara Sabak, karena kegiatan bimtek yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat ini, tetapi sangat berarti bagi jajaran aparat Pengadilan Agama Muara Sabak dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing aparatur.



Pejabat Fungsional, Struktural dan Staff PA Muara Sabak sedang mengikuti Bimtek.

Selain itu, Drs. H. Barmawi, MH juga berharap, semoga kegiatan semacam ini tetap berlanjut di masa-masa yang akan datang, demi meningkatkan wawasan dan kelancaran tugas aparatur Pengadilan Agama Muara Sabak dalam melayani masyarakat, sesuai dengan prinsip justice for all yang dicanangkan oleh Badan Peradilan Agama. (Jurdilaga PA Muara Sabak / PTA Jambi).

PA KUALA TUNGKAL :

Waka PTA Jambi Pimpin Pengawasan dan Pembinaan di PA Kuala Tungkal



Wakil Ketua PTA Jambi, Drs. H. M. Yamin Awie, SH., MH, (tengah), didampingi Wakil Sekretaris PTA Jambi, Meiradinata, S.Ag (kanan) dan Hakim Tinggi PTA Jambi, Zaina Yusuf, S.H., S.Ag. saat melakukan ekspose hasil pengawasan dan pembinaan di PA Kuala Tungkal

Jambi | pta-jambi.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. M. Yamin Awie, SH., MH, memimpin tim pengawasan dan pembinaan PTA Jambi di PA Kuala Tungkal.

Pengawasan yang dilaksanakan pada 3-5 Juni 2013 ini, dilakukan oleh beberapa Hakim Tinggi Pengawasan Daerah yaitu Husnul Arifin, S.Ag dan Zaina Yusuf, SH., S.Ag. Kemudian Wakil Sekretaris PTA Jambi, Meiradinata, S.Ag, Panmud Banding, Hartati, S.H, kemudian Hj. Yahidah, S.H.

Selain itu Yudhistira Adi Pinto, SE, yang merupakan Kasubbag Keuangan PTA Jambi juga turut serta dalam tim pengawasan dan pembinaan di PA Kuala Tungkal ini, serta beberapa staf PTA Jambi, masing-masing Dedi Arizal, S.E, Astrie Wahyuni, S.Kom, dan Azman.

Dalam pengawasan dan pembinaan ini para pengawas langsung melaksanakan pengawasan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Hakim pengawasan langsung memeriksa berkas-berkas perkara yang sudah diminutasi. Sedangkan Panitera Pengganti PTA Jambi memeriksa buku-buku register kepaniteraan.

Tidak hanya itu saja, Wakil Sekretaris, Kasubbag Keuangan dan staf PTA Jambi, memeriksa bagian

kesekretariatan PA Kuala Tungkal, mulai bagian umum, keuangan hingga kepegawaian.

Dalam ekspose yang digelar di Aula PA Kuala Tungkal, Wakil Ketua PTA Jambi, Drs. H. M. Yamin Awie, SH., MH menyebutkan, bahwa maksud dan tujuan kedatangan Tim pengawasan dan pembinaan PTA Jambi adalah untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan terutama menyangkut bidang Manajemen Peradilan, Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Peradilan, Pelaksanaan Putusan, Siadpa Plus serta Kinerja Pelayanan Publik dan Administrasi Umum.

“Juga arahan lainnya berkaitan dengan tugas pokok peradilan guna menunjang visi dan misi Mahkamah Agung demi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung dan berwibawa,” ujarnya dihadapan Ketua PA Kuala Tungkal, Hakim, pejabat struktur, fungsional, serta staf PA Kuala Tungkal..

Pengawasan dan pembinaan ini kata dia, bukanlah bertujuan semata-mata untuk mencari-cari kesalahan. Tetapi tegasnya, pengawasan ini lebih dimaksudkan untuk melakukan pembinaan. “Dalam rangka mencari bahan evaluasi bagi kita semua dan perbaikan kinerja agar kita bisa lebih maju kedepan nantinya sehingga paling tidak kes-

<< REPORTASE PA SEWILAYAH >>

alahan yang kita buat bisa diminimalisir atau dihilangkan,” tukasnya.

Tidak hanya itu saja, pria yang dikenal merupakan pegiat TI ini juga menerangkan, di era reformasi dan birokrasi sekarang ini yang diiringi dengan perkembangan IT yang semakin maju dan terbuka, maka segala hal atau sesuatu yang dilaksanakan oleh peradilan dapat dilihat atau diakses oleh para pencari keadilan.



Hakim, pejabat struktural, fungsional serta staf PA Kuala Tungkal, tampak serius mengikuti ekspose hasil pengawasan dan pembinaan

’Untuk itu saya himbau agar kita semua yang sudah berkomitmen untuk bekerja dan mengabdikan lembaga peradilan untuk selalu berhati-hati dalam berbuat dan bertindak,” sebutnya.

Sementara itu, terkait beberapa temuan dalam pengawasan yang dilakukan, dirinya meminta agar segera ditindaklanjuti. “Segera ditindaklanjuti, meski tidak fatal, tetapi tetap harus segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (Jurdilaga PTA Jambi)

PA MUARA BULIAN :

Tim Biro Perlengkapan MA Kunjungi PA Muara Bulian



Muara Bulian | pa-bulian.net

Kamis, (20/6/2013) Pengadilan Agama Muara Bulian kedatangan team Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI (MA-RI), team ini dipimpin oleh Denhar, SH (Kasub. Bag Bimbingan dan Monitoring A Biro Perlengkapan BUA MA-RI), Andi Nur Hasbi Alauddin, SE, MH (Staf Biro Perlengkapan BUA MA-RI) dan Gusnadi Susanto (Staf Biro Perlengkapan BUA MA-RI) dengan didampingi oleh Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jambi Meiradinata, S. Ag. Kedatangan team biro perlengkapan MA-RI ini dalam rangka kegiatan monitoring pembangunan gedung kantor/rumah dinas, pengadaan tanah, dan monitoring barang milik negara pada Pengadilan Agama/ Negeri di provinsi Jambi, sesuai dengan surat tugas nomor : 118/BUA.4/ST/VI/2013 tertanggal 04 Juni 2013 dan PA Muara Bulian merupakan salah satu Instansi Mahkamah Agung yang sedang melakukan pembangunan gedung tahap III (finishing).

Team Biro Perlengkapan ini juga menyambangi dan melihat secara langsung pembangunan gedung baru kantor PA Muara Bulian yang letaknya berjarak sekitar 5 Km (15 menit) dari gedung Kantor PA Muara Bulian. Selain memeriksa kelengkapan berkas team ini juga mengecek fisik bangunan gedung, apakah telah sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

Denhar, SH pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa proses pembangunan gedung kantor telah sesuai dengan prosedur, dan harus lebih digalakan pengawasan secara internal agar proses pembangunan ini tidak menyalahi aturan. “Proses pembangunan gedung ini telah sesuai dengan prototype yang telah disahkan oleh Mahkamah Agung, tetapi dalam proses pembangunan ini PA Muara Bulian juga harus melakukan pengawasan secara rutin agar pembangunan ini tidak menyalahi aturan kedepannya,” ungkapnya.

Setelah selesai melakukan tugasnya di PA Muara Bulian team ini bertolak menuju Pengadilan Negeri Muara Bulian, dalam monitoring proses pembangunan rumah dinas di PN Muara Bulian.

(Syarbaini/Jurdilaga PA Muara Bulian – PTA Jambi)

PA MUARA TEBO :

PA Muara Tebo Kembali Mengukir Prestasi



Muara Tebo | pa-muaratebo.go.id

Penilaian Laporan Perkara Juli 2013 yang di rilis website PTA Jambi (24/07/2013) menempatkan PA Muara Tebo di peringkat ke tiga. Perolehan prestasi tentunya bukan kali pertama bagi PA yang berdomisili di bumi seentak galah serengkuh daung ini setelah sebelumnya juga berhasil menjadi yang tercepat dan akurat dalam pengiriman usulan remunerasi Juli 2013.

KPA Muara Tebo, Drs. Suhaimi disela kesibukannya menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang kembali diukir PA yang dipimpinnya. “Alhamdulillah, rasa syukur kita sampaikan pada Allah Swt. atas prestasi yang kembali diperoleh PA Muara Tebo, semoga prestasi-prestasi yang telah diperoleh tidak membuat kita cepat berpuas diri,” ujarnya.

Prestasi yang telah diraih menurut pria satu ini hendaknya dapat dijadikan cambuk motivasi untuk bekerja lebih efektif dan meningkatkan kinerja di semua lini sehingga di bulan-bulan selanjutnya PA Muara Tebo dapat bertengger di posisi teratas di wilayah PTA Jambi, baik dalam penilaian laporan maupun penilaian-penilaian lainnya.

“Jadikan prestasi-prestasi yang telah kita raih sebagai motivator dalam rutinitas di satker dan jan-

gan sampai prestasi yang kita raih justru membuat kita telena serta lalai dalam tugas memberikan pelayanan prima pada masyarakat pencari keadilan,” pungkasnya. (Ahmad Khumaidi/Jurdilaga PA Muara Tebo-PTA Jambi)

Realisasi DIPA PA Muara Tebo Capai Angka 72,23 %

Sementara itu memasuki bulan September 2013, bagian keuangan Pengadilan Agama Muara Tebo merilis hasil penyerapan DIPA yang bersumber dari dana APBN yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama).

Adapun data yang diperoleh langsung redaksi jurdilaga dari Pansek PA Muara Tebo, Drs. Rusdi, MH melalui Kaur Keuangan, Azhar Amir, SH ini menempatkan PA Muara Tebo menjadi satker yang mampu merealisasikan anggaran operasional dan belanja (DIPA 01) mencapai angka 72,23 % dan anggaran sidang keliling dan prodeo (DIPA 04) dengan realisasi 61,46 %.

Bendahara Pengeluaran PA Muara Tebo, Ahmad Ghufrani, SE yang ditemui redaksi disela kesibukannya membenarkan bahwa secara umum peny-

<< REPORTASE PA SEWILAYAH >>

erapan anggaran di satker PA Muara Tebo per 1 September 2013 sudah mencapai angka 78%.

“Ya, pada saat ini penyerapan anggaran yang berasal dari DIPA 01 dan DIPA 04 sudah maksimal kami lakukan, saya berharap diakhir tahun 2014 penyerapan anggaran dapat berjalan maksimal,” ujarnya.

Lebih lanjut pria yang masih lajang ini juga menyebutkan, untuk belanja pegawai terdapat penambahan pagu yang awalnya Rp. 1.200.279.000,- menjadi Rp. 2.158.169.000,-. Penambahan tersebut menurut dia dikarenakan naiknya tunjangan fungsional hakim yang merujuk pada PP 94 Tahun 2012. (rahza/jurdilaga PA Muara Tebo-PTA Jambi)

PA MUARA BUNGO :

PA Muara Bungo Diskusikan Isbat Nikah



Bungo | www.pamarabungo.go.id | Muara Bungo, di ruang ketua PA Muara Bungo dilaksanakan diskusi isbat nikah, Diskusi dihadiri Ketua PA Muara Bungo, Auzar Nawawi, Dra. Asmidar Waka PA Muara Bungo, Afrizal, M.Ag, Muhammad Iqbal, S.HI, MA, Hidayah, S.HI, Iqbal Kadafi, SH, Hakim PA Muara Bungo, Drs. Zubir Ishak, Panitera Sekretaris, Drs. Saukani, Wapan, Hoiriah Wasek, PA Muara Bungo serta Asnawi, SH, Maksor, S.Pdi dan Hazizah Jusrita Pengganti PA Muara Bungo.

Isbat nikah merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Permohonan isbat nikah dapat di ajukan oleh suami isteri, atau salah satunya, anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan seperti keluarga suami isteri dan dapat diajukan bersamaan dengan gugatan/permohonan perceraian.

Perkara isbat nikah adalah termasuk perkara voluntair, tetapi jika salah seorang suami atau isteri meninggal dunia, maka permohonan perkara isbat nikah seperti ini termasuk contentious, dan semua ahli warisnya harus dijadikan pihak.

Maka untuk menyamakan persepsi dibentuk sebuah tim yang tugasnya merumuskan dan menyusun ketentuan antara perkara voluntair dan contentious untuk dijadikan sebagai pedoman.

Diskusi yang dimoderatori Dra. Asmidar, semua peserta diskusi terlihat aktif menyampaikan ide dan masukannya. Bahkan sering sekali terjadi adu argumentasi dalam memberikan pertimbangan hukum. sehingga suasana diruang diskusi tampak hidup. (malamgerimis & Lara Harnita, S.HI – Jurdilaga PA Muara Bungo/PTA Jambi)

PA SAROLANGUN :

PA Sarolangun Gelar Sidang Keliling Ke – 11 Tahun 2013



Sidang keliling bertempat di KUA Kec.Bathin VIII Kab.Sarolangun

Sarolangun 15 Juli 2013 | www.pa-sarolangun.go.id

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sarolangun tahun 2013 serta untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat pencari keadilan mendapatkan akses yang mudah, cepat, sederhana dan memberikan pelayanan prima Kantor Pengadilan Agama Sarolangun kembali melaksanakan Program Sidang Keliling.

Bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun, Pengadilan Agama Sarolangun melakukan sidang keliling ke 11 (sebelas) di tahun 2013 ini. Sidang keliling yang dilaksanakan pada 12 Juli 2013 ini merupakan kerja sama antara PA Sarolangun dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bathin VIII.

Tepat pukul 09:00 WIB sidang dimulai, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Farida Nur Aini, S.Ag. yang beranggotakan Hakim Anggota Erni Melita Kurnia, S.H.I., dan Ana Efadari, S.H.I., dengan Panitera Pengganti Ibnu Hajar, BA.

Sekitar jam 12:00 WIB Sidang Keliling selesai, se-

lanjutnya tim sidang keliling kembali bertolak ke Kantor Pengadilan Agama Sarolangun.

Program sidang keliling ini memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat pencari keadilan khususnya yang berada di Kabupaten Sarolangun. Salah satunya untuk membantu dan memudahkan bagi pencari keadilan yang bertempat tinggal di wilayah pelosok untuk mendapatkan keadilan dan pelayanan hukum. (Jurdilaga PA Sarolangun, PTA Jambi)

PA BANGKO :

Sekali lagi, PA Bangko Berprestasi
di Bidang Keuangan

Bangko | PA Bangko

Pengadilan Agama Bangko kembali mengukir prestasi di bidang keuangan. Prestasi tersebut didapatkan berkat kerjasama yang baik antara, staf bagian keuangan. Kaur, Wasek, Pansek, dan Pimpinan PA Bangko sendiri. Diperolehnya Kartu Ultima 2013 (Untuk Layanan Satker Prima) yang merupakan kartu bebas antri dari KPPN merupakan bukti kerja keras dan kerjasama yang baik telah terbangun

Menurut Pansek PA Bangko, Drs. Aidil Mujahid, untuk mendapatkan kartu Ultima tidaklah mudah, karena banyak sekali poin-poin penilaian yang dijadikan dasar KPPN untuk memberikan kredit kepada satker yang berprestasi.

Menurut dia, yang pertama adalah Rencana Penarikan Anggaran (RPA), KPPN Bangko sangat mengharapkan setiap Satker di wilayah Kabupaten Sarolangun dan Bangko dapat menyampaikan perencanaan sebelum mengajukan pencairan, dan pencairannya pun harus sesuai dengan perencanaan, karena perencanaan tersebut akan dilaporkan oleh KPPN ke Kementerian Keuangan dalam hal rencana penyerapan anggaran.

“Satker wajib menyampaikan RPA, karena itu akan kami sampaikan ke pusat sebagai laporan”, itulah yang pernah disampaikan salah satu pegawai KPPN. Dan laporan tersebut juga berhubungan dengan ketersediaan dana yang ada pada Bank persepsi rekanan KPPN.

Poin yang kedua sebutnya, adalah Rekonsiliasi yang benar dan tepat waktu, peran serta dari semua Satker sangat membantu dan memudahkan KPPN dalam hal penyampaian laporan yang valid dan tepat ke Dirjen Perbendaharaan dalam hal ini DJPBN Jambi, sehingga DJPBN Jambi pun bisa cepat melakukan rekonsiliasi dengan Satker di Tingkat Provinsi, dan

Penyampaian LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang benar dan tepat waktu, laporan ini sangat dibutuhkan KPPN untuk melakukan penga-



wasan anggaran UP (Uang Persediaan) yang ada pada Satker. Seperti melakukan monitoring terhadap Saldo Buku Pembantu Kas, UP, LS (Langsung), Uang Tunai yang ada pada brankas/bank, anggaran uang persediaan dalam bentuk kuitansi, dan harus mengetahui ada atau tidaknya selisih kas atau selisih pada pembukuan UP. serta

Realisasi Anggaran, persentase pencairan yang sesuai dengan program-program kegiatan juga turut dijadikan KPPN Bangko sebagai penambahan kredit kepada satker yang dilayani, karena hal ini mencegah terjadinya pengumpulan proses (penumpukan) pencairan pada akhir tahun.

“KPPN Bangko sangat berharap kepada semua Satker yang berada di wilayah KPPN Bangko dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan,” ujar Pansek PA Bangko, didampingi Kaur Keuangan, Husni Jayadi, S.Ag.

Oleh karena itu tegasnya, KPPN Bangko memberikan apresiasi kepada Kantor Pengadilan Agama Bangko yang berupa fasilitas bebas antri untuk mendapatkan jasa pelayanan dari KPPN dalam bentuk pemberian Kartu Ultima 2013.

“Mudah-mudahan prestasi ini dapat dipertahankan Kantor Pengadilan Agama Bangko kedepannya,” pungkasnya (Jurdilaga PA Bangko/PTA Jambi)

PA SUNGAI PENUH :

PTA Jambi Lakukan Pengawasan dan Pembinaan di PA Sungai Penuh



Ketua PTA Jambi memberikan Sambutan beberapa saat sebelum Pengawasan dan Pembinaan di PA.Sungai Penuh

Sungai Penuh | pa-sungaipenuh.go.id

Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013, Tim Pengawasan dan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yang di pimpin langsung oleh Ketua PTA Jambi Drs. Muzani Zahri, SH,MH melaksanakan pengawasan dan pembinaan di PA Sungai Penuh, Tim PTA yang terdiri dari 3 orang Hakim Tinggi yaitu : Dra. Hj. Asliyah Muzani, SH, Drs. H. Agus Bahauddin, M.Hum, Drs. Supardi, Wapan PTA Jambi Idris Latif, SH,MH, Wasek PTA Jambi Meiradinata, S.Ag, PP PTA Jambi M.Arif Mahidin, dan Staff PTA Jambi Azman, Abdul Rachman, SE.

Diawali dengan ramah tamah penyambutan dari PA.Sungai Penuh bertempat di ruang sidang II PA.Spn, KPTA Jambi dalam sambutannya mengatakan bahwa pengawasan dan pembinaan ini adalah agenda rutin setiap tahunnya, dan selama ini beliau selalu memimpin langsung tim pengawasan dan pembinaan setiap datang ke PA Sungai Penuh dan dalam amanatnya beliau juga memahami kondisi kantor PA.Spn yang sedang dalam kondisi rehab kantor dan atap kantor, sehingga ruangan di lantai 2 yang dikosongkan dan dipin-

dahkan ke lantai 1 dengan digabungkannya beberapa pegawai dalam satu ruangan.

Setelah ramah tamah beberapa saat, Tim PTA langsung melakukan pengawasan dan pembinaan di setiap bagian dan bidang PA.Spn, mulai dari Kepaniteteraan yang terdiri dari beberapa bagian Bendahara Perkara (Kasir), Hukum, Gugatan, Permohonan, dan Kesekretariatan ; Ruang Server/ IT, Keuangan, Kepegawaian, Umum.



Pengawasan dan Pembinaan oleh Tim dari PTA Jambi di PA. Sungai Penuh

Di hari pertama pemeriksaan dan pengawasan dari 2 hari yang direncanakan, memang ditemukan beberapa temuan yang menjadi catatan tim



Ekspos hasil pengawasan dan pembinaan pada malam harinya,,yang dilanjutkan dengan foto bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Drs.H.Muzani Zahri,SH.MH, Tim Pengawas dan pembinaan serta unsur Pimpinan Pengadilan Agama Sungai penuh

pengawasan PTA Jambi, tetapi tim pengawas memakluminya, karena tidak berakibat terlalu fatal dan pengawasan ini pun bukan sekedar mencari ketidaksempurnaan dan kesalahan tapi juga membina dan membimbing untuk menjadi lebih baik,,sebagaimana dijelaskan Wasek PTA Jambi Meiradinata, S.Ag : “tujuan kami datang ke PA Sungai Penuh bukan hanya sekedar mengawasi tetapi juga membimbing dan membina agar menjadi lebih baik, kesalahan itu wajar, artinya kita bekerja, apalagi saat ini PA. Sungai Penuh sedang dalam rehab kantor, jadi kita memaklumi kondisi

kantor PA. Sungai Penuh dan Pegawainya yang bekerja dalam kondisi kantor sedang di rehab.” Ujar pria kelahiran Kerinci ini.

Dari hasil ekspos beberapa temuan Tim Pengawas dan Pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, di paparkan beberapa hal yang intinya Pengadilan Agama Sungai Penuh sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan sudah ada arah menuju peningkatan yang lebih baik lagi,,hanya beberap hal lagi yang perlu lebih ditingkat kan agar PA.Sungai Penuh bisa sejajar dengan PA-PA lainnya di wilayah Jambi. (JURDILAGA PA.SPN)

Bahas Persoalan Daerah, Gubernur Libatkan Ketua PTA Jambi



Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, bersama Forkompimda dan beberapa pimpinan lembaga vertikal di rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (5/6/2013). Sesaat menjelang acara dimulai.

Jambi | pta-jambi.go.id

Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) secara khusus mengundang Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH, MH ke rumah dinas, Selasa (05/06/2013).

Selain Ketua PTA Jambi, juga hadir, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kapolda Jambi, Korem Garuda Putih, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Jambi dan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

Dalam pertemuan yang dimulai pada pukul 07.00 WIB tersebut, berbagai persoalan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dibahas secara bersama-sama. Semua unsure Forum Komunikasi Pimpinan daerah dan pimpinan lembaga vertikal tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah Provinsi Jambi.

Beberapa persoalan yang menjadi inti bahasan pada pertemuan ini adalah pengamanan daerah menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jambi dan sejumlah kasus Penambangan Emas, baik yang tanpa izin maupun yang memiliki izin.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Forkompimda dan pimpinan lembaga vertikal yang telah hadir memenuhi undangan, saya berharap banyak, kita bisa bertukar fikiran, agar

pemerintah Provinsi Jambi dapat menyerap banyak informasi dan masukan,” ujar Gubernur Jambi pada pertemuan kali ini.

Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, dihadapan Gubernur, Forkompimda dan sejumlah pimpinan lembaga vertikal tersebut, menyampaikan wewenang PTA tidak ada kaitannya dengan hal ini. Hanya saja, selaku pimpinan lembaga vertikal dirinya tetap mendukung upaya penertiban dan pengecekan secara langsung pertambangan emas tersebut.

”Kita harus mencari tahu lebih jauh persoalan ini, sejauh mana persoalan ini, bagaimana dengan izin operasionalnya, dan beberapa persoalan yang berkaitan harus segera dituntaskan,” ujarnya. (Nop/Jurdilaga PTA Jambi)

Ketua PTA Jambi Hadiri Paripurna DPRD Provinsi Jambi



Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH (Paling kanan) bersama Forkompimda dan pimpinan lembaga vertikal lainnya, saat menghadiri Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (03/06/2013).

Jambi | pta-jambi.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, hadir langsung pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun 2012, Senin (3/6/2013).

Dalam kesempatan ini, Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus, yang baru saja menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, memberikan apresiasi kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), dan pimpinan lembaga vertikal yang ada di Provinsi Jambi.

Apresiasi tersebut tentunya tidak berlebihan, karena Gubernur Jambi menganggap masukan dan saran dari Forkompimda dan pimpinan lembaga vertikal terhadap pemerintahan yang dipimpinnya sangat berarti selama ini, sehingga mengantarkannya mendapatkan opini WTP terse-

but.

“Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada semuanya, Forkompimda, Pimpinan lembaga Vertikal, kepala SKPD, dan semua masyarakat Jambi, berkat kerjasama, masukan dan saran, sehingga Pemerintah Provinsi Jambi mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI,” ujarnya.

Dalam paripurna yang digelar pada pukul 10. 00 WIB ini, selain Ketua PTA Jambi, juga hadir, Ketua PT Jambi, Korem Garuda Putih Jambi, Kapolda Jambi, Kajati Jambi, Ketua BPK perwakilan Jambi. (Nop- Jurdilaga PTA Jambi)

Ketua PTA Jambi Hadiri Pembukaan MTQ ke-43 Provinsi Jambi



Ketua PTA Jambi, bersama pimpinan DPRD Provinsi Jambi, dan Sekda Provinsi Jambi

Jambi | pta-jambi.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, Sabtu (8/6/2013), menghadiri secara langsung pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Provinsi Jambi.

Ketua PTA Jambi, tidak hadir sendirian. Pada acara yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB ini, orang nomor satu di PTA Jambi ini hadir bersama Ibu Dra. Hj. Aslihah Muzani, SH.

Sebelum ke arena MTQ Rimbo Binjai, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, rombongan Forkompimda, dan pimpinan lembaga vertikal Provinsi Jambi disambut di kediaman orang tua Bupati Muaro Jambi yang tidak jauh dari arena pembukaan MTQ tersebut.

MTQ kali ini mengangkat tema "Kita Tingkatkan Pengamalan Al-Qur'an sebagai Pedoman Hidup dan Kehidupan menuju Jambi EMAS 2015".

Gubernur Jambi dalam sambutannya mengatakan, Al-Qur'an memberi tuntunan kepada kita agar membangun kehidupan yang harmonis, saling bertoleransi, hidup dalam kedamaian dan hidup untuk saling mengenal, saling mengasihi, saling memberi maaf dan tidak membenci satu sama lain.

Dia menambahkan, pelaksanaan MTQ bukan semata menjadi ajang untuk berlatih dan bertanding membaca Al-Qur'an, tapi juga untuk memahami substansi dari ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan benar dan tepat, sehingga penyelenggaraan MTQ

ini diharapkan menjadi media efektif mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

"Kepada para alim ulama dan tuan-tuan guru untuk secara bersama-sama meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam di tengah masyarakat Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah dengan selokonya mengatokan Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. Inilah karakter anak negeri Jambi," ujar HBA.

"Marilah kita menjalankan dan menyiarkan ajaran Islam secara benar sesuai dengan kandungan Al-Qur'an dan Sunnah. Janganlah kita menjalankan keimanan dan ajaran yang keliru, apalagi menyiarkannya karena pasti mendatangkan permasalahan, bahkan pertentangan, baik untuk diri sendiri maupun untuk komunitas umat Islam yang lebih luas," imbuhnya.

Ibu Dra. Hj. Aslihah Muzani, SH, di panggung utama Pembukaan MTQ ke -43 Provinsi Jambi.

Sementara itu, Ketua PTA Jambi, usai pembukaan, kepada Jurdilaga PTA Jambi mengatakan, bahwa pelaksanaan MTQ merupakan sebuah hajatan besar untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis, dengan menunjukkan bahwa umat islam yang cinta damai, ramah dan toleran serta membangun kebersamaan mengatasi berbagai persoalan dengan cara-cara Islami. (Nop-Dedi/Jurdilaga PTA Jambi)

KPTA Jambi Hadiri Pertemuan Gubernur dengan Panja Komisi IV DPR-RI



Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH (kanan), bersama Forkompimda dan pimpinan lembaga vertikal, mengikuti pertemuan dengan Panja Komisi IV DPR-RI di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (20/06/2013)

Jambi | pta-jambi.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH menghadiri secara langsung kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi IV di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (20/06/2013).

Selain Ketua PTA Jambi, pertemuan dengan Panja Komisi IV DPR-RI ini juga dihadiri oleh Forkompimda Provinsi Jambi dan beberapa pimpinan Lembaga Vertikal di Provinsi Jambi, serta kepala SKPD dan Bupati dan Walikota di Provinsi Jambi.

Dalam pertemuan ini, Gubernur Jambi, menyampaikan banyak hal terkait dengan Areal Penggunaan Lain (APL).

Selain itu dalam kesempatan ini, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, menyatakan bahwa proses penyusunan tata ruang Provinsi Jambi saat ini terkait dengan usulan pelepasan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang harus diverifikasi terlebih dahulu oleh tim terpadu Kementerian Kehutanan RI.

“Syukur alhamdulillah, khusus usulan perubahan peruntukan yang non Dampak Penting Cakupan Luas dan Strategis (DPCLS) di Provinsi Jambi telah dapat diselesaikan dengan diterbitkannya SK Menteri Kehutanan Nomor 727/Menhut-II/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Perubahan

Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Bukan Hutan seluas 13.712 hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas 20.529 hektar,” ungkap Gubernur.

Sementara itu, Ketua Tim Spesifik Panja Komisi IV DPR-RI Ir. E. Herman Khairon mengungkapkan bahwa pengalihan luas lahan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain seperti yang diharapkan Pemerintah Provinsi Jambi sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan luas hutan secara keseluruhan.

Dia mengharapkan pengalihan luas lahan hutan ini tidak disalahgunakan, bukan untuk masyarakat tetapi untuk malah untuk pengembangan industri. Ia juga menyebutkan bahwa tujuan kedatangan tim spesifik Panja Komisi IV adalah untuk mengetahui aspirasi dari masyarakat yang telah bermukim di dua daerah ini.

“Hasil verifikasi ini akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh DPR,” pungkaskannya. (Noprizal/Jurdilaga PTA Jambi)

KPTA Jambi Pimpin Safari Ramadhan Pemprov Jambi di Merangin



Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH

dan saya akan berangkat bersama jajaran PTA Jambi, dan anggota tim dari SKPD Pemprov Jambi,” ujar Ketua PTA Jambi, kepada Jurdilaga PTA Jambi, sembari memperlihatkan surat dari Setda Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Sekda, Sarahsaddin.

Menurut dia, rombongan Tim Safari Ramadhan di Kabupaten Merangin akan meluncur ke Kabupaten Merangin pada Kamis Pagi (25/07/2013).

Semua anggota tim yang terdiri dari beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jambi yang sudah ditunjuk oleh Gubernur Jambi akan berangkat bersama menuju kabupaten Merangin tersebut. (Nop/Jurdilaga PTA Jambi)

Jambi | pta-jambi.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, memimpin secara langsung Tim Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin, Kamis (25/7/2013). Selain Ketua PTA Jambi, beberapa anggota Forkompimda dan pimpinan lembaga vertikal lainnya seperti Kapolda Jambi, Danrem Gapu, Ketua PT Jambi, Kajati Jambi, juga memimpin rombongan safari Ramadhan Pemprov Jambi ke Kabupaten dan Kota lainnya.

Sedangkan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Provinsi Jambi memimpin tim lainnya ke Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.

“Tahun ini kita mendapatkan jadwal untuk memimpin safari Ramadhan di Kabupaten Merangin,

Pembina Jurdilaga PTA Jambi Hadiri Penganugerahan Pena Emas



Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, yang juga selaku Pembina Jurnalis Peradilan Agama (Jurdilaga) PTA Jambi, hadir secara langsung pada acara penganugerahan Pena Emas dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kepada Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, Senin (1/7).

Jambi | pta-jambi.go.id

Penganugerahan tersebut diberikan langsung oleh pengurus PWI Pusat yang juga dihadiri oleh Ketua PWI Margiono di Auditorium Rumah Dinas Gubernur.

Gubernur Jambi merupakan orang ke 34 yang menerima penghargaan bergengsi tersebut dan merupakan satu di antara tiga tokoh dari Sumatera yang menerima penghargaan karena dinilai peduli terhadap perkembangan pers dan demokrasi, selain itu pena emas dianugerahkan kepada tokoh yang berperan penting pada proses pembangunan.

Pria yang pernah menjabat sebagai Sekda Kota Jambi ini menerima penganugerahan pena emas PWI setelah Para pengurus PWI memberikan penilaian sangat memuaskan atau cum laude terhadap orasi ilmiah yang disampaikan gubernur dihadapan para pengurus dan para undangan yang datang di acara kemarin.

HBA mengaku tidak pernah terbayang bisa me-

nerima anugerah tersebut. Meski sebelumnya dia sempat mendengar kabar bahwa dirinya menjadi satu diantara tokoh yang disebut layak menerima penghargaan tersebut. "Penghargaan ini bukan untuk pribadi saya saja, tetapi juga untuk masyarakat Jambi," katanya.

Sebagai satu-satunya tokoh dari Jambi yang menerima penghargaan tersebut HBA mengaku dirinya memang dekat dengan dunia jurnalisme, bahkan HBA mengatakan pernah mengikuti pelatihan untuk menjadi jurnalis semasa kuliah di APDN. Dihadapan para pengurus PWI, Forkompimda, dan pimpinan lembaga vertikal lainnya HBA juga sempat memperlihatkan piagam.

"Saya sejak dulu memang tertarik di dunia pers, kalau tidak jadi gubernur mungkin saya jadi wartawan," sebutnya.

Sementara itu, Ketua PTA Jambi, kepada Jurdilaga PTA Jambi juga mengatakan begitu pentingnya jurnalistik. Hal itu tidak bisa dipungkiri sama sekali. Bahkan, menurut dia, oleh karena itu, pada Rakerda 2012 lalu, PTA Jambi, secara resmi mendeklarasikan berdirinya Jurdilaga PTA Jambi, yang juga merupakan organisasi penulis pertama di Badan Peradilan Agama. "Ini merupakan bukti dukungan penuh saya kepada Jurdilaga," pungkasnya. (Noprizal/Jurdilaga PTA Jambi)

Bersama Gubernur, Forkompimda, KPTA Jambi Hadiri Upacara HUT RI



PTA JAMBI – Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 68 di Lapangan Upacara Pemerintah Provinsi Jambi, Sabtu (17/08/2013).

Dalam upacara pengibaran duplikat, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus secara langsung menjadi inspektur upacara, sedangkan pada upacara pe-

nurunan bendera, Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Fahrori Umar, M.Hum.

Dalam upacara tersebut hadir Kapolda Jambi, Danrem 042 Garuda Putih, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, semua Kepala SKPD, PNS, pelajar. (Jurdilaga PTA Jambi)



KPTA Jambi (Dua dari Kiri) saat berada di panggung Utama Upacara HUT RI



KPTA Jambi dan Ibu Dra. Hj. Aslihah Muzani, SH photo bersama Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Fahrori Umar, M. Hum



Ibu Dra. Hj. Aslihah Muzani, SH, foto bersama Ibu Gubernur Jambi, Hj Yusniana Hasan Basri

Ketua PTA Jambi: Selamat Atas Terbitnya Majalah Digital Edisi Perdana



Kiri : Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH dan kanan : Panitera Sekretaris PTA Jambi, Drs. H. Pahri Hamidi, SH

Jambi | pta-jambi.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, menyampaikan ucapan selamat atas terbitnya edisi perdana “Majalah Digital Peradilan Agama”.

Ucapan tersebut disampaikan pada saat memberikan amanat apel pagi, Senin (03/06/2013) di halaman depan kantor PTA Jambi.

Dalam amanat tersebut dirinya mengatakan bahwa terbitnya edisi perdana majalah digital peradilan agama, merupakan bukti nyata dari inovasi-inovasi baru dari peradilan agama.

Dirinya juga memberikan apresiasi kepada tim redaksi majalah digital peradilan agama yang terdiri dari hakim-hakim muda yang disokong penuh oleh pimpinan peradilan agama.

“Saya ucapkan selamat atas terbitnya edisi perdana majalah digital peradilan agama. Saya salut dengan tim redaksi, berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mampu mengangkat nama baik peradilan agama, padahal hanya satu kali tatap muka, selebihnya hanya melalui e-mail dan jejaring sosial,” ujarnya.

Tidak hanya itu saja, menurut dia, majalah digital 80 halaman ini juga harus menjadi acuan bagi seluruh aparat peradilan agama.

“Saya minta kepada semuanya untuk membaca dan memahami muatan kandungan pada tulisan-tulisan yang dimuat pada majalah digital peradilan agama itu, bisa dijadikan pedoman,” tukasnya. Ditegaskan orang nomor satu di PTA Jambi ini, majalah ini merupakan sarana pembinaan dan sarana pembelajaran.

“Ini majalah milik kita, untuk kita, mari kita manfaatkan, milik kita secara keseluruhan. banyak rubrik yang dimuat di dalamnya, ada liputan khusus, fenomena, putusan mancanegara, wawancara eksklusif, program prioritas, postur, pojok Pak Dirjen. Sangat rugi untuk dilewatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. Pahri Hamidi, SH, kepada Jurdilaga PTA Jambi mengatakan, bahwa terbitnya majalah digital peradilan agama ini secara otomatis menambah ruang kreativitas aparat peradilan agama.

Oleh karena itu tegasnya, saya minta kepada semua aparat peradilan agama di wilayah PTA Jambi untuk memanfaatkan ruang ini untuk berkarya. Ke depan tukasnya, besar harapan agar aparat di wilayah PTA Jambi mampu berkarya dan pada beberapa tulisan di majalah digital peradilan agama edisi berikutnya, ada tulisan-tulisan dari wilayah PTA Jambi. (Nop/Jurdilaga PTA Jambi)

Sekditjen Raih Gelar Doktor, KPTA Jambi Ucapkan Selamat



Dari kiri: Wakil Ketua PTA Jambi, Drs. H. M. Yamin Awie, SH., MH, Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, Panitera Sekretaris PTA Jambi, Drs. H. Pahri Hamidi, SH

Jambi | pta-jambi.go.id

Keberhasilan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Farid Ismail meraih gelar doktor, tentu menjadi kebanggan bagi seluruh warga peradilan agama, tak terkecuali bagi warga Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Bahkan, Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, didampingi Wakil Ketua PTA Jambi, Drs. H. M. Yamin Awie, SH., MH, dan Pansek PTA Jambi, Drs. H. Pahri Hamidi, SH, pun melalui Jurdilaga PTA Jambi memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Sekditjen Badilag meraih gelar doktor dengan yudisium sangat memuaskan. Orang nomor satu di PTA Jambi tersebut menyebutkan bahwa, gelar doktor adalah gelar tertinggi di bidang akademis.

“Gelar tertinggi bidang akademis itu diraihnya setelah melewati dua jam sidang terbuka doktoral di lantai dua Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung atas disertasinya yang berjudul *Dinamika Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia – Pembaruan Hukum Islam Melalui Peradilan Agama*,” ungkap Ketua PTA Jambi ini.

Dijelaskan Ketua PTA Jambi, bahwa Farid Ismail, merupakan Doktor ke-94 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Doktor ke-43 bidang Hukum Islam dari universitas yang sama.

Tidak hanya itu saja, selaku orang nomor satu di wilayah PTA Jambi, dirinya juga terus memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh hakim dan pegawai di lingkungan PTA Jambi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk diketahui, saat ini, ada beberapa Hakim tingkat pertama, Hakim tinggi, pejabat struktural dan fungsional di wilayah PTA Jambi yang sedang mengikuti program doktoral.

Beberapa nama yang baru-baru ini dinyatakan diterima di program doktoral Universitas Jambi, adalah Wakil ketua PTA Jambi, Drs. H. M. Yamin Awie, SH., MH, Wakil Panitera PTA Jambi, Idris Latif, SH., MH, Wakil Ketua PA Sarolangun, Drs. Abdan Khubban, SH., MH. Selain itu, masih ada nama-nama lain yang sudah lebih dahulu mengikuti program doctoral tersebut. (Nop/Jurdilaga PTA Jambi)

KPTA Bandarlampung Raih Gelar Doktor, KPTA Jambi Ucapkan Selamat

“Saya selalu memberikan dukungan kepada semua Hakim dan Pegawai di wilayah PTA Jambi untuk mengikuti Program Doktoral,”

Keberhasilan orang nomor satu di PTA Bandarlampung meraih gelar doktor patut diberikan acungan jempol.

Hal itu tentunya tidak terlepas dari kerja keras Dr. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H untuk mewujudkan impiannya.

Usai membuka Bimtek SIADPA Plus PTA Jambi, kepada Jurdilaga PTA Jambi, Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua PTA Bandarlampung yang telah berhasil meraih gelar doktor ilmu hukum di Universitas Padjajaran Bandung, Jumat (29/8/2013)

Menurut KPTA Jambi, keberhasilan KPTA Bandarlampung ini bukannya hanya keberhasilan dan kebanggaan KPTA Bandarlampung, melainkan juga merupakan kebanggaan keluarga besar Badan Peradilan Agama secara keseluruhan.

“Ini merupakan kebanggaan warga peradilan agama secara keseluruhan,” ujar pria yang memasuki usia pensiun di awal tahun 2013 mendatang ini.

Tidak hanya itu saja, dirinya juga menyebutkan bahwa di wilayah PTA Jambi, sejumlah hakim dan pegawai juga sedang mengikuti program doktoral di berbagai perguruan tinggi.

Hal itu sebutnya, merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi menuju badan peradilan agama yang agung.

“Saya selalu memberikan dukungan kepada semua hakim dan pegawai di wilayah PTA Jambi untuk mengikuti program doktoral,” pungkasnya. (Noprizal/Jurdilaga PTA Jambi)



KPTA Jambi Ucapan Selamat atas Diresmikannya 39 Gedung Baru Pengadilan



Jambi | pta-jambi.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH menyampaikan ucapan selamat atas diresmikannya 39 gedung pengadilan dari empat lingkungan peradilan di Indonesia.

39 gedung ini diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. dan Pengadilan Negeri Tenggara ditetapkan sebagai tempat peresmian, untuk kali ini peresmian dipusatkan di Kabupaten Tenggara wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Kalimantan Timur. Dari 39 gedung yang diresmikan, terdapat sebanyak 17 gedung Pengadilan Agama

Ketua PTA Jambi, kepada Jurdilaga PTA Jambi secara langsung menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas diresmikannya secara serentak oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. Hatta Ali, S.H., M.H.

“Saya atas nama Keluarga Besar PTA Jambi dan atas nama pribadi menyampaikan selamat dan sukses atas diresmikannya 39 gedung baru, yang terdapat 17 diantaranya adalah gedung Pengadilan Agama oleh Bapak Ketua MA RI,” ujarnya.

Dia menambahkan, semoga dengan adanya pembangunan fisik seperti ini, maka lembaga peradilan dapat memberikan kenyamanan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya pencari keadilan. (Nop/Jurdilaga PTA Jambi)

MA Peringkat Pertama, KPTA Jambi Ucapkan Selamat

Jambi | pta-jambi.go.id

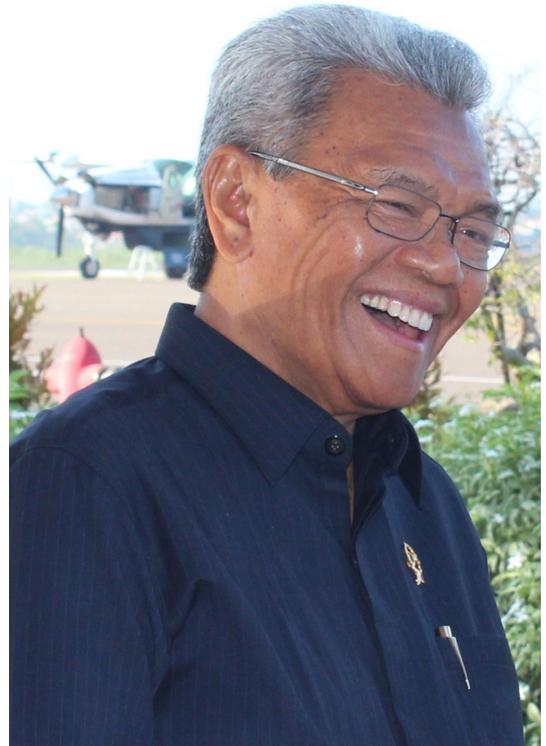
Prestasi kembali diraih Mahkamah Agung RI. Prestasi tersebut adalah diraihnya peringkat pertama dari 86K/L/N penyerapan anggaran semester I tahun 2013, yang dilakukan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA). Dalam acara yang dihadiri oleh para Sekjen, Sestama, Sesmen/Sekretaris Mahkamah Agung, Gubernur, Pejabat Penghubung TEPPA ini, Wakil Presiden RI, secara resmi membuka Rapat Kerja Evaluasi Realisasi Belanja K/L/N dan Daerah Semester I Tahun 2013 ini, Senin (26/08/2013), di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, Ketua Panitia TIM TEPPA Kuntoro Mangkusubroto mengharapkan bahwa dalam sisa waktu dua setengah bulan kepada para pimpinan K/L/N dan Daerah agar dapat merealisasikan anggaran yang tersisa.

TEPPA menyarankan pada para Sekjen/Sestama/Sesmen dan para gubernur agar melakukan langkah-langkah berikut, evaluasi proses pengadaan, jasa kontrak dan jasa lainnya dengan ketat di seluruh direktorat jenderal dan seluruh skpd.

Tinjau kembali pos-pos anggaran seperti perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa serta lakukan optimalisasi dan penghematan untuk pos ini. TEPPA akan memonitoring secara khusus dan kepada para Sekjen/Sestama/Sesmen K/L/N dan Daerah agar mempercepat penyerahan DIPA APBNP dan monitoring progresnya.

Dalam pengarahannya Wapres Boediono secara khusus berpesan kepada para pimpinan pusat dan daerah dalam masalah dua hal, hal yang pertama kepada para pengusaha jangan sampai ada PHK pada buruh pekerja dan hal yang kedua dalam kenaikan harga-harga jangan sampai melebihi dari daya beli masyarakat, maka hindari phk dan hindari kenaikan harga – harga kebutuhan pokok. Acara Rapat Kerja Evaluasi Realisasi Belanja K/L/N dan Daerah Semester I Tahun 2013, ini



dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Boediono dengan di tandai pemukulan gong dan di dampingi Gubernur DIY, Ketua dan wakil Tim TEPPA.

Di akhir acara para peserta Rapat Kerja Evaluasi Realisasi Belanja K/L/N dan Daerah Semester I Tahun 2013. Menerima ucapan selamat dari Wakil Presiden Boediono.

Sementara itu, Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, mengucapkan selamat kepada Mahkamah Agung RI yang telah berhasil menempatkan diri sebagai peraih peringkat pertama. (Jurdilaga PTA Jambi)

Ketua PTA Jambi: Selamat Atas dilantiknya Ketua PTA Yogyakarta



Ketua PTA Jambi, Bersama Istri, Dra. Hj. Aslihah Muzahi, SH

Jambi | pta-jambi.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas dilantiknya Ketua PTA Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. Hatta Ali, S.H., M.H.

Orang nomor satu di PTA Jambi ini secara langsung menyampaikan ucapan tersebut. Dia mengatakan, atas nama segenap keluarga besar PTA Jambi dan pribadi saya mengucapkan selamat

dan sukses atas dilantiknya Drs. H. Mansur Nasir, S.H, sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, di Gedung MA, pada hari Selasa (11/6/2013) lalu.

“Semoga amanah yang diberikan ini dapat dijalankan dengan baik,” ujar Ketua PTA Jambi, didampingi Wakil Ketua PTA Jambi Drs. H.M. Yamin Awie, SH., MH dan Pansek PTA Jambi Drs. H. Pahri Hamidi, SH. (Noprizal/Jurdilaga PTA Jambi)

Berkat Kerja Keras, Timda SIADPA Plus PTA Jambi Kembali Raih Prestasi



Timda SIADPA Plus PTA Jambi photo bersama Ketua PA Se wilayah PTA Jambi dan KPTA Jambi usai pelaksanaan Bimtek SIADPA Plus beberapa waktu yang lalu

Jambi | pta-jambi.go.id

Berkat kerja keras Tim Daerah SIADPA Plus PTA Jambi, akhirnya pada data pelaporan perkara Pengadilan Agama, PTA Jambi masih bertengger di posisi "Sangat Akurat" hal itu diketahui melalui info perkara online (www.infoperkara.badilag.net) periode Juli 2013.

Tak hanya itu, rilis terbaru ini menampilkan akurasi data laporan perkara sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama masing-masing. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PA yang berada di wilayah PTA Jambi mampu menghantarkan posisi teratas PTA Jambi pada data pelaporan perkara per Juni 2013.

Sepertinya yang diberitakan Badilag.net, untuk data per Juli 2013 yang diakses pada Rabu, 14 Agustus 2013, jam 12.45, diperoleh data hanya 3 PTA/MSA yang masuk kategori sangat akurat atau nihil selisih di laporan perbandingan.

Ketiga PTA tersebut adalah PTA Jakarta, PTA Jambi dan PTA Pontianak. Sedangkan 26 PTA/MS masih masuk ke dalam kategori tidak akurat atau data selisih lebih dari 11 dan seterusnya.

Oleh karena itu, Ketua PTA Jambi, Drs. H. Mu-

zani Zahri, SH., MH, memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua Tim Daerah Siadpa Plus PTA Jambi, Idris Latif, SH., MH, yang telah bekerja keras untuk menunaikan tugas berat ini.

Selain itu, semua anggota Timda SIADPA Plus PTA Jambi yang kerab disapa para laskar ini juga terus menerus mendapatkan asupan semangat dari para petinggi di wilayah PTA Jambi. Semangat ini lah yang membuat para laskar Timda SIADPA Plus PTA Jambi ini kian semangat.

"Semua Ketua PA di wilayah PTA Jambi untuk terus memonitor para Laskar SIADPA Plus PTA Jambi di masing-masing PA yang dipimpin," ujarnya.

Salah satu Bimtek SIADPA Plus PTA Jambi beberapa waktu yang lalu.

"Atas nama Ketua PTA Jambi, saya memberikan apresiasi khusus kepada semua admin dan user SIADPA Plus di wilayah PTA Jambi ini yang telah berjuang keras menghijaukan (mengakuratkan) pelaporan perkara di infoperkara tersebut," tukasnya. (Nop/Jurdilaga PTA Jambi)

KPTA Jambi Buka Secara Resmi Bimtek SIADPA Plus



Dari kiri, Wapan PTA Jambi, KPTA, Waka PTA Jambi dan Timnas SIADPA Plus

Jambi | PTA Jambi

Bimbingan Teknis SIADPA Plus PTA Jambi dengan tema Validasi Data Perkara dan Optimalisasi Pengelolaan Website Menuju Sistem Pelaporan Paper Less Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi, resmi dibuka oleh KPTA Jambi Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, Minggu malam (01/09/2013).

Dalam pembukaan Bimtek yang diselenggarakan di Muara Bulian Room, Wiltop Hotel Kota Jambi ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua PTA Jambi, Drs. H. M. Yamien Awie, SH., MH, Wakil Panitera PTA Jambi, Idris Latif, SH., MH, Wakil Sekretaris Meiradinata, S.Ag dan sejumlah pejabat struktural fungsional PTA Jambi.

Sebagai peserta, Tim Daerah SIADPA Plus menetapkan sebanyak 3 peserta dari masing-masing Pengadilan Agama di Wilayah PTA Jambi dan 3 peserta dari PTA Jambi. 3 peserta tersebut, masing-masing adalah Ketua Pengadilan Agama, Panmud yang menguasai SIADPA Plus dan operator.

Suasana Pembukaan Bimtek SIADPA Plus PTA Jambi

“Jumlah peserta sebanyak 33 peserta,” ujar Wakil Panitera PTA Jambi, Idris Latif, SH., MH yang juga selaku ketua Timda SIADPA Plus PTA Jambi dalam laporannya.

Dalam sambutannya, Ketua PTA Jambi meminta agar semua pimpinan peradilan agama di wilayah PTA Jambi untuk terus serius memantau dan memberikan semangat kepada para laskar SIADPA Plus PTA Jambi.

“Saya berharap kepada semua pimpinan PA untuk memperhatikan user, operator dan terus memberikan semangat kepada hakim, panitera pengganti agar terus belajar dan mengembangkan SIADPA Plus di satuan kerjanya masing-masing,” tegasnya.

Pemasangan Tanda peserta secara simbolis Orang nomor satu di PTA Jambi ini juga secara simbolis memasang tanda peserta kepada masing-masing Lindawati, S.Kom dari PA Sungai Penuh dan Ghozi, S.Ag.,MA, dari PA Kuala Tungkal. (Noprizal/Jurdilaga PTA Jambi)

<< PENGEMBANGAN SIADPA PLUS >>



Suasana Pembukaan Bimtek SIADPA Plus PTA Jambi

“Jumlah peserta sebanyak 33 peserta,” ujar Wakil Panitera PTA Jambi, Idris Latif, SH., MH yang juga selaku ketua Timda SIADPA Plus PTA Jambi dalam laporannya.

Dalam sambutannya, Ketua PTA Jambi meminta agar semua pimpinan peradilan agama di wilayah PTA Jambi untuk terus serius memantau dan memberikan semangat kepada para laskar SIADPA Plus PTA Jambi.

‘Saya berharap kepada semua pimpinan PA untuk memberhatikan user, operator dan terus mem-

berikan semangat kepada hakim, panitera pengganti agar terus belajar dan mengembangkan SIADPA Plus di satuan kerjanya masing-masing,” tegasnya.

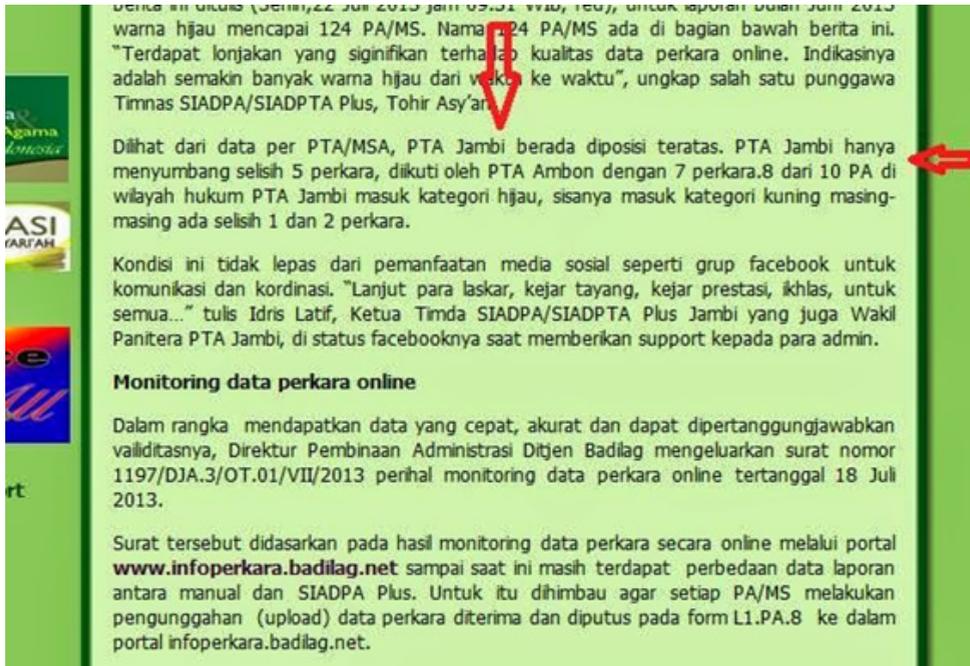
Orang nomor satu di PTA Jambi ini juga secara simbolis memasang tanda peserta kepada

masing-masing Lindawati, S.Kom dari PA Sungai Penuh dan Ghazi, S.Ag.,MA, dari PA Kuala Tungkal. (Noprizal/Jurdilaga PTA Jambi)



Pemasangan Tanda peserta secara simbolis

PTA Jambi Barada di Posisi Teratas



Jambi | pta-jambi.go.id

Berdasarkan berita yang dimuat di Badilag.net. Senin (22/7/2013) pukul 09.26 WIB dengan judul "Ini adalah 121 PA/MS yang Masuk Kategori Laporan Perakara Sangat Akurat", ternyata menempatkan PTA Jambi di urutan teratas.

Hal ini diketahui pada menu baru yang dipublikasikan sejak bulan Juni 2013 bernama laporan perbandingan yang berisi perbandingan data perkara antara rekap manual dengan data SIADPA Plus.

Dalam Berita tersebut dituliskan, "Dilihat dari data per PTA/MSA, PTA Jambi berada di posisi teratas, PTA Jambi hanya menyumbang selisih 5 perkara".

Bahkan, Timnas SIADPA Plus pun memuji gebrakan luar biasa Laskar SIADPA Plus PTA Jambi yang dikomandoi oleh Wakil Panitera PTA Jambi, Idris Latif, SH., MH.

Seperti dikutip di Badilag.net, bahwa posisi PTA Jambi yang berhasil menempatkan 8 dari 10 PA di wilayahnya merupakan salah satu hasil kerja keras dan pemanfaatan jejaring sosial facebook,

sebagai media komunikasi dan koordinasi.

Idris Latif, SH., MH, sebagai Ketua Timda SIADPA Plus, memang selalu berperan aktif, mengingatkan dan melihat perkembangan laskar SIADPA Plus di semua PA.

Bahkan keaktifannya juga dinilai luar biasa, lantaran sering kali ditemukan pria yang sedang melanjutkan studinya di program doktor Universitas Jambi ini mengingatkan dan memberikan instruksi kepada laskar SIADPA Plus di wilayah PTA Jambi pada dini hari via grup facebook Coffee Break Timda SIADPA Plus Jambi.

Sementara itu, Ketua PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Timda SIADPA Plus PTA Jambi. Menurut dia, laskar-laskar SIADPA Plus PTA Jambi yang berada di masing-masing PA sudah menunjukkan kinerja yang semakin baik dari waktu ke waktu.

"Ini adalah prestasi luar biasa, yang harus terus dipertahankan," ujarnya didampingi Wakil Ketua PTA Jambi Drs. H. M. Yamin Awie, SH., MH dan Pansek PTA Jambi, Drs. H. Pahri Hamidi, SH.

Gelar Bimtek, PTA Jambi Kokoh di Number One

PERBANDINGAN DATA PERKARA ANTARA REKAP MANUAL DAN DATA SIADPA PLUS SELURUH WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI Bulan: Agustus Tahun: 2013														
NO URUT	NAMA SATKER	REKAP MANUAL				DATA SIADPA PLUS				SELISIH				TINGKAT PERBEDAAN
		DITERIMA			PUTUS BULAN INI	DITERIMA			PUTUS BULAN INI	DITERIMA			PUTUS BULAN INI	
		SISA BLN LALU	BULAN INI	JUMLAH		SISA BLN LALU	BULAN INI	JUMLAH		SISA BLN LALU	BULAN INI	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PA. JAMBI	210	63	273	52	210	63	273	52	0	0	0	0	0
2	PA. KUALA TUNGKAL	43	25	68	20	43	25	68	20	0	0	0	0	0
3	PA. MUARA BUNGO	38	24	62	13	38	24	62	13	0	0	0	0	0
4	PA. MUARA SABAK	48	13	61	15	48	13	61	15	0	0	0	0	0
5	PA. SENGETI	36	22	58	10	36	22	58	10	0	0	0	0	0
6	PA. BANGKO	40	14	54	12	40	14	54	12	0	0	0	0	0
7	PA. SUNGAI PENUH	37	16	53	10	37	16	53	10	0	0	0	0	0
8	PA. MUARA TEBO	45	4	49	11	45	4	49	11	0	0	0	0	0
9	PA. MUARA BULIAN	31	16	47	6	31	16	47	6	0	0	0	0	0
10	PA. SAROLANGUN	21	12	33	3	21	12	33	3	0	0	0	0	0
TOTAL		549	209	758	152	549	209	758	152	0	0	0	0	0

Jambi | pta-jambi.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Jambi kembali memuncaki urutan teratas pada perbandingan data perkara antara rekap manual dengan dan data SIADPA Plus data total secara nasional.

Ada kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar PTA Jambi saat ini. Pasalnya di tengah-tengah pelaksanaan Bimbingan Teknis SIADPA Plus PTA Jambi yang diikuti oleh seluruh pimpinan PA sewilayah PTA Jambi, 1 orang panitera muda dan administrator SIADPA Plus ini diketahui bahwa Timda SIADPA Plus PTA Jambi berhasil kembali merebut posisi puncak para kategori tersebut.

“Up-date pada pukul 20.00 WIB, saat ini kita kokoh berada di urutan teratas,” ujar Wakil Ketua PTA Jambi, Drs. H. M. Yamien Awie, SH., MH, disela-sela pelaksanaan Bimtek SIADPA Plus PTA Jambi, Senin (2/9/2013) di Wiltop Hotel, Kota Jambi.

Dia menyebutkan, hingga saat ini tidak ada satu

pun selisih antara data manual dengan data SIADPA Plus.

“Ke depan saya berharap ini terus dipertahankan, karena saat ini hanya PTA Jambi yang tidak punya selisih data tersebut,” tegasnya.

Tidak hanya itu saja, Wakil Ketua PTA Jambi ini juga mengucapkan terimakasih kepada semua operator, administrator dan semua pimpinan PA di wilayah PTA Jambi yang telah bekerja keras sehingga mampu menempatkan PTA Jambi di urutan pertama.

“Terimakasih banyak, ini adalah berkat kerjasama, tanpa kerjasama yang baik, hasilnya tidak akan maksimal, dan ini semangat baru di awal bulan September, mari kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas,” ujarnya didampingi Ketua Timda SIADPA Plus PTA Jambi, Idris Latif, SH., MH. (Jurdilaga PTA Jambi)

PERBANDINGAN DATA PERKARA ANTARA REKAP MANUAL DAN DATA SIADPA PLUS DATA TOTAL SECARA NASIONAL Bulan: Agustus Tahun: 2013														
NO URUT	NAMA SATKER	REKAP MANUAL				DATA SIADPA PLUS				SELISIH				TINGKAT PERBEDAAN
		DITERIMA			PUTUS BULAN INI	DITERIMA			PUTUS BULAN INI	DITERIMA			PUTUS BULAN INI	
		SISA BLN LALU	BULAN INI	JUMLAH		SISA BLN LALU	BULAN INI	JUMLAH		SISA BLN LALU	BULAN INI	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PTA JAMBI	549	209	758	152	549	209	758	152	0	0	0	0	0
2	PTA AMBON	7	6	13	2	84	16	100	31	77	10	87	29	116
3	PTA MALUKU UTARA	24	16	40	13	138	21	159	14	114	5	119	1	120
4	PTA PALU	231	141	372	100	348	141	489	96	117	0	117	4	121
5	PTA JAYAPURA	134	54	188	32	251	109	360	68	117	55	172	36	208
6	PTA BENGKULU	153	107	260	63	336	170	506	119	183	63	246	56	302
7	PTA KUPANG	5	2	7	3	280	26	306	22	275	24	299	19	318
8	PTA PONTIANAK	472	207	679	159	700	310	1010	203	228	103	331	44	375
9	PTA BANGKA BELITUNG	29	28	57	17	276	130	406	83	247	102	349	66	415

Timnas Apresiasi Kinerja Timda SIADPA Plus PTA Jambi



Jambi | pta-jambi.go.id

Mohd. Anton Dwi Putra, SH, salah satu anggota Tim Nasional SIADPA Plus memberikan apresiasi kepada Tim Daerah SIADPA Plus PTA Jambi.

Hal itu diungkapkan langsung oleh pria yang akrab disapa Anton ini saat menjadi nara sumber pada Bimtek SIADPA Plus PTA Jambi.

Bahkan pria yang telah menjadi nara sumber Bimtek SIADPA di berbagai pen-

gadilan Tinggi Agama ini juga terlihat sangat puas lantaran tantangannya kepada semua Ketua PA yang menjadi peserta untuk membuka data validasi perkara Satkernya masing-masing mampu dilaksanakan oleh semua Ketua PA.

“Semua Ketua PA di wilayah PTA Jambi ini ternyata semuanya operator. Bukan hanya memerintahkan administrator untuk melaksanakan tugasnya seperti membuat PMH, namun semuanya mampu dan bisa,” ujarnya saat menyaksikan presentasi Ketua PA pada Bimtek SIADPA Plus PTA Jambi, Senin (02/09/2013).

Selain itu, dirinya juga menulis hal tersebut di grup Facebook Laskar SIADPA Plus. Hakim PA Kayu Agung ini meuliskan bentuk kepuasaannya usai menjadi nara sumber dan menyaksikan langsung hasil kerja keras dari Laskar SIADPA Plus PTA Jambi.



<< PENGEMBANGAN SIADPA PLUS >>

“Luar Biasa & Salutz !!!, Bisa menjadi saksi "go green" yg sebenarnya dr Laporan Perbandingan di wilayah PTA Jambi. Data yg diupload dan diinput pd 10 PA benar" sesuai dgn kondisi perkara di tiap" satker, tinggal penyempurnaan beberapa kekosongan di grafik kinerja dan sedikit penyempurna pada validasinya. Kapan bisa seperti mereka ya ??? “ tulisnya.

Mohd Anton Dwi Putra, SH melihat Ketua Pengadilan Agama sedang mempresentasikan validasi data perkara Laskar SIADPA Plus PTA Jambi hingga berita ini diturunkan masih bertengger di posisi puncak pada perbandingan laporan manual dan SIADPA Plus. Hal itu berkat dorongan yang kuat dari orang nomor satu di PTA Jambi, Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH, Wakil Ketua PTA Jambi, Drs. H. M. Yamien Awie, SH., MH, Pansek PTA Jambi Drs. H. Pahri Hamidi, SH dan Ketua Timda SIADPA Plus PTA Jambi, Idris Latif, SH., MH. (Noprizal/Jurdilaga PTA Jambi)

WKPTA Jambi: Semua Wajib Gunakan SIADPA



WKPTA Jambi, Drs. M. Yamien Awie, SH., MH.

Oleh karena itu sebutnya, dalam Bimtek SIADPA Plus PTA Jambi, semua pimpinan diwajibkan untuk hadir sebagai peserta.

“Semua ketua kami wajibkan untuk hadir menjadi peserta, agar semua kebijakan dari atas bisa langsung ditindaklanjuti di pengadilan tingkat pertama. Tidak ada alasan lagi, karena pada saat ini mulai dari pimpinan, panitera muda, hingga operator sudah ikut Bimtek” ujarnya.

Tidak hanya itu saja, menurut dia, untuk masa yang akan datang, sudah seharusnya Ketua Pengadilan Agama membuat PMH sendiri dengan menggunakan SIADPA Plus. “Panggil Admin jika masih ragu, agar tidak lagi operator yang membuat PMH. Begitu juga dengan ketua majelis, buat PHS nya sendiri dengan menggunakan SIADPA Plus,” pungkasnya. (Jurdilaga PTA Jambi)

Jambi | pta-jambi.go.id

Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita semuanya wajib menggunakan SIADPA Plus.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua PTA Jambi, Drs. H. M. Yamien Awie, SH., MH pada saat memberikan materi Bimbingan Teknis SIADPA Plus PTA Jambi yang diikuti oleh semua Pimpinan Pengadilan Agama, Panmud dan operator se-wilayah PTA Jambi, di Wiltop Hotel, Senin (2/9/2013).

Menurut dia, usai pelaksanaan bimbingan teknis ini, di wilayah PTA Jambi, dirinya berharap semua hakim, panitera pengganti, yang tidak menggunakan SIADPA Plus.

Semua KPA Ditantang Kroscek SIADPA Plus



Pimpinan pengadilan agama di wilayah PTA Jambi saat mempresentasikan Validasi data perkara di hadapan nara sumber dan peserta Bimtek SIADPA Plus PTA Jambi.

Pimpinan pengadilan agama di wilayah PTA Jambi saat mempresentasikan Validasi data perkara di hadapan nara sumber dan peserta Bimtek SIADPA Plus PTA Jambi.

PTA JAMBI - Semua ketua pengadilan agama di wilayah PTA Jambi ditantang oleh nara sumber Bimtek SIADPA Plus PTA Jambi, Mohd Anton Dwi Putra, SH, untuk membuka info perkara, dan meng-kroscek validasi data perkara.

Secara bergiliran, Ketua PA dibantu oleh administrator mempresentasikan dihadapan semua peserta Bimtek SIADPA Plus dan nara sumber dari Timnas SIADPA Plus.

Dikatakan Anton, kroscek ini dilakukan untuk memastikan validasi data perkara di SIADPA Plus. Menurutnya persoalannya bukan hanya hijau atau tidaknya, tapi

ada persoalan lain yaitu berhasil menyuguhkan data yang valid atau tidak.

Ke depan kata dia, hal ini patut terus diperhatikan validasi data perkara bisa terus disuguhkan.

“Semua lini harus menjadi operator, Ketua PA membuat PMH sendiri, dan ketua majelis membuat PHS sendiri, semoga ini bisa terus dipertakankan ke depan,” tukasnya.

Tepuk tangan tak pelak membuat riuh Muara Bulian Room, Wiltop Hotel, Kota Jambi saat presentasi usai dilakukan oleh masing-masing pimpinan pengadilan agama di wilayah PTA Jambi. (Jurdilaga PTA Jambi)

<< PENGEMBANGAN SIADPA PLUS >>





Pansek PTA Jambi, Drs. H. Pahri Hamidi, SH, saat memberikan Sambutan Ketua Panitia Dalam Biimtek Tata Persuratan



Dari Kiri : Wapan PTA Jambi, dris Latif, SH, MH, Wasek PTA Jambi, Meiradinata, S.Ag, dan Kasubbag Keuangan PTA Jambi, Yudhistira Adipinto, SE, pada kegiatan Bimtek Laporan Keuangan



Ketua PTA Jambi (Tengah) bersama unsur Muspida Provinsi Jambi



Foto Bersama Peserta dan Panitia Bimtek Tata Persuratan

Dua Jam Bersama Komisioner KPK, Bambang Widjojanto



(Catatan dari Sosialisasi/Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Aryaduta, Tangerang, 10-13 Juni 2013)

Oleh: Idris Latif, SH., MH

(Wakil Panitera PTA Jambi)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir 10 tahun yang lalu, seiring dengan adanya dorongan dan semangat perubahan yang mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menuju pemerintah yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Disisi lain adapula kritikan yang mendasar karena melemahkan fungsi lembaga yang telah ada selama ini dalam berbuat dan bekerja untuk memberantas korupsi seperti kepolisian dan kejaksaan. Namun polemik masalah batas kewenangan dan batasan tugas masing masing lembaga tersebut sudah diatur oleh undang undang sehingga batasan kewenangan, tugas atau keperluan kerjasama antara lembaga tersebut kini dan akan datang telah berjalan dengan baik, karena dimata penulis semua lembaga tersebut bercita cita menjadikan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kami tentu tidak membahas bagaimana titik singgung kerja KPK, Kepolisian dan Kejaksaan karena yang terpenting bagi rakyat Indonesia tidak ada lagi penyimpangan, tidak ada lagi uang negara

ini yang dinikmati oleh kelompok orang tertentu yang mempunyai kekuasaan untuk berbuat, dan tidak ada lagi seorang panutan masyarakat seperti seorang pejabat yang dielukan masyarakat ketika menjabat, namun di akhir jabatannya ia harus berurusan dengan masalah hukum dan ia harus dengan terpaksa menginap di hotel prodeo dan duduk di kursi pesakitan.

Sebuah ironi dan dilema yang ada di negeri ini, namun semua itu akan kembali kepada tujuan dari seseorang ketika ada kesempatan, situasi, peluang, apa tujuan untuk dikenang sebagai yang baik, dan di hujat sebagai yang terlupakan itu semua tentu kembali kepada cita-cita yang diselimuti dengan etika, moral yang baik, maka tentu akhir dan awalnya akan baik.

Masa 10 tahun KPK, kalau kita ibaratkan sebagai seorang anak anak yang berumur 10 tahun tentu telah berlari dan telah bisa membaca dengan lancar dan telah mengenal dan telah mempunyai cita-cita. Ia akan menjadi siapa, telah sangat banyak program yang akan dan diluncurkan KPK dalam

pengecahan perbuatan korupsi, mulai dari pembentukan kelompok anak muda yang bersinergi dengan KPK melalui pelatihan,

Setiap tahunnya kelompok anak muda ini selalu bertambah dan meluas yang akhirnya tercipta jaringan kerja (neetwork) sehingga pertumbuhan mental anak muda yang alergi akan korupsi terus berkembang, dan ketika mereka menjadi pemegang kekuasaan pada masa yang akan datang tentu ia akan anti dengan korupsi (Harapan Bambang Widjojanto) dan ada jalinan kerjasama antar lembaga dan pengiriman tenaga KPK ke luar negeri dalam usaha dan program KPK sesuai dengan Tupoksinya, dan tentu juga kita tidak menutup mata adanya kekuatan superboby KPK yang terfokus menangkap, menahan dan menghantarkan seseorang ke kursi pesakitan dan berakhir di hotel prodeo.

Kita berharap superboby KPK tidak hanya populer dalam segi penangkapan, menahan, namun ada cita cita yang lebih diharapkan adanya target pekerjaan yang menciptakan bagaimana perbuatan korupsi itu dipahami oleh hati nurani seseorang bahwa itu salah dan menyengsarakan rakyat, sahabat, keluarga, diri sendiri, malu, dan tertanan dalam hatinya Berani Jujur Hebat.

Saya sangat antusias ketika bertemu langsung pertama kali dengan Bambang Widodojanto, Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi, ketika ia duduk di kursi ruang tunggu sebelum acara, saya memberanikan diri untuk berjabat tangan dan saya menanyakan kabar dan kondisi kesehatan beliau dan langsung di jawab sehat selalu, tidak lama berselang acara Sosialisasi/Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang di Laksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertempat di Hotel Aryaduta Tangerang tanggal 10 sampai dengan 13 Juni 2014, dan Bapak Bambang Widjojanto mengisi bahan ajar Peran Pengawasan Internal Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Salah satu pencegahan untuk tidak berbuat merugikan dan merusak atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang bagi setiap orang. Aparatur negara, aparat

negara, pengusaha, politisi, birokrat, dan lain lain tentu adanya pengawasan internal yang dalam defenisinya dikenal dengan kegiatan assurance dan

konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi.

Oleh karena itu, audit internal (pengawasan Internal) membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui satu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk meng-evaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses governance, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pengawasan intren adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Selanjutnya KPK memberikan defenisi pengawasan Internal adalah kegiatan evaluasi independen dan objektif untuk memberikan rekomendasi dan konsultasi dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas pencapaian visi dan misi (Peraturan KPK Nomor: PER 02/P.KPK/ XI/ 2007 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; KMA/ 080/ SK/ VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2013 Tentang Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan dalam Lampiran 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/ 080/ SK/ VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2006 telah meberikan defenisi yang cukup komprehensif tentang beberapa pengawasan yaitu pengawasan internal, pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan rutin/reguler, pengawasan keuangan, dan telah memberikan pedoman yang cukup lengkap dengan beberapa ketentuan baik berbentuk surat keputusan, surat edaran, dan surat keputusan bersama seperti hal yang yang kita lihat kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Prilaku Hakim, maupun Kode Etik Panitera yang akan di setujui oleh Ketua Mahkamah Agung.

Beberapa ketentuan tersebut adalah mengatur tentang Pengawasan telah mencukupi segala aspek pekerjaan yang sudah tentu akan berujung kepada

pengendalian tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku (rule of game).

Lebih lanjut dari beberapa paparan yang disampaikan Bambang Widjojanto bukanlah hal yang baru dan semua itu telah disampaikan dalam kegiatan kegiatan bimbingan teknis oleh Badan Pengawasan Mahkamah

Agung Republik Indonesia dan tidak berlebihan kiranya apa yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap badan Peradilan dibawahnya dan hal itu telah terbukti Mahkamah Agung berada satu tingkat di bawah KPK dalam beberapa pencapaian kinerja dan termasuk bidang pengawasan.

Suatu hal yang menarik sebelum paparan bahan ajaran dimulai Bambang Widjojanto memutar beberapa film dalam durasi yang singkat dimulai dari seseorang yang tidak memiliki tangan dan kaki hidup sendiri dalam kesehariannya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak tergantung kepada orang lain, hidup dalam suasana enjoy tidak lemah dan turun mental dengan kekurangannya, dan itu memberikan motivasi dan inovasi karena dimanapun manusia berada dan dalam situasi apapun ia akan mampu berbuat yang terbaik bagi

diri dan lingkungannya, dan kemudian diputar lagi beberapa aranssement lagu yang penciptanya mempunyai kekurangan tidak bisa mendengar.

Beberapa tahun kemudian setelah penciptanya meninggal lagu tersebut dipergarkan dalam satu pertunjukan seni dan lagu tersebut mendapat penghargaan tert-

inggi di dunia musik, dan tidak hal yang tidak mungkin untuk dilakukan untuk sebuah kebaikan dan sebuah ketaatan terhadap suatu ketentuan yang menguntungkan orang lain maupun diri dan lingkungan.

Kita diharuskan mengembangkan beberapa inovasi dan perubahan perilaku dalam pengawasan, dan pengembangan itu pula yang akan membuat kita lebih mudah memahami dan lebih mudah untuk menuju apa yang di inginkan kelompok maupun negara, terakhir kata Bambang Widjojanto kembali semua itu kepada hati, bicaralah dengan hati, dan tiada satupun kebenaran yang ada yang kita miliki kalau semua itu datang dari kata hati, semoga kata hati itu akan menjadi modal bagi kita untuk menjadi yang lebih baik dan untuk Peradilan Indonesia yang Agung.



Jurdilaga, Bayi Mungil Dari Jambi



(Rekomendasi Rakerda PTA Jambi 2012)

Oleh: Noprizal, S.HI *

Jurnalis Peradilan Agama (Jurdilaga) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jambi, merupakan bayi mungil yang baru saja dilahirkan. Rakerda PTA Jambi merupakan rumah sakit yang membantu Jurdilaga turun ke bumi.

Dengan dukungan penuh dari Ketua, Wakil, Hakim Tinggi, Pansek, Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris PTA Jambi, maka lahirlah sosok bayi mungil yang diberi nama Jurdilaga, Jurdilaga yang dilahirkan pada tanggal 22 November 2012 ini mendapat tempat dan memperoleh perhatian khusus dari semua pimpinan Peradilan Agama di wilayah PTA Jambi. Hal ini dibuktikan dengan dukungan penuh dari semua pimpinan pengadilan tingkat pertama di wilayah PTA Jambi, sehingga Jurdilaga dimasukkan dalam rumusan Rakerda PTA Jambi 2012.

Dengan demikian, Jurdilaga kini resmi berdiri. Meski umur masih dalam hitungan hari, hal itu tak membuat Jurdilaga takut berkarya. Jurdilaga berharap selalu mendapatkan tempat di hati pembaca di lingkungan Peradilan Agama.

Jurdilaga PTA Jambi merupakan wadah berkumpulnya para jurnalis di seluruh pengadilan tingkat pertama di wilayah PTA Jambi. wadah

bertukar pikiran, dan juga wadah bertukar informasi. Baik mengenai tata cara penulisan berita, artikel, hingga ke persoalan-persoalan lainnya yang dianggap penting untuk didiskusikan.

Jurdilaga PTA Jambi selaku lembaga Jurnalis Peradilan Agama pertama di Indonesia ini dalam beberapa waktu ke depan, tentunya masih sangat mengharapkan banyaknya sumbangsih pemikiran dari semua pihak, terutama para Crew Jurdilaga di Pengadilan Agama di wilayah PTA Jambi.

Lahirnya Jurdilaga, juga memastikan adanya format baru di Website resmi PTA Jambi. Website resmi PTA Jambi akan menambahkan menu khusus untuk berita seputar Peradilan Agama di wilayah PTA Jambi. Penambahan menu tersebut bertujuan untuk mempercepat publikasi berita-berita yang dikirimkan oleh Pengadilan Agama di wilayah PTA Jambi, sembari menunggu antrian panjang di badilag.net yang terkadang memaksa para crew Jurdilaga di wilayah PTA Jambi harus menunggu hingga lebih dari satu minggu untuk satu publish berita.

Menumbuhkembangkan Semangat Menulis
Menumbuhkan semangat menulis memang tidak gampang, apalagi bagi yang tidak memiliki hobi

yang satu ini. Tapi, tidak hobi bukan berarti tidak bisa. Semuanya bisa dipelajari asalkan memang ada niat yang tulus dari hati.

Hal ini juga dialami oleh sejumlah penulis pemula, tidak memiliki ide dan bahan penulisan. Namun berkat ketekunan dan kesungguhan, dunia tulis-menulis ini akan mengantarkan kita pada titik puncak, yang dikatakan oleh sebagian penulis "Jangan

Tinggalkan Pena Mu". Jika sudah sampai ke tingkatan itu, maka tidak akan ada lagi kekhawatiran dibenak penulis. Bahkan yang muncul hanyalah candu dari bahasan dan ide yang selalu berdatangan.

Ditengah tingginya tuntutan Peradilan Agama terhadap informasi publik, tidak pula terlepas dari informasi-informasi yang seharusnya diketahui oleh semua aparat peradilan di seluruh penjuru membuat penulisan informasi di website resmi Peradilan Agama menjadi sangat penting.

Oleh karena itu penulis sangat berharap agar aparat peradilan agama, untuk menumbuhkan semangat menulis. Dengan aktif menulis, bukan berarti kita mengenyampingkan bahan bacaan, melainkan akan kian mendekatkan kita kepada bahan bacaan, dan akan selalu membuat kita haus akan bahan bacaan itu sendiri.

Lantas kenapa menulis itu penting? karena dengan menulis kita otomatis berpikir, bagaimana caranya untuk menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Tapi

bukan berarti kita harus menjadi seseorang yg puitis atau mengerti politik.

Menulis juga bukan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Hanya saja penulis selalu dianggap merupakan sosok yang luar biasa. Dalam tulisan yang dibuatkan oleh seorang penulis ada beberapa unsur penting, salah satunya ialah tujuan penulisan itu sendiri. Dari tujuan penulisan yang ditulis, ada harapan dari penulis yaitu isi dari tulisannya mampu dipahami oleh para pembaca. Tulisan merupakan cerminan serta aktualisasi seseorang dalam mengekspresikan dirinya lewat tulisan. Tidak semua orang menyenangi tulisan, ada yang menyenangi namun masih terdapat hambatan di-

antaranya merasa kebingungan dalam mengartikan atau memahami sebuah tulisan.

Ada tips yang sangat penting, bagi para Crew Jurdilaga PTA Jambi, agar mampu menelurkan karya tulis yang mudah dipahami oleh pembaca. Tips yang dimaksud penulis adalah memperbanyak referensi, baik referensi bacaan, maupun pengetahuan lainnya.

Jika tips ringan dengan muatan yang sangat berat tersebut mampu dilakukan maka bisa dipastikan karya tulis dari Crew Jurdilaga PTA Jambi bersaing dengan penulis-penulis lainnya.

Jangan Takut Memulai

Kemampuan menulis warga Peradilan Agama di Wilayah PTA Jambi relatif sama, hal itu bisa dibuktikan dengan diraihnya berbagai gelar sarjana yang menempel lengket pada nama lengkap para aparat. Tak akan diraih gelar sarjana tersebut tanpa ada karya ilmiah yang dituliskan, baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Hanya saja, saat ini tinggal mengasah kemampuan itu kembali. Ada lagi persoalan yang biasanya menghantui para penulis pemula, yaitu rasa takut salah, persoalan serius ini harusnya sama-sama kita perangi.

Ketika ketakutan itu mulai merayap di benak maka harus siap melawannya. Maka oleh karena itu. "MULAILAH MENULIS SEKARANG". Tidak perlu merasa risih atau apapun juga ketika kita kembali membaca tulisan tersebut atau mungkin dibaca oleh orang lain.

Salah satu modal utama untuk mengasah kemampuan menulis adalah dengan cara banyak membaca. Membaca apa saja yang kita minati kemudian berusaha untuk membuat rangkuman atau catatan-catatan penting dari apa yang kita baca. Kalau kita hanya sekedar membaca tetapi tidak mengikat kembali pengetahuan atau informasi yang kita baca tersebut maka kita tidak akan memperoleh apa-apa. Artinya deretan huruf yang tersaji di depan mata itu semua akan berlalu begitu saja tanpa ada kesan apa-apa.

Apabila aktivitas membaca sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok seperti halnya kita makan dan minum kemudian diiringi dengan aktivitas menulis maka diharapkan ilmu pengetahuan kita akan semakin bertambah dan akan mempunyai

nilai manfaat yang luar biasa karena bisa menjadi pemicu semangat khususnya bagi diri sendiri dan pada umumnya untuk orang lain yang mau membaca tulisan kita.

Tidak ada ceritanya kemampuan menulis itu datang dengan tiba-tiba atau seperti sulapan tetapi semuanya membutuhkan proses dan waktu yang lama. Cobalah kita perhatikan seorang bayi, dia adalah pelajar yang sempurna, dari saat awal kelahiran sampai bisa berjalan, berbicara, dan sebagainya. Maka kita bisa mengambil suatu pelajaran berharga dari seorang bayi yang tidak mengenal kata menyerah untuk selalu belajar setiap saat sehingga kita bisa mengamati berbagai perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh sang bayi. Pertanyaannya adalah "Apakah kita tidak mau belajar dari semangatnya sang bayi?". Tentu semua akan menjawab, malu rasanya apabila kita sebagai orang dewasa tidak mempunyai semangat seperti

bayi yang selalu belajar setiap waktu

Oleh karena itu di setiap kesempatan yang ada, kita harus selalu berusaha untuk menulis dan menulis agar ilmu kita tidak menjadi beku bahkan bisa hilang karena tidak pernah digunakan atau diasah. Maka beruntunglah kita yang mempunyai kesempatan juga fasilitas untuk bisa menulis dengan baik. Modal yang luar biasa itu hendaknya digunakan semaksimal mungkin demi terwujudnya pribadi yang gemar menulis.

**Penulis adalah salah satu inisiator berdirinya Jurdilaga PTA Jambi, aktif menulis untuk beberapa media cetak dan online di Provinsi Jambi, serta merupakan mantan wartawan Jawa Pos Grup.*

Note: Artikel ini dengan judul yang sama, telah dipublish di website Resmi PTA Jambi pada tanggal 27 November 2012.



Foto bersama Kru Jurdilaga Sewilayah PTA Jambi di depan Kantor Harian Jambi Ekspres

Mendiskusikan kembali Contempt of Court di Indonesia



Oleh: Doni Dermawan
(Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak)

Pengantar

Akhir-akhir ini beberapa rekan hakim di jejaring sosial ramai memperbincangkan ide tentang pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Contempt of Court di Indonesia. Ide ini menurut penulis adalah suatu hal yang sangat signifikan untuk ditindaklanjuti karena berkaitan dengan salah satu perwujudan dari pembentukan kekuasaan kehakiman yang mandiri, berwibawa dan bermartabat.

Kendati, ide ini telah lama mencuat di kalangan akademisi, namun penerapannya masih belum signifikan karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Contempt of Court ini. Untuk Indonesia, istilah Contempt of Court ini sendiri untuk pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4. Dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 diisyaratkan perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur tentang ancaman hukuman dan penindakan pemidanaan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan pejabat peradilan.

Dalam perjalanannya, ketentuan Contempt of

Court yang terdapat dalam penjelasan UU No. 14 tahun 1985 tersebut tidak sesuai dengan harapan, karena tidak ada tindak lanjut dan pengaturan yang lebih konkrit tentang Contempt of Court tersebut. Padahal ide pembentukan Undang-undang tentang Contempt of Court ini, juga menjadi bagian dari kebijakan hukum tahun 2002 sebagaimana yang diamanahkan oleh UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Namun kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan, karena sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang contempt of court tersebut belum juga bisa diwujudkan.

Pengertian dan Ruang Lingkup Contempt of Court

Secara kebahasaan, Contempt of Court dapat dipahami sebagai tindakan melanggar, menghinia dan memandang rendah lembaga peradilan. Dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa yang dimaksud dengan contempt of court adalah:

“Contempt of court is any act which is calculated to embarass, hinder, or obstruct court in administration of justice, or which is calculated to lessen its authority or its dignity . (Suatu perbuatan yang

dipandang memperlakukan, menghalangi, atau merintangi pengadilan dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya)".

Definisi di atas memberikan pemahaman bahwa, diskursus tentang contempt of court tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dapat mengurangi wibawa dan martabat peradilan. Perbuatan yang dimaksud, tidak saja berkaitan dengan tindakan tingkah laku tetapi juga mencakup dengan sikap atau ucapan yang dapat menjatuhkan wibawa, martabat dan kehormatan badan peradilan .

Pengaturan tentang Contempt of Court dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan berjalan tanpa rongrongan dari berbagai pihak, antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, mass media, maupun pejabat pengadilan itu sendiri. Pengaturan tentang contempt of court merupakan upaya hukum untuk membela kepentingan umum dan supremasi hukum agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil, tanpa diganggu, dipengaruhi atau dirongrong oleh pihak-pihak lain, baik selama proses peradilan berlangsung di pengadilan maupun diluar gedung pengadilan.

Berkaitan dengan pengaturan contempt of court ini, dalam Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4, disebutkan bahwa:

"Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court".

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa, ada dua aspek penting yang menjadi objek pengaturan contempt of court ini, yaitu:

1. Internal Lembaga peradilan

Adapun yang berkaitan dengan lembaga peradilan ini adalah:

a. Orang-orang yang menggerakkan lem-

baga peradilan;

b. Proses kegiatan dari pada lembaga peradilan

c. Hasil dari proses kegiatan lembaga peradilan;

Terkait dengan aspek internal lembaga peradilan di atas, contempt of court mengatur bagaimana sikap setiap orang secara individual atau secara berkelompok terhadap kewibawaan, martabat dan kemandirian lembaga peradilan. Setiap orang tersebut, tidak hanya terbatas pada pencari keadilan, terdakwa, penasehat hukum, saksi, pers atau orang yang hadir dalam persidangan, tetapi juga mencakup aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim.

Karena selanjutnya, tindakan contempt of court ini juga akan berpengaruh terhadap proses kegiatan daripada lembaga peradilan serta hasil yang diperoleh dari proses kegiatan itu sendiri.

2. Eksternal Lembaga Peradilan

a. Tindakan;

b. Tingkah laku; dan

c. Sikap atau ucapan

Apakah dengan perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan saja sudah dapat dikatakan sebagai Contempt of Court? Perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan yang dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman (independence of judiciary), sikap-sikap tersebut dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau yang diistilahkan dengan contempt of court. Sementara itu Menurut Andi Hamzah & Bambang Waluyo:

"...pengertian perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan itu tidak saja harus diartikan aktif, tetapi dapat pula bersifat pasif atau tidak berbuat, namun akibatnya dapat merendahkan, merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Misalnya dengan sengaja tidak menuruti perintah pejabat menurut undang-undang (Pasal 216 KUHP), atau tidak memenuhi panggilan hakim sebagai saksi (Pasal 224 KUHP), dan sebagainya. "

Oemar Seno Adjie berpendapat bahwa perbuatan contempt of court ditujukan terhadap ataupun berhadapan dengan administration of justice, rechtpleging (jalannya peradilan). Yang secara umum dikategorikan menjadi :

1. Misbehaving in court; merupakan perbuatan atau tingkah laku yang secara tidak tertib, memalukan, atau merugikan, mengganggu jalannya proses peradilan yang seharusnya dari pengadilan. Pelanggaran jenis ini dapat berbentuk penghinaan terhadap hakim, pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi, tidak mau berdiri ketika majelis hakim memasuki ruang pengadilan ataupun penasehat hukum yang tidak menunjukkan sikap hormat terhadap pengadilan.

2. Disobeying a court order; terjadi apabila perbuatan yang seharusnya dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh seseorang yang diperintahkan ataupun diminta oleh pengadilan dalam menjalankan fungsinya tidak dapat dipenuhi oleh seseorang yang diperintahkan itu. Hal ini secara analogi juga dapat dikenakan terhadap Putusan yang seharusnya dijalankan oleh orang, badan hukum perdata bahkan badan hukum publik (badan/pejabat tata usaha negara) yang tidak melaksanakan putusan pengadilan.

3. The sub judice rule; suatu aturan umum (general rule) yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan publikasi untuk mencampuri peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk suatu kasus yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan. Hal ini dapat dihindari apabila dalam mengadakan pemberitaan atau komentar itu dilakukan secara wajar dan tidak memihak yang merupakan hasil investigasi yang akurat (fair and accurate reporting). Oleh karena itu, untuk menghindari adanya trial by the press dalam pemberitaan dan komentarnya, media massa seharusnya tidak memuat pemberitaan yang bersifat mendahului (prejudicial) atau memberikan ilustrasi yang menggambarkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak mempunyai kesalahan sama sekali sebelum adanya keputusan yang pasti.

4. Obstructing justice; berbentuk penentangan terhadap perintah pengadilan secara terbuka maupun penyuaipan terhadap saksi atau mengancam saksi agar tidak memberikan keterangan ataupun memalsukan keterangan yang diberikan.

5. Scandalizing the court; Ruang lingkup contempt by scandalizing the court meliputi tuduhan yang secara langsung ditujukan pada hakim tertentu atau pejabat pengadilan dan kritik-kritik terhadap keputusan dari pengambil keputusan. Jadi, ruang lingkup contempt by scandalizing the court tidak hanya ucapan atau kata-kata yang dapat menurunkan atau merendahkan martabat hakim atau pengadilan tetapi meliputi pula kritik atau pernyataan yang dapat mempengaruhi proses peradilan pada masa yang akan datang.

Jenis contempt of court yang kerap terjadi dan dilakukan terhadap Pengadilan di masa sekarang dengan merujuk pada pengkategorian dari Oemar Seno Adjie tersebut di atas adalah jenis disobeying a court order, the sub judice rule dan scandalizing the court. Hal ini mungkin muncul seiring dengan era kebebasan berkumpul & berpendapat dari segala lapisan masyarakat, juga sebagai akibat langsung dari masa reformasi yang langsung atau tidak, meniadakan sekat-sekat pembatas opini, kebebasan pers sekaligus ajang unjuk gigi dan kekuatan antar kelompok bahkan antar lembaga negara.

Urgensi Penerapan Contempt of Court: Tinjauan Sosiologis

Dalam kajian ilmu sosiologi hukum disebutkan bahwa tinjauan sosiologis terhadap hukum berkaitan dengan pola-pola perilaku (hukum) masyarakat dan hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial budaya. Artinya, pendekatan sosiologi hukum berupaya menelaah sistem hukum dan perkembangan masyarakat serta perilaku masyarakat tersebut dalam sistem hukum yang ada.

Berkaitan dengan diskusi tentang keurgenan penerapan contempt of court di Indonesia, secara sosiologis dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kelembagaan peradilan dan aspek kemasyarakatan. Dari segi aspek kelembagaan peradilan, dapat dipahami bahwa sebagai puncak dari keadilan, lembaga peradilan sudah seyogyanya dijaga kehormatan, martabat, kewibawaan dan independensinya. Oleh karena pentingnya menjaga kehormatan, martabat, kewibawaan dan independensi lembaga peradilan tersebut, maka diperlukan pengaturan contempt of court.

Memang dikalangan ahli hukum di Indonesia masih terdapat perbedaan pandangan tentang perlu atau tidaknya pengaturan contempt of court secara khusus. Namun penulis berpendapat bahwa, pengaturan contempt of court yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP belum mengatur secara komprehensif tentang contempt of court tersebut.

Dari aspek kemasyarakatan, dapat dilihat bahwa perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini sangat mendesak dibentuknya pengaturan khusus tentang contempt of court. Bahkan yang ironinya, konsep Contempt of Court di masa sekarang, berada pada titik yang sangat absurd dan kurang jelas. Konsep yang menjiwainya sering dikaburkan dan dikonfrontasikan dengan prinsip transparansi, kontrol yudisial maupun kebebasan mengeluarkan pendapat atas nama demokrasi dan reformasi. Regulasi Contempt of court yang pada mulanya merupakan konsep untuk mencegah dipengaruhi dan diintervensinya peradilan, semakin bergeser dan ditepikan oleh ide kontrol terhadap kekuasaan kehakiman, baik yang terlembagakan secara formal, maupun oleh publik dan masyarakat umum secara langsung.

Selain itu, dari beberapa kasus yang terjadi selama ini, seringkali terjadi penistaan/penghinaan terhadap pengadilan yang tidak hanya dalam perkara yang mendapatkan perhatian dari publik, tetapi juga pada kasus-kasus kejahatan biasa, bahkan terjadi pada kasus perdata. Bentuk-bentuk penghinaan/pelecehan tersebut beragam, seperti membuat gaduh atau demonstrasi di ruang sidang pengadilan, lempar sandal, lempar telur, lempar uang di pengadilan, membakar sarana gedung pengadilan, melontarkan ejekan, atau melecehkan dan mencaci maki hakim, sampai bentuk kekerasan secara fisik, seperti pemukulan, penusukan, dan pembunuhan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berasumsi bahwa perlu dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang contempt of court, karena dari beberapa fakta sosiologis, dapat diketahui bahwa seringkali terjadi tindakan yang merongrong kewibawaan, kehormatan, independensi dan martabat lembaga peradilan. Oleh karena itu dalam pengaturan contempt of court harus juga dijelaskan batasan-batasan yang

dapat dikategorikan sebagai tindakan contempt of court.

Penutup

Kendati masih banyak yang pro dan kontra mengenai pembentukan UU Contempt of Court, tetapi Penulis sendiri berpendapat bahwa sangat urgen sekali dibentuk UU tentang contempt of court tersebut. Karena pengaturan contempt of court yang terdapat dalam KUHAP, KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya, belum-lah mencakup seluruh tindakan yang berkaitan dengan contempt of court. Masih banyak tindakan-tindakan lainnya yang sebenarnya bias masuk dalam kategori contempt of court.

Laporan Sebagai Instrumen Pengawasan



(Rilis Penilaian Laporan Perkara Juli 2013)

Oleh: Idris Latif, SH., MH
Wakil Panitera PTA Jambi

Laporan disebut sebagai keterangan atau informasi tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Fakta yang diinformasikan itu berkaitan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada suatu lembaga/instansi.

Fakta yang dilaporkan berdasarkan keadaan obyektif yang dialami sendiri (dilihat, didengar, dirasakan sendiri) dan merupakan hasil dari pekerjaan yang telah di selesaikan atau pekerjaan yang akan di kerjakan;

Laporan adalah bagian dari unsur yang penting dalam pelaksanaan pengawasan, penelitian tentang laporan secara terus menerus telah merupakan koreksi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga atau instansi, juga merupakan bagian dari tugas manajemen dalam sebuah kelompok kerja yang dijalankan oleh beberapa orang manusia untuk mencapai tujuan dengan berpedoman kepada peraturan peraturan atau hasil keputusan yang dikeluarkan oleh pembuat keputusan;

A. Fungsi laporan antara lain:

1. Memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan.

2. Memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah.

3. Merupakan sumber informasi dan

4. Merupakan bahan untuk pendokumentasian.

B. Tujuan laporan, antara lain:

1. Mengatasi suatu masalah,

2. Mengambil suatu keputusan yang lebih efektif.

3. Mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah.

4. Mengadakan pengawasan dan perbaikan.

5. Menemukan kebijakan baru yang bersifat teknis-teknis baru.

Dalam Buku Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Cetakan ketiga Tahun 2007 memberikan rumusan Tentang Laporan sebagai berikut;

Pasal 39 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) mengatur Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah

Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakuka Mahkamah Agung

Ayat (2) mengatur selain Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;

Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung secara komprehensif meliputi tugas pokok dan fungsi pengadilan yang berada di bawahnya, selanjutnya untuk lebih efektifnya pengawasan, maka Mahkakamh Agung memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung di daerah, atas hal tersebut Pengadilan Tingkat Banding membentuk Tim Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang membantu Ketua Tingkat banding dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi sebagai pengawas adalah koordinator Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah merilis peringkat laporan perkara yang di kirim oleh Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi setiap bulan, maka laporan tersebut di teliti satu persatu angka demi angka atau huruf demi huruf karena kasalahan dalam menulis angka tanggal, bulan, tahun, maka ber-akibat salahnya informasi yang diberikan, dan juga akurasi data yang di perlukan dari laporan bisa menimbulkan multitafsir terutama oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang;

Laporan yang di kirim oleh Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi, mempunyai nilai kinerja yang utama, terutama kinerja pimpinan, kinerja hakim, kinerja Panitera, Paniera Pengganti, dan kinerja kepanitraan dan staf pembuat laporan;

Kebijakan telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang berhubungan dengan peningkatan kinerja dan pengirimam laporan baik dalam setiap Rapat koordinasi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Hakim Tinggi, Panitera Pengadilan Tinggi Agama jambi, Ketua Pengadila Agama dan Panitera Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Bimbingan Tekhnis Kepanitraan dan Rapat Kerja Daerah selalu di sampaikan agar pengiriman laporan tepat waktu, dan pem-

buatan laporan harus benar dan tepat, dan laporan harus bisa menggambarkan fakta fakta yang jelas, sebab laporan yang menjadi alat pengawasan setiap saat oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi terhadap Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Bulan Juli 2013 Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengumumkan peringkat dari Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam pengiriman laporan sebagai berikut;

1. Peringkat pertama Pengadilan Agama Kuala Tungkal
2. Peringkat kedua Pengadilan Agama Sengeti;
3. Peringkat ke tiga Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Peringkat ke empat Pengadilan Agama Jambi;
5. Peringkat ke lima Pengadilan Agama Muara Bulian;
6. Peringkat ke enam Pengadilan Agama Muara Sabak;
7. Peringkat ke Tujuh Pengadilan Agama Bangko;
8. Peringkat ke delapan Pengadilan Agama Muara Bungo;
9. Peringkat ke Sembilan Pengadilan Agama Sarolangun;
10. Peringkat ke sepuluh Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Faktor yang di nilai adalah sebagai berikut;

- Pengiriman laporan ke pengadilan Tinggi Agama Jambi diterima paling lambat setiap tanggal 5 setiap bulannya;
- Laporan yang di kirim harus lengkap;
- Kerapian dalam penjilidan laporan;
- Setiap laporan yang di kirim setelah di periksa, diteliti, tidak ditemui kesalahan, dalam pengetikan;
- Ke-akuratan data dalam meng- up-load di Info perkara dalam siadpaplus dan sesuai atau cocok dengan laporan manual;
- Penilaian dalam Up-date putusan;

Narkoba dan Korupsi Ternyata Satu Ibu (Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia)



Oleh : Noprizal, S.HI *

Narkoba sepertinya sangat dekat dengan aparat Peradilan. Siapa yang bisa menyangkal kalimat di atas? Tentunya semua bisa mengatakan tergantung pada orangnya.

Melakukan tindakan melawan hukum seperti itu, tentunya bukan hanya karena memiliki niat. Selain ada kesempatan, juga karena wewenang dan kekuatan yang melekat pada si pelaku.

Setelah tertangkapnya hakim Pudji Widjayanto beberapa waktu yang lalu, kini giliran dua orang pegawai Pengadilan Negeri (PN) Tangerang yang ditangkap aparat kepolisian. Tertangkap akibat kedatangan sedang pesta sabu, tentunya bukan prestasi menarik bagi aparat penegak hukum, melainkan mencoreng nama baik diri sendiri dan institusi.

Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa alat penghisap sabu (bong). Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikhwanto pun menyebutkan bahwa kedua pelaku ditangkap di Jalan Veteran atau tepatnya di belakang Lapas Wanita, Tangerang, Selasa (27/11) sekitar pukul 17.00 WIB.

Selain seperangkat alat hisap sabu (bong), polisi juga menyita barang bukti lainnya berupa dua buah plastik bekas bungkus sabu dan satu buah korek api. Saat menjalani pemeriksaan, kedua pelaku mengaku mendapat barang haram tersebut dari tangan ST yang tidak lain merupakan petugas Polresta Kabupaten Tangerang. Akhirnya ST pun

diringkus aparat.

Musnahkan Oknum Penikmat Barang Haram

Pasca ditangkapnya Hakim Pudji beberapa waktu yang lalu, Mahkamah Agung (MA) sepertinya tidak mengeluarkan perintah untuk melakukan uji bebas narkoba untuk seluruh hakim dan pegawai MA di seluruh Indonesia.

Seperti pada tulisan sebelumnya dengan judul “Uji bebas Narkoba untuk Hakim” yang dipublish di Badilag.net pada tanggal 23 Oktober 2012 lalu <http://badilag.net/artikel/13090-uji-bebas-narkoba-untuk-hakim-oleh-noprizal-shi--2310.html> dan Website Resmi PTA Jambi, penulis sudah menyebutkan betapa pentingnya dilakukan uji bebas narkoba di lingkungan Mahkamah Agung agar dapat dilakukan pemetaan dan angka yang pasti keterlibatan oknum-oknum peradilan.

Meski demikian, tidak terdengar sedikitpun adanya instruksi tegas dari atasan untuk melaksanakan hal itu. Kita melihat kondisi yang terjadi saat ini. Jika kasus ini terhenti sampai pada hakim Pudji, maka berbanggalah semua aparat peradilan di Indonesia ini. Dalam artian, aparat peradilan semuanya dalam kondisi bersih tanpa ada pengaruh Narkoba sedikitpun. Namun ternyata pasca tertangkapnya hakim Pudji, kasus serupa kembali terjadi di institusi yang kita banggakan ini.

Semua aparat peradilan akan pasti menolak kasus ini menjadi stigma negatif lembaga yang menaungi 4 lembaga peradilan ini. Namun, mau

atau tidak, lembaga ini sudah dikotori oleh oknum yang berada di dalamnya sendiri.

Penulis tentunya masih sangat berharap adanya langkah serius untuk mengantisipasi hal ini. Salah satu caranya adalah dengan melakukan uji bebas narkoba. Tujuan pelaksanaan uji bebas narkoba ini adalah untuk dapat mendapatkan angka yang pasti keterlibatan penggunaan narkoba di lingkungan Mahkamah Agung, apapun sanksi yang akan didapat, itu sudah merupakan buah dari apa yang sudah ditanam selama ini.

Pandangan Negatif Pencari Keadilan

Selaku aparat peradilan, suatu keniscayaan untuk tetap menerima ejekan bahkan pandangan negatif kepada institusi MA, kita juga tidak bisa mengatakan mereka berlebihan, pasalnya sejauh ini kita juga tidak mampu untuk membuktikan kalau institusi ini bebas Narkoba.

Tidak pula salah pencari keadilan meragukan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh para hakim saat ini, dengan alasan adanya kemungkinan hakim yang bersangkutan sedang berada dalam pengaruh Narkoba.

Dikutip dari Rakyat Merdeka, Kepala Deputy Pemberantasan Narkoba BNN, Benny Mamoto, menyebutkan bahwa jika tidak segera dilakukan uji bebas narkoba, maka hakim pemakai narkoba bisa mempengaruhi putusannya saat menangani perkara.

Untuk menghindari hal itu, tidak ada salahnya, sebagian dari pendapatan kita yang diberikan oleh Negara menjadi penyelamat dan kekuatan untuk mengharumkan kembali nama baik yang disandang. Jika ada instruksi dari atas, maka bawahan tidak akan mungkin menolak untuk melakukan uji bebas narkoba, dan di setiap satker yang aparaturnya bersih dari pengaruh narkoba bisa memasang spanduk atau bentuk media lainnya yang menyatakan bahwa satker tersebut bebas narkoba, luar biasa bangganya.

Bukan hanya itu saja, walaupun tidak dilaksanakan secara terbuka, dengan penjadualan atau cara lainnya. Ada beberapa cara lain yang dipandang sangat efektif yakni Sistem acak per pengadilan, dan tidak diketahui kapan akan dilaksanakan. Tidak hanya shock terapi yang akan didapat, melainkan juga merupakan bentuk paling tepat untuk memusnahkan pemakai narkoba dari lembaga yang agung ini.

Patut Menjadi Perhatian Khusus

Membangun institusi yang bebas dari penyalahgunaan narkoba harus didasarkan pada pencermatan terhadap karakteristik pengguna narkoba sekaligus tindakan yang melatarbelakanginya.

Menurut analisis Dr. Graham Blaine (psikiater), penyebab seseorang mengkonsumsi narkoba tidak hanya berasal dari keinginan individu itu sendiri akan tetapi juga berasal dari lingkungan sekitarnya.

Semuanya itu jelas akan memburamkan masa depan keluarga, masyarakat dan bangsa termasuk masa depan instusi itu sendiri. Logika yang dapat ditarik sangat sederhana. Oknum yang menyalahgunakan narkoba sudah menjadi generasi yang rusak dan sulit dibenahi.

Tubuhnya tidak lagi fit dan fresh untuk bekerja sebagai abdi Negara, sementara mentalnya telah dikotori oleh niat buruk untuk mencari cara mendapatkan barang yang sudah membuatnya kecanduan. Bila sudah demikian, apa yang dapat diharapkan dari mereka?

Selanjutnya dan beberapa studi yang pernah dilakukan, karakteristik pengguna narkoba biasanya adalah orang-orang yang "bermasalah". Bermasalah disini artinya memiliki beban mental/kejiwaan yang menurut mereka sangat berat dan sulit untuk ditanggug.

Misalnya terlalu sering dimarahi, tidak disukai lingkungan, merasa bersalah karena sesuatu, bercerai, tidak mendapat kasih sayang, prestasi jelek, merasa diremehkan teman yang membuat sakit hati, merasa kurang percaya diri dan sebagainya. Keinginan yang besar ini sedikit banyak dipengaruhi oleh sedikitnya pengetahuan mereka tentang narkoba, membuat mereka rapuh dan terjebak dalam lingkaran yang menghancurkan.

Lantas Apa Hubungannya dengan Korupsi?

Narkoba dan Korupsi merupakan satu kesatuan yang saat ini sudah sangat erat hubungan antara keduanya. Bahkan wabah korupsi dan narkoba telah begitu luas menjangkit di tanah air.

Berbagai kalangan secara umum melihat fenomena keduanya sebagai sebuah masalah akibat dari lemahnya hukum, pemerintahan, manusia dan bahkan budayanya. Gagasan-gagasan untuk memberantas korupsi dan narkoba pun, seperti ini perlu perbaikan. Sistem birokrasi dan pendidikan, muncul dari dua kutub ini: sistem dan manu-

sianya. Namun berbagai pendekatan dan gagasan tersebut terkesan masih bersifat parsial dan tidak menyeluruh.

Penulis mencoba melihat berbagai kesamaan korupsi dan narkoba melalui sudut pandang jaringan sosial (social networks). Dengan melihat relasi-relasi yang berkembang di masyarakat.

Padanan ini menjelaskan fenomena jejaring korupsi dan narkoba yang luas di tengah masyarakat sebagai suatu penyakit sosial yang bersifat mewabah. Ada beberapa ciri-ciri yang menunjukkan kesamaan antara keduanya, yaitu jaringan yang struktural, adanya tingkat akut keterjangkitan, sifat mewabah yang sulit dideteksi, faktor kesempatan yang terbuka dan kemampuan jaringan untuk bertahan.

Jaringan korupsi dan narkoba bersifat struktural dan memiliki banyak kesamaan. Di dalam jaringan korupsi ada biang, kroni, dan pendukung koruptor. Sedangkan di dalam jaringan narkoba ketiga tingkatan tersebut menjelma menjadi bandar, pengedar, dan para pemakai narkoba. Kelompok terakhir adalah kelompok potensial koruptor maupun potensial

pemakai narkoba, yang tentunya lebih luas lagi.

Kelompok potensial ini baru mendapat pengaruh setelah memasuki lingkungan yang korup atau lingkungan pemakai narkoba. Sedangkan biang koruptor tergolong rakus dan tidak mempan walaupun dengan solusi menaikkan gaji.

Demikian pula dengan bandar yang tidak pernah jera-jera. Jadi struktur korupsi dan narkoba ini secara umum bersifat hirarkis struktural sekaligus juga berbentuk jejaring (hierarchical and networked) yang memiliki dimensi horisontal dan vertikal yang kuat. Analogi korupsi dan narkoba menunjukkan adanya tingkatan hirarkis.

Tidak sama biang koruptor dengan mereka yang terpaksa korupsi dan tidak sama pula bandar dengan pemakai narkoba. Dalam kasus-kasus korupsi dan narkoba kita melihat para tersangka berupaya untuk mengambil tingkatan yang serendah-rendahnya. Mereka menghindari tuduhan berat sebagai biang korupsi atau bandar narkoba karena mengetahui adanya ancaman hukuman yang bertingkat pula.

Struktur koruptor dan pelaku narkoba juga membentuk jaringan yang sangat rapi. Semua yang

terlibat di dalam jaringan saling bahu membahu. Walaupun sering terjadi perselisihan namun adanya jaringan yang kuat seringkali dapat menutupinya agar tidak terungkap. Jaringan korupsi dan narkoba mampu melindungi praktek dan anggotanya dari endusan pihak luar.

Bagi yang tidak bisa bekerjasama, akan mendapat tekanan yang kuat untuk keluar jaringan. Bagi yang berada di jajaran bawah akan disepak atau bahkan terancam jiwanya. Bagi yang berada di jajaran tengah didiamkan saja sampai akhirnya mundur teratur. Sedangkan terhadap jajaran di atas, jaringan akan mempertahankan diri dengan memberi halusinasi yang menyesatkan. Para pejabat tinggi yang memiliki semangat pembaruan seringkali sulit menembus jaringan korupsi di tingkat bawahnya. Demikian pula dengan mantan bandar narkoba yang insyaf, seringkali terancam jiwanya oleh jaringannya semula.

Mendekati permasalahan korupsi dan narkoba melalui pendekatan jaringan (network approach) ini menunjukkan bahwa, dalam tingkatan yang berbeda-beda, betapa wabah korupsi dan narkoba ini telah menjangkiti seluruh lapisan anak bangsa. Adanya regenerasi dan mobilitas karir yang dinamis di dalam jaringan korupsi dan narkoba akan membuatnya semakin mewabah. Sehingga tidaklah mengherankan jika Indonesia tetap digolongkan negara terkorup di dunia dan surga narkoba. Rendahnya indeks pembangunan manusia Indonesia juga memberi sinyal betapa rentannya wabah ini menyebar sekaligus sulitnya upaya pemberantasannya.

Penulis menilai berbagai gagasan untuk mengatasi masalah korupsi dan narkoba masih bersifat parsial, belum menyeluruh dan terpadu. Kita sepakat perlunya penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Dan dengan banyaknya kesamaan, tidak pula salah jika kita menyebutkan dua penyakit diatas adalah dua anak yang dilahirkan oleh satu ibu, namun lain ayah, dan dengan kewenangan yang ada pada aparat peradilan, tidak pula bisa kita elakkan banyaknya dugaan keterlibatan aparat yang menggunakan barang bukti narkoba yang dikuasainya untuk pesta narkoba.

**Penulis adalah salah satu inisiator berdirinya Jurdilaga PTA Jambi, aktif menulis untuk beberapa media cetak dan online di Provinsi Jambi, serta merupakan mantan wartawan Jawa Pos Grup.*

Mengenal Lebih Dekat Bank Syari'ah



Oleh: M. Habibullah, S.E.I *

Kajian ekonomi syari'ah memang selalu layak untuk diperbincangkan, terlebih di lingkungan peradilan agama yang telah memiliki kewenangan berdasarkan UU nomor 3 tahun 2006 untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk di dalamnya perkara "Ekonomi Syari'ah", dan salah satu stakeholder dalam ekonomi syari'ah adalah bank syari'ah.

Berdasarkan hal tersebut sudah sewajarnya selaku warga peradilan agama khususnya hakim senantiasa mencari, menggali dan mengembangkan hukum khususnya mengenai hukum ekonomi syari'ah agar tingkat kepercayaan publik perbankan syari'ah terhadap kemampuan hakim peradilan agama dalam menyelesaikan suatu perkara dapat meningkat.

Realita yang terjadi saat ini sebagaimana yang penulis alami saat masih bekerja di salah satu bank syari'ah swasta, sebagian besar bank syari'ah terutama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi masih mempercayakan penyelesaian sengketa di luar peradilan agama, hal tersebut biasanya diperjanjikan sebelumnya di dalam akad antara bank dengan nasabah jika suatu saat terjadi sengketa.

Memang sebelumnya berdasarkan pasal 55 ayat 2 dan 3 UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah yang telah digugat oleh Ir.H.Dadang Achmad ke Mahkamah Konstitusi (sumber : Berita MK), hal tersebut dibenarkan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dapat dilakukan di luar Peradilan Agama apabila dalam akad

telah diperjanjikan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut menguatkan kepastian kewenangan Peradilan Agama, sehingga sudah saatnya kita bangkit dan mengambil bagian yang telah menjadi kewenangan absolut bagi peradilan agama ini, berpijak dari pemikiran tersebut penulis mencoba mengupas kulit ari tentang bank syari'ah semoga bisa menambah wawasan bagi pembaca.

Suatu hari penulis pernah ditanya seorang nasabah "Mas, bank syari'ah itu apa sih, apakah memang ada ajaran Islam tentang bank atau bank yang sistemnya di-Islam-kan?

Pada dasarnya Al-Quran tidak menyebut konsep lembaga keuangan secara eksplisit. Khusus tentang urusan ekonomi, Al-Quran memberikan aturan – aturan dasar, supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma/etika. Lebih jauh dari itu, transaksi ekonomi dan keuangan lebih berorientasi pada keadilan dan kemakmuran rakyat.

Rasulullah S.A.W pernah mendirikan lembaga Baitul Maal yang jika diartikan secara harfiah sebagai rumah dana, berfungsi sebagai penghimpun dana-dana umat, baik yang bersumber dari dana sosial dan tidak wajib seperti sedekah, denda, dan juga dana2 yang wajib seperti zakat, jizyah dll, dan untuk selanjutnya disalurkan untuk kepentingan umat. Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekono-

mi sendiri memiliki sedikit perbedaan dalam menafsirkan baitul maal ini. Sebagian berpendapat, bahwa baitul maal itu semacam bank sentral seperti yang ada saat ini. Sebagian lagi berpendapat, bahwa baitul maal itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara, namun kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah, S.A.W adalah merupakan proses penghimpunan dan penyaluran dana secara transparan yang menurut hemat penulis merupakan definisi dari bank itu sendiri.

Dalam musyawarah (ijma internasional) para ahli ekonomi Muslim beserta para ahli fiqh dari Akademi Fiqh di Mekkah pada tahun 1973 menyimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam dalam bentuk sistem ekonomi Islam ternyata dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Penerapan atas konsep tersebut adalah cikal bakal munculnya lembaga keuangan Islam.

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Prinsip syariah sendiri menurut Pasal 1 ayat 12 UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Sebagaimana dirilis oleh Bank Indonesia dalam situs resminya bahwa Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Hal tersebut secara tidak langsung tentunya akan berdampak dengan pengembangan kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, sehingga sudah sepatutnya kita menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam rangka memberi rasa keadilan kepada para pihak dalam perkara ekonomi syariah.

**Penulis adalah mantan karyawan Bank Syariah, kini bekerja di PA Bangko serta kru Jurdilaga PA Bangko.*

RENCANA NAK BELI MOBIL BARU
NAK BELIKAN BINI KALUNG EMAS,
NAK BESA'I RUMAH. BINI LAH SUDAH
CERITO KEMANO-MANO
NAH, RUPONYO REMUN DAK JADI NAEK
MALU NIAN JADINYO

MAKONYO WAK, DAK USAH
MULUK-MULUK DULU,
TESEBAR KEMANO-MANO
JADINYO MALU DEWEK KITO
SYUKURI BE APO YANG ADO,
DAN JANGAN LUPO BANYAK-BANYAK
SEDEKAH, BIAK NAMBAH TERUS
REZEKI TU



**USULAN KENAIKAN PANGKAT HAKIM DAN PNS
WILAYAH PTA JAMBI
OKTOBER 2013**

No	Nama	NIP	Dari	Ke	Jabatan	Satker	SK
1	Husnul Arifin, S.Ag., S.H.	19500206.197903.1.003	IV/c	IV/d	Hakim Tinggi	PTA Jambi	
2	Drs. Zulkifli, S.H., M.H.	19620703.199203.1.008	IV/b	IV/c	Hakim	PA Jambi	
3	Dra. Fauza M.	19561012.198203.2.003	IV/b	IV/c	Hakim	PA Jambi	
4	Mustainah, S.Ag	19650505.199403.2.002	III/c	III/d	Juru Sita Pengganti	PA Jambi	
5	Dra. Asmidar	19660720.199203.2.005	IV/a	IV/b	Wakil Ketua	PA Muara Bungo	OK
6	Auzar Nawawi, S.Ag, SH	19570225.198302.1.003	IV/a	IV/b	Ketua	PA Muara Bungo	
7	Drs. JAHARUDDIN	19591231.199303.1.018	IV/a	IV/b	Hakim	PA Muara Sabak	
8	Romi Herusman Saputra, S.H.I.	19870207.200604.1.002	III/a	III/b	PM Gugatan	PA Kuala Tungkal	OK
9	Sayang, S.HI, M.HI	19750721.200312.2.004	III/b	III/c	Staf	PTA Jambi	
10	Angga Setiawan Rahardi, S.H.	19870701.200604.1.002	III/a	III/b	Staf	PTA Jambi	
11	Aliyanto, S.Kom	19821211.200604.1.004	III/a	III/b	Staf	PTA Jambi	
12	Ismiatun, S.Pd	19780504.200604.2.003	III/a	III/b	Staf	PTA Jambi	
13	Said Alwi, S.H.	19630107.199402.1.001	III/c	III/d	Kasubbag Umum	PA Jambi	

**PERINGKAT PENGIRIMAN USULAN
PERMINTAAN REMUNERASI
SEPTEMBER 2013**

No	Nama Satker	Ket
1	PA Sungaipenuh	
2	PA Muara Tebo	
3	PA Kuala Tungkal	
4	PA Bangko	
5	PA Muara Bungo	
6	PA Sarolangun	
7	PA Muara Bulian	
8	PA Sengeti	
9	PA Jambi	Terlambat
10	PA Muara Sabak	Terlambat